

NU DAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL:

(Studi : Peran Politik PCNU Kabupaten Ponorogo pada Pilkada Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Vera Sulistyana Devi Cristyani

1906016118

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Vera Sulistyana Devi Cristyani

NIM : 1906016118

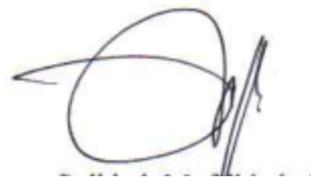
Jurusan : Ilmu Politik

Judul : NU DAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL: (Studi Peran Politik PCNU
Kabupaten Ponorogo pada Pilkada Tahun 2020)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 22 September 2023

Pembimbing,



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP. 198505102016012901

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

NU DAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL:

(Studi : Peran Politik PCNU Kabupaten Ponorogo pada Pilkada Tahun 2020)

Disusun Oleh:

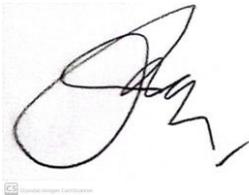
Vera Sulistyana Devi C.

1906016118

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 02 Oktober 2023
dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Drs. Nur Syamsudin, M.A.
NIP. 196805051995031002

Sekretaris



Solkhah Mufrikhah, M.Si.
NIP. 198505102016012901

Penguji 1



Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 September 2023



Vera Sulistyana Devi C.

NIM: 1906016118

KATA PENGANTAR

Assalamualiakum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah wa syukurilah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam skripsi yang berjudul “NU dan Politik di Tingkat Lokal: Studi Peran Politik PCNU Kabupaten Ponorogo pada Pilkada Tahun 2020”. Skripsi ini, merupakan sebuah syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ilmu Politik pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Skripsi dibuat dengan ketulusan hati penulis mendapat banyak dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, dengan ketulusan ijin penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan bagi penulis.
2. Prof. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Nur Syamsudin, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Solkhah Mufrikah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan motivasi, dan kekuatan untuk penulis. Tak henti-hentinya beliau memberikan nasihat dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bentuk ilmu pengetahuan baru serta pengalaman yang telah diberikan.
6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu dan pengetahuan baru yang mampu membuat peneliti dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.

7. Seluruh civitas akademik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam mempelancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
8. Pengurus PCNU Kabupaten Ponorogo yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian guna pemenuhan tugas akhir, sehingga penulis mendapatkan berbagai data-data yang mendukung penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Soiran dan Ibu Mujiatun, terutama untuk Ibu saya. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempat untuk pulang, bu.
10. Kakek dan Nenek tercinta saya Nyono dan Boinem, yang ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, mereka tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan studi ini, sehingga perkataan mereka yang selalu melekat di ingitan penulis. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Kakakku tersayang Anik Nur Habyba, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu, materi, doa, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Sahabat penulis. Hana Fairuz Suci R., Nabila Riski M., Iva Juliaviani, Faifa Dwi F., Lathifatul Hanifah, dan Windy Ovie Agatha, yang telah banyak membantu dan membersamai proses peneliti dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu support, dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik D angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
14. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
15. Terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli berapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih banyak

sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja seelah ini. Kamu keren dan hebat, Vera.

Setelah selesai menyelesaikan skripsi ini dengan banyak tantangan, perjuangan. kesabaran, melalui proses yang sangat panjang akhirnya terselesaikan yang tentunya dalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang hendak membacanya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kesabaran bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi. Akhir kata penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih dan maaf kepada seluruh pihak yang terlibat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Semarang, 22 September

Penulis

Vera Sulistyana Devi C,

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan selaga syukur kepada Allah SWT Pencipta Semesta Alam

Karya ini penulis persembahkan kepada

Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sosok inspirasi dan motivasi melalui irangan doa, nasihat, serta kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penuli.

Dosen pembimbing sekaligus mentor saya, Solkhah Mufrikhah, M.Si yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya serta motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sera teman-teman yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis. Semoga setiap ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan maslehat bagi semua.

Almamater Tercinta Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2:286)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesesahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”.

(HR Muslim)

ABSTRACT

This research discusses the role of the Ponorogo Regency PCNU in the 2020 regional head elections (Pilkada). The existence of Nahdlatul Ulama (NU) has a significant influence in politics, because Nahdlatul Ulama (NU) is the largest social religious organization in Indonesia, especially Ponorogo Regency. Nahdlatul Ulama (NU) is a non-political social religious organization in accordance with the values of the 1926 khittah as a result of the 27th Congress in Situbondo, East Java. Based on the 1926 sermon, it was emphasized that NU was a neutral organization. But in fact, NU is often used as a vote getter and Nahdliyin is the main target for candidate pairs because it is considered to be the biggest vote contributor in getting support. The aim of this research is to determine the political attitude of the Ponorogo Regency PCNU in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) and to find out what factors influence the Ponorogo Regency PCNU in determining its political choices in the 2020 Regional Election. This research uses political culture theory from Almond and Verba. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out using in-depth interviews and documentation. Data analysis uses interactive analysis, namely by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The research results show that the role of the Ponorogo Regency PCNU in the 2020 regional head elections (Pilkada) is neutral regarding its political choices. However, what is meant by neutral is that as an organization, NU does not invite its members to choose one candidate from the two pairs of candidates, but its members are free to make their choice, the important thing is not to bring the name of the NU organization into political activities. There is a diversity of political attitudes of the Ponorogo Regency PCNU, namely, neutral, supportive and non-supportive attitudes. The involvement of the Ponorogo PCNU management in the 2020 regional elections was: First, as actors, namely playing the role of the successful or winning team. Second, as a supporter, namely supporting the candidates for regent and deputy regent. Third, as a participant, that is, you only give your blessing to all candidates for regent and deputy regent but are not involved in mutual support and support for continuing to exercise your right to vote by voting on voting day. Furthermore, the factors that influence the Ponorogo Regency PCNU in determining its political choices are the similarities in religion and organization adhered to by the prospective candidate. Good performance is preferred over the educational background of a prospective candidate. However, what is also no less important is how attractive the figure of the regional head candidate is. Vision, mission, goals and figures that are in line with Islamic values and organizational goals are taken into consideration in supporting regional head candidate pairs. This shows that they do not only rely on identity or affiliation factors, but also consider the expected benefits of the elected leader. In this context, PCNU Ponorogo seems to prioritize candidates who are committed to religious values and Islamic education, as well as programs that focus on economic and social issues that are considered important by the local community.

Keywords: Political Attitude, Role, PCNU Ponorogo, Pilkada

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peranan PCNU Kabuapten Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengaruh yang signifikan dalam perpolitikan, karena Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia khususnya Kabuapten Ponorogo. Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang tidak berpolitik sesuai dengan nilai-nilai khittah 1926 hasil Mukhtamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Berdasarkan khittah 1926 menegaskan bahwa NU adalah organisasi yang netral. Tetapi faktanya, NU seringkali dijadikan sebagai vote getter dan nahdliyin dijadikan target utama pasangan calon kandidat karena dianggap sebagai penyumbang suara terbesar dalam mendapatkan dukungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap politik PCNU Kabupaten Ponorogo pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi PCNU Kabupaten Ponorogo menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori budaya politik dari Almond dan Verba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data analisis menggunakan analisis interaktif yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PCNU Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 bersikap netral terhadap pilihan politiknya. Namun, netral yang dimaksud ialah secara organisasi NU tidak mengajak anggotanya memilih salah satu kandidat calon dari kedua pasangan calon, akan tetapi anggotanya bebas untuk menentukan pilihannya yang penting tidak membawa nama organisasi NU dalam kegiatan politik. Adanya keragaman sikap politik PCNU Kabupaten Ponorogo yaitu, sikap netral, mendukung dan tidak mendukung. Keterlibatan pengurus PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 kemarin yaitu: *Pertama*, sebagai aktor yaitu berperan sebagai tim sukses atau tim pemenang. *Kedua*, sebagai pendukung yaitu mendukung terhadap calon bupati dan wakil bupati. *Ketiga*, sebagai partisipan yaitu hanya memberikan restu pada semua calon bupati dan wakil bupati tetapi tidak terlibat dalam saling dukung mendukung tetap menggunakan hak pilih dengan cara memberikan suara di hari pemungutan suara. Selanjutnya adapun faktor yang mempengaruhi PCNU Kabupaten Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya ialah kesamaan agama dan organisasi yang dianut calon kandidat, Kinerja yang baik lebih dipilih dari pada latar belakang pendidikan seseorang calon kandidat. Namun, demikian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana daya tarik figur calon kepala daerah. Visi, misi, tujuan dan figur yang sejalan dengan nilai-nilai islam dan tujuan organisasi menjadi pertimbangan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan faktor identitas atau afiliasi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini, PCNU Ponorogo nampaknya mengutamakan kandidat yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan pendidikan islam, serta program-program yang berfokus pada masalah ekonomi dan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat setempat.

Kata kunci: Sikap Politik, Peran, PCNU Ponorogo, Pilkada

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Nota Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	v
Persembahan	iv
Motto.....	viii
Abstract	ix
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Definisi Konseptual.....	15
3. Sumber dan Jenis Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II Landasan Teori	25
A. Budaya Politik	25
BAB III Gambaran Lokasi dan Objek Penelitian	32
A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo	32
B. Dinamika Politik di Kabupaten Ponorogo	41
C. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo	44
BAB IV Sikap Politik PCNU Ponorogo pada Pilkada	

Tahun 2020	67
A. Menjaga Netralitas Organisasi	67
1. Bentuk Netralitas Politik NU pada Pilkada tahun 2020.....	68
1.1 Tidak Memihak Salah Satu Paslon.....	71
1.2 Merestui Semua Paslon	73
1.3 Memberikan Kebebasan Warganya untuk Memilih.....	76
B. Perbedaan Preferensi Politik Pengurus PCNU Ponorogo	81
1. Memberikan dukungan Paslon Sugiri Sancoko-Lisdyarita.....	83
2. Memberik dukungan Paslon Ipong Muchlissoni-Bambang.....	86
3. Bersikap Netral	89
BAB V Faktor PCNU Ponorogo dalam Menentukan Pilihan Politiknya	
pada Pilkada 2020	98
BAB VI Penutup	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo	33
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo	35
Tabel 3	Keadaan Curah Hujan Kabupaten Ponorogo 2019-2021	36
Tabel 4	Kemiskinan Kabupaten Ponorogo 2019-2021	37
Tabel 5	Pertumbuhan Penduduk Ekonomu Kabupaten Ponorogo.....	39
Tabel 6	Rincian Hasil Suara Per Kecamatan Kabupaten Ponorogo	42
Tabel 7	Pilkada Langsung tahun 2005-2020.....	43
Tabel 8	Data Presentase Pemilih dan Hak Pilih Pilkada 2005-2020	44
Tabel 9	Periode Jabatan PCNU Ponorogo	50
Tabel 10	Pengurus MWC Se-Kabupaten Ponorogo 2019-2024	51
Tabel 11	Jumlah Sekolah atau Madrasah Ma'arif	55
Tabel 12	Matrik Program Kerja PCNU Ponorogo 2019-2024	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilu tetap menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam demokrasi, dan prosesnya harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis (Antari, 2018). Pemilihan umum adalah kegiatan politik yang berkaitan dengan terbentuknya kekuasaan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan ajang politik untuk merebut kekuasaan dan mendapatkan legitimasi politik di tingkat daerah, serta meningkatkan partisipasi politik dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal (Edwinarta and Dwijayanti 2018). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Ponorogo memiliki hubungan yang erat dengan strategi politik yang digunakan oleh masing-masing calon. Salah satu strategi ini adalah bagaimana calon-calon tersebut membangun pola komunikasi dan mendapatkan dukungan serta simpati dari masyarakat Kabupaten Ponorogo. Organisasi kemasyarakatan (ormas) memainkan peran penting sebagai basis kekuatan politik yang digunakan oleh masing-masing calon untuk mencapai tujuan mereka dalam Pilkada.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai penggerak konstitusi sangat penting dalam konteks politik praktis, seperti Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Seperti yang kita ketahui, organisasi kemasyarakatan memiliki pemimpin, anggota, pendukung, dan simpatisan yang jumlahnya banyak. Dalam konteks politik praktis, seperti Pemilihan kepala daerah (Pilkada) proses pendekatan yang dilakukan oleh calon pemimpin daerah terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah hal yang umum dan sering terjadi. Proses ini adalah bagian penting dari strategi politik dalam upaya mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat serta organisasi yang memiliki pengaruh dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Ponorogo, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dianggap sebagai sumber dukungan yang paling kuat. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo yang beragama Islam dan memiliki latar belakang terkait dengan NU. Oleh karena itu, NU dianggap memiliki potensi besar dalam memperoleh suara dalam Pilkada karena basis dukungan yang luas di kalangan masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik dalam pemilihan umum. Nahdlatul Ulama (NU) telah kembali mengikuti peraturan organisasinya yang mengarahkan organisasi ini untuk menjalankan peran utamanya sebagai organisasi sosial dan keagamaan, seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturannya yang merujuk pada *khittah* 1926. Netralitas Nahdlatul Ulama (NU) diimplementasikan melalui fatwa yang dihasilkan dalam muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Dalam fatwa tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa NU kembali sepenuhnya kepada tujuan awal yang digariskan oleh para pendirinya saat organisasi ini didirikan, yaitu sebagai organisasi sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Dengan kata lain, NU memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan fokus pada perannya sebagai organisasi sosial dan keagamaan (Syamsurijal, 2023).

Hasil muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-27 di Situbondo, Jawa Timur dalam keputusan Nomor 02/MNU-27/1984 yang dengan tegas menyatakan bahwa NU telah kembali kepada prinsip-prinsip yang tertuang dalam *khittah* 1926. *Khittah* Numenjadi landasan berfikir, bersikap, dan bertindak bagi anggota NU yang harus tercermin dalam perilaku politik individu maupun dalam organisasi, serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keputusan tersebut menegaskan komitmen NU untuk menjalankan prinsip-prinsip *khittah* 1926 sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam konteks sikap kembalinya Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam prinsip-prinsip *khittah* 1926, terdapat tiga persepsi yang ada di kalangan NU. *Pertama*, persepsi ini menyatakan bahwa NU harus mengembalikan struktur organisasi seperti yang terdapat *khittah* awal, yang menempatkan peran ulama *Syuriyah* sebagai lebih dominan dibandingkan dengan *Tanfidziyah*. *Kedua*, Persepsi ini mengindikasikan bahwa NU, dalam kegiatan kapasitasnya sebagai organisasi atau *jam'iyah*, tidak lagi memiliki ikatan organisator dengan organisasi sosial politik dalam bentuk apapun. *Ketiga*, persepsi ini menekankan bahwa NU sebagai *jam'iyah* akan lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dakwah, keagamaan, dan kesejahteraan sosial (Mufarikhin, 2022).

Pada tanggal 9 Desember 2020, diadakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di sekitar 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Salah satu dari 224 kabupaten yang menggelar Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada tanggal tersebut adalah Kabupaten Ponorogo (Hilman, Khoirurrosyidin, and Lestarini 2020). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten ponorogo tahun 2020

kemarin merupakan salah satu proses demokrasi yang menarik untuk dibahas, karena mempertemukan kembali dua calon bupati, yaitu Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlissoni yang sebelumnya telah bersaing pada Pilkada tahun 2015. Perbedaan kedua Pilkada tersebut adalah dimana pada Pilkada tahun 2015 terdapat empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing, sedangkan pada Pilkada tahun 2020 hanya tersisa dua nama calon tersebut. Dimana kedua calon tersebut dianggap memiliki kekuatan politik yang cukup dalam konteks Pilkada tersebut. Hasil rekapitulasi perolehan suara antara Ipong Muchlissoni dan Sugiri Sancoko pada saat itu tidak menunjukkan perbedaan yang begitu signifikan, Meskipun Ipong, yang pada saat itu berpasangan dengan Soedjarno berhasil mendapatkan 2,57% lebih banyak dibandingkan dengan Sugiri Sancoko yang berpasangan dengan Sukirno, namun selisih suara tersebut antara keduanya tidak begitu besar (Kurniawan, 2022b).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin, menunjukkan hasil yang tidak terduga ketika kedua calon yaitu Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlissoni kembali mencalonkan diri lagi. Namun, pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kali ini mereka berdua memiliki pasangan calon yang berbeda dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Hasil Pilkada menunjukkan bahwa kandidat penantang, Sugiri Sancoko berhasil memenangkan posisi Bupati Ponorogo untuk periode 2021-2024 dengan meraih 352.047 suara atau 61,75%. Pasangan calon nomor 1, yakni Sugiri Sancoko-Lisdyarita, didukung oleh PDIP, PAN, PPP, dan Hanura dengan total sembilan kursi di DPRD Ponorogo. Sementara itu, pasangan calon petahana nomor 2, Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono, hanya memperoleh dukungan sebesar 218.073 suara atau 38,35%, dengan didukung oleh NasDem, PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PKS dengan total 36 kursi di lembaga legislatif (Mahardika 2021). Kemenangan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari perorangan, partai politik, hingga organisasi atau lembaga. Salah satu organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang dianggap sebagai salah satu pihak yang digadang-gadang berperan dan turut serta dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut.

Nahdlatul Ulama (NU) awalnya didirikan bukan sebagai entitas politik, tetapi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki falsafah dan gerakan politik kebangsaan. Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik adalah suatu yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan. Dalam ranah politik, NU memiliki peran politik yang tercermin dalam gerakan yang dikenal sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti mendorong kepada yang baik

dan menolak yang buruk. Pandangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam khittah NU (Umamah, 2019). Sesuai dengan khittah 1926, Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. NU adalah organisasi keagamaan yang tidak memiliki afiliasi atau keterlibatan dengan organisasi atau partai politik manapun. Sikap politik NU terhadap dunia politik adalah netral dan fokus utama NU adalah pada bidang-bidang sosial dan keagamaan. Dengan kata lain NU telah menetapkan prinsip-prinsip netralitas dalam politik.

Organisasi kemasyarakatan islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertahankan netralitas atau ketidakberpihakan dalam urusan politik atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 kemarin, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo yaitu Fatchul Aziz, menyatakan sikap netral yang berarti tidak memberikan dukungan kepada kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Meskipun demikian, Fachtul Aziz tetap mendorong masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), kader, dan simpatisan untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi tersebut, dengan keyakinan bahwa itu adalah hak masing-masing individu. Ketua PCNU Ponorogo berperan sebagai perwakilan NU Ponorogo dalam menyikapi sikap sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, sementara itu juga menyoroti pentingnya menganalisis sikap politik dari elite NU. Elite Nahdlatul Ulama (NU) adalah sekelompok individu yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari tingkat pusat, cabang, hingga tingkat wilayah. Mereka adalah orang yang memiliki pengaruh dalam organisasi tersebut dan seringkali berperan dalam menentukan kebijakan dan arah organisasi (Kurniawan, 2022). Dalam pembahasan sebelumnya tentang sikap politik elite NU, posisi elite di PCNU Ponorogo merujuk kepada individu-individu yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan struktural atau posisi pimpinan dalam organisasi NU di wilayah Ponorogo.

Pada kesempatan sebelum pelaksanaan pemilihan langsung, kantor PCNU Ponorogo menerima kunjungan dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita mengawali kunjungan tersebut dan diterima dengan baik oleh pimpinan PCNU Ponorogo. Dalam pertemuan singkat tersebut, Sugiri Sancoko beserta rombongan meminta doa restu dan dukungan dari warga Nadlatul Ulama (NU). Selanjutnya, kantor PCNU Ponorogo juga menerima kunjungan dari pasangan calon bupati lainnya, yaitu Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono bersama rombongan. Sama seperti pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita, Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono juga menyambung

silaturahmi dan memohon doa restu dari Nahdlatul Ulama (NU). Namun, yang menarik adalah Ipong sebagai pertahan juga memaparkan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai salam menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Hal ini menungkin dimaksudkan untuk mempertajarkan kepercayaan masyarakat Ponorogo khususnya warga NU, terhadap kepemimpinan Ipong dan mendapatkan ukungan untu masa jabatan keduanya dalam Pilkada tahun 2020.

Dalam kegiatan politik yang telah disebutkan, Ketua Pengurus Cabang Nadlatul Ulama (PCNU) Ponorogo menyatakan bahwa sebagai organisasi mereka tetap menjaga netralitas dalam politik. Mereka tidak berpihak pada salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Ketua PCNU Ponorogo menjelaskan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) hanya berperan sebagai fasilitator informal dalam memfasilitasi interkasi antara pasangan calon dengan masyarakat NU. Meskipun demikian, disisi lain juga ada kemungkinan bahwa elite atau pimpinan dalam PCNU Ponorogo memiliki beragam pandangan politik atau mungkin tidak memiliki beragam pandangan politik atau mungkin tidak memiliki pandangan yang sama. Ini berarti bahwa elite yang terdapat dalam struktur pengurus PCNU Ponorogo memiliki hak untuk membuat pilihan politik pribadi mereka sendiri. Hal ini juga mencerminkan bahwa dalam pemilihan umum, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Pada intinya PCNU Ponorogo sebagai organisasi tetap bersikap netral dalam politik, sementara elite dalam organisasi tersebut memiliki kebebasan untuk memiliki pandangan politik yang berbeda. Masyarakat juga memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan dari pihak manapun.

Penelitian tentang sikap politik pengurus PCNU Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimulai dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk memahami dasar-dasar yang relevan untuk melakukan pembaahruan dalam penelitian. Ada dua penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian oleh (Sholikin, 2018) membahas mengenai neralitas oragnisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dalam politik. *Kedua*, penelitian oleh oleh (Mafazah, 2020) membahas tentang pandangan politik elite non-politik dan pandangan pengrus Nahdlatul Ulama (NU) terhadap pencalonan Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Penelitian ini sama-sama membahas oragnisasi kemasyarakatan berbasis islam. Sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, lebih fokus ke peran dan sikap politik PCNU Ponorogo dalam Pilkada tahun 2020 serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan

politikanya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap politik elite NU dalam konteks politik lokal. Dan dimana dalam penelitian ini tidak membahas terkait dengan memenangkan salah satu calon kandidat

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sikap politik PCNU Ponorogo dalam tingkat kabupaten menjadi sangat penting untuk mengukur sejauh mana peran dan pandangan politik PCNU Ponorogo dalam konteks politik praktis. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memahami sejauh mana kesadaran pengurus PCNU terhadap khittah Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan pedoman utama dalam menjalankan organisasi NU. PCNU Ponorogo memiliki peran penting dalam membentuk sikap politik masyarakat NU di Ponorogo. Mereka tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik informal yang sering kali memiliki pengaruh besar dalam pemilihan dan keputusan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana PCNU di Ponorogo merespon Pilkada tahun 2020, termasuk peran dan sikap politik mereka terhadap menentukan pilihan politik. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul ***“NU DAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL: Peran Politik PCNU Kabupaten Ponorogo pada Pilkada tahun 2020”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sikap politik PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politik pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sikap politik PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengurus PCNU Ponorogo dalam menentukan sikap dan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah kegunaannya untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian tentang peran politik pengurus PCNU Ponorogo adalah bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik lokal. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi mengenai peran politik organisasi sosial keagamaan di Indonesia, terutama pada tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Berikut adalah manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini :

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kajian yang bermanfaat bagi masyarakat agar mereka dapat memahami realitas politik dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan.
- b) Bagi PCNU, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menentukan sikap organisasi di tingkat pengurus cabang ketika menghadapi proses demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PCNU dalam mengambil sikap politik yang sesuai dengan pedoman organisasi dan garis panduan yang telah ditetapkan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan untuk mempertimbangkan penelitian ini, penulis telah memasukkan beberapa penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut :

1. Tentang Sikap Politik

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Rohman, 2019), dengan skripsi yang berjudul **“Sikap Politik PWIPNU Terhadap Khittah NU pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018”**. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami sikap politik PW IPNU serta keterlibatan pengurusnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Hasil penelitian ini membahas tentang kesetiaan organisasi PW IPNU Jawa Tengah terhadap Khittah NU, yang merupakan prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dan organisasi yang terafiliasi dengan NU. Khittah NU menegaskan bahwa keterlibatan organisasi NU dalam politik praktis tidak diperbolehkan. Meskipun pada pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018, PW IPNU Jawa Tengah tidak mengeluarkan pernyataan sikap politik sebagai organisasi, namun terlibat dalam politik praktis dengan mendukung kampanye salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Dukungan ini didasarkan pada tanggung jawab moral terhadap kader NU yang menjadi calon. Pengurus PW IPNU Jawa Tengah membentuk organisasi relawan, yaitu Aliansi Remaja Mencintai Ida Fauziyah (ARMI) dan Kita Muda Jateng, untuk mengkampanyekan calon kandidat tersebut. Pengurus PW IPNU Jawa Tengah aktif menggerakkan organisasi-organisasi ini dengan tujuan mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak suara mereka dan memberikan dukungan kepada calon yang didukung oleh PW IPNU Jawa Tengah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Sholikin & Karim, 2015), dengan skripsi yang berjudul **“DEVIASI SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2014 di Sleman dan Maros)”**. Tujuan untuk memahami sikap netralitas organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selama proses politik elektoral. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengimplementasikan kebijakan politiknya dengan mengacu pada khittah politik Muhammadiyah sebagai panduan organisasi. Namun, struktur kepemimpinan kolektif dan

kolegial yang terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebabkan perbedaan pandangan politik di antara tokoh-tokoh elit. Mereka dikelompokkan menjadi kelompok Moderat, inklusif, dan eksklusif, yang kemudian memengaruhi pilihan politik mereka dalam Pemilihan Presiden 2014 yang membagi penduduk Indonesia menjadi dua kubu. Faksionalisasi di antara elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengakibatkan adanya penyimpangan dari netralitas politik elektoral Muhammadiyah di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan Kabupaten Sleman dan Maros sebagai contoh kasus, dimana dukungan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah di daerah tersebut terhadap salah satu kader dalam proses Pilkada didasari oleh pandangan politik yang telah mereka terima dari elite Pimpinan Pusat yang masih menunjukkan sikap politik individu mereka dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa netralitas politik elektoral Muhammadiyah, yang sebelumnya dianggap sebagai sikap netral, sering kali menjadi ambigu dan dapat dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Keputusan elite di daerah untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu kader Muhammadiyah dalam politik elektoral dipengaruhi oleh ketidaksesuaian politik dan persaingan politik yang dirasakan di tingkat daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati et al., 2016), dengan artikel yang berjudul ***"Fenomena Politik Soroh Terhadap Sikap Politik Organisasi MGPSSR Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karangasem Tahun 2015"***. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi berbasis keluarga MGPSSR (Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi) menentukan sikap politik pada Pilkada 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipandang sebagai sebuah ikatan sosial dalam masyarakat umat Hindu di Bali yang mengacu pada garis keturunan (dinasti) yang sama, Soroh Karangasem dianggap oleh kelompok kepentingan sebagai salah satu faktor pendukung. Warga Pasek (MGPSSR) mulai menunjukkan adanya keterpihakan kepada calon kandidat yang memiliki latar belakang keturunan yang sama. Penelitian ini berada di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat 157 relawan dibentuk oleh MGPSSR untuk terlibat dalam politik dan mendukung kandidat yang dipilih. Selain itu, soroh salah satu

faktor utama dalam memberikan dukung kepada calon legislatif yang memiliki latar belakang yang sama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah, 2015), dengan skripsi yang berjudul **“Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Suksesi Kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014”**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap politik partai PPP dalam suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada pemilihan umum 2014, terjadi kenaikan jumlah suara yang diperoleh oleh PPP dibandingkan dengan pemilihan umum 2009. Pada pemilihan umum 2014, seluruh anggota partai PPP secara resmi mendukung koalisi merah putih yang dipimpin oleh Prabowo. Bagi PPP, proses pergantian kepemimpinan pada pemilihan umum 2014 dianggap sukses dan dijadikan sebagai pengalaman berharga untuk masa depan. Sebelum terjadi konflik internal di PPP, koalisi merah putih mendapat dukungan suara yang solid dari partai PPP, namun setelah pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK, sebagian anggota PPP memilih untuk mendukung pemerintahan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Apriyawan, 2020), dengan skripsi yang berjudul **“Politik Elite NU: Keterpihakan dalam Pilpres Tahun 2019”**. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keterpihakan Elite Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau dalam Pilpres tahun 2019. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak dipimpin oleh Said Aqil Siradj dan Rusli Ahmad Nahdlatul Ulama (NU) lebih banyak terlibat dalam politik daripada membina umat. Selain itu, terjadi keterpihakan elite NU terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilpres tahun 2019 yang disebabkan oleh kepentingan mereka sendiri. Hal ini disebabkan etensitas *idealisme politik* yang ditanamkan oleh ketua PWNU, sehingga etensitas dalam membina umat dan berkhidmat kepada agama, ulama, habib, bangsa dan negara terkikis oleh modernisme dan kapitalisme.

2. Tentang Perilaku Politik

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2022), dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Perilaku Politik Komunitas Motor Ninja Fans Club (NFC) dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Tasikmalaya”**. Penelitian

ini menggunakan paradigma non-postivisme dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengetahui, dan memahami tentang perilaku politik komunitas motor dalam pemilihan umum. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa perilaku politik NFC Tasikmalaya dalam Pemilu serentak tahun 2019 cenderung netral dan tidak ada keterpihakan terhadap pasangan calon atau partai politik tertentu. Ada tiga faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan rasional. Perilaku politik NFC Tasikmalaya dipengaruhi oleh faktor sosiologis karena adanya kepemimpinan baru yang dipimpin oleh perwira Angkatan Darat dan ketua NFC yang merupakan seorang ASN yang diharapkan bersikap netral dalam kontestasi politik. Hal ini mengakibatkan NFC memilih untuk tetap netral dalam Pemilu. Faktor psikologis juga mempengaruhi perilaku politik NFC Tasikmalaya karena anggota NFC memiliki persepsi dan orientasi politik yang berbeda-beda. Hal ini membuat NFC menghadapi kesulitan dalam menentukan arah politik yang akan diambil dalam Pemilu 2019 karena adanya anggota yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Faktor rasional berperan dalam mempengaruhi perilaku politik NFC Tasikmalaya karena mereka secara aktif mengenali isu-isu yang muncul baik di tingkat lokal maupun nasional. NFC memiliki pandangan bahwa Pemilu 2019 memiliki potensi untuk memicu konflik dan mengancam persatuan yang telah dijaga oleh setiap anggota selama ini. NFC juga mempertimbangkan adanya sentimen agama yang dapat mempengaruhi keranah politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, NFC Tasikmalaya telah mengambil keputusan untuk memelihara keharmonisan dan kesepakatan bersama dengan memilih untuk tetap tidak memihak dan tidak memiliki kecenderungan terhadap salah satu partai atau kandidat dalam Pemilu 2019.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Ardila, 2022), dengan skripsi berjudul ***“Perilaku Memilih Masyarakat Desa Nagari Kota Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilu Legislatif”***. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan fenomena dukungan masyarakat Kota Rawang terhadap Novarita dalam Pemilu legislatif 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan dukungan terhadap Novarita dalam konteks pemilihan legislatif disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosiologis menjadi salah satu penyebab penurunan dukungan, seperti politik uang yang terjadi dalam

pemilihan. Selain itu, faktor lain adalah kegagalan Novarita dalam menjabat sebagai walينagari sebelumnya dan kurangnya pengalaman politik yang dimiliki oleh Novarita. Faktor psikologis juga mempengaruhi penurunan dukungan, seperti penolakan terhadap partai politik yang mendukung Novarita. Terdapat pandangan atau persepsi negatif dari sebagian masyarakat terhadap partai tersebut, sehingga mengurangi dukungan terhadap Novarita. Pendekatan rasional juga menjadi faktor penurunan dukungan, di mana masyarakat memiliki anggapan bahwa perempuan tidak cocok menjadi anggota legislatif. Selain itu, ketidakminatan terhadap visi dan misi Novarita juga turut mempengaruhi penurunan dukungan. Adanya pesimisme dari masyarakat terhadap peluang kemenangan Novarita juga menjadi pertimbangan dalam penurunan dukungan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Sulton et al., 2022), dengan artikel berjudul **“Perilaku Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengamati perilaku politik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi perilaku politik mahasiswa, yaitu struktur kepribadian mereka, pengaruh lingkungan sosial politik yang tidak langsung, lingkungan politik langsung yang membentuk kepribadian mahasiswa, dan situasi dalam lingkungan politik langsung. Semua faktor ini memiliki dampak positif terhadap perilaku politik mahasiswa. Namun, satu indikator yang tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku politik mahasiswa adalah situasi politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah. Situasi politik tidak dianggap sebagai faktor eksternal atau pertahanan diri yang memengaruhi perilaku politik mahasiswa

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Febriyanto, 2021), dengan judul skripsi **“Analisis Pola Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal”**. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang perilaku pemilih pemula dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Hasil penelitian, ditemukan bahwa pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa pemilih pemula masih mempertimbangkan kesamaan agama, latar belakang pendidikan kandidat, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menentukan pilihan

mereka. Dalam pendekatan psikologis, terlihat bahwa pemilih pemula cenderung menggantungkan pilihan mereka pada partai pendukung dan tokoh-tokoh yang mendukung kandidat. Sementara dalam pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula memilih berdasarkan visi misi yang ditawarkan oleh kandidat. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, terlihat bahwa perilaku pemilih pemula lebih cenderung dipengaruhi oleh pendekatan psikologis. Mereka terpengaruh oleh partai pendukung kandidat dan tokoh-tokoh yang mendukung kandidat. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam memengaruhi pilihan mereka.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh (Jama et al., 2021), dengan artikel berjudul *“Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran, bentuk, dan penguatan perilaku pemilih di warga desa, serta pendidikan politik bagi warga desa dari kelompok muda dan kelompok tua dalam konteks pemilihan kepala desa. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa dapat dikelompokkan menjadi pemilih pemula, pemilih yang berpindah haluan, pemilih yang cenderung mengambang, dan pemilih yang konsisten. Perilaku ini tercermin dalam penggunaan hak suara, dukungan materi dan fisik, serta partisipasi dalam musyawarah desa. Penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa dilakukan melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh aparatur desa, kontestan pemilihan, relawan, gereja, dan panitia penyelenggara pemungutan suara. Sementara itu, pendidikan politik bagi warga desa golongan muda didapatkan melalui berbagai media online, sementara golongan tua mendapatkan pendidikan politik dari media cetak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh para akademisi mengenai kedua topik ini, peneliti memposisikan penelitian ini untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kajian ini. Persamaannya sama-sama membahas tentang sikap politik dan perilaku politik. Sedangkan perbedaannya penelitian yang sekarang adalah fokus pada tingkat lokal serta pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap politik pengurus PCNU dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Temuan ini dapat memberikan wawasan yang lebih khusus tentang dinamika politik tingkat daerah dan peran penting pengurus PCNU dalam

proses pemilihan. Perbedaan selanjutnya penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik mereka dalam menentukan pilihan politiknya, yang dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik dan relevan dalam konteks tersebut. Penelitian ini berkedudukan bukan sebagai penelitian baru namun penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan menambahi penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dalam penelitian ini saya memberikan perspektif yang berbeda dalam penelitian lainnya sehingga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai topik tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memperoleh informasi melalui pengumpulan data, meneliti, dan menganalisis data. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Wenda et al., 2018).

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat atau lingkungan sosial tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti (Yati 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kejadian yang diteliti. Menurut Moleong (2009) dikutip dalam (Adhimah 2020), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini berbentuk deskripsi dan analisis data dengan menggunakan bahasa dan kata-kata, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada penelitian ini, digunakan jenis kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Menurut John (2016) dikutip (Despita and Gautama 2022), studi kasus adalah suatu metode penelitian yang memungkinkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan intensif tentang satu objek atau kasus tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kasus atau objek studi kasus dapat

diperoleh dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian (Pahleviannur et al., 2022).

Alasan peneliti menggunakan penelitian jenis kualitatif karena bertujuan untuk memaparkan masalah yang timbul serta mendiskripsikan data dalam bentuk kata-kata sesuai fakta selama penelitian berlangsung digunakan untuk memahami fenomena penelitian yang akan diteliti. Dimana fenomena yang akan diteliti tentang sikap dan peran politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo pada Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020, serta membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin yang tentunya membutuhkan penjelasan dan deskripsi yang lebih objektif sesuai dengan kenyataan.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pengertian yang disusun secara sistematis dan terstruktur mengenai suatu konsep atau istilah. Definisi konseptual memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terperinci tentang konsep atau istilah tersebut dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan bagian-bagian penting yang terkait dengan konsep tersebut di lapangan (Agustian, Saputra, and Imanda 2019).

a) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada sebagai suatu proses di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota (Kristiyanto 2017). Penyelenggaraan Pilkada diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa kepada daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkada termasuk dalam rezim pemilihan umum setelah disahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya, pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 mengubah Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Maulita et al., 2016).

b) Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Indonesia yang memiliki latar belakang agama islam dan menganut paham islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*. Nahdlatul Ulama (NU) dikenal sebagai satu-satunya ormas islam di Indonesia yang secara konsisten mempertahankan dan mengusung nilai-nilai kultural tradisional, yang juga dikenal sebagai islam tradisional (Muzakki & Fauzi, 2022). Meskipun berbeda pandangan dengan organisasi sosial keagamaan lain, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mempertahankan prinsip persaudaraan dan toleransi sebagai dasar keberadaannya (Febrina, Mustika, and Dedees 2016). Nahdlatul Ulama juga berperan aktif dalam bidang sosial, pendidikan, dan politik. Dalam konteks politik, NU memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia dan seringkali dianggap sebagai kekuatan politik yang kuat dalam pemilihan umum.

c) Sikap Politik

Sikap politik didefinisikan sebagai kecenderungan individu yang kemudian dapat menjadi perilaku kolektif dalam sebuah sistem politik. Sikap politik adalah hasil dari keyakinan individu yang memotivasi mereka untuk merespons objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap politik dapat dipengaruhi oleh peristiwa historis, pengalaman politik, janji politik, dan faktor-faktor lainnya. Sikap politik merupakan dasar dari perilaku politik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sikap politik dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada berbagai faktor seperti ideologi, organisasi, dan budaya yang mempengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat (Anggoro, 2023).

d) Politik dalam Islam

Politik dalam islam adalah menciptakan sebuah tata pemerintahan dan negara yang didasarkan pada pelaksanaan aturan syariat islam. Politik dalam islam merujuk pada cara umat islam

membangun dan mempertahankan sistem sosial dan politik yang berdasarkan pada ajaran agama islam dan prinsip-prinsip syariat. Ini mencakup tindakan dan kegiatan politik yang bertujuan memperoleh, mempertahankan, dan mempengaruhi kebijakan publik supaya tata kelola negara sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam. Prinsip-prinsip islam meliputi terwujudnya kesatuan dan persatuan melalui musyawarah, menjalankan amanah dengan bertanggung jawab dan menetapkan hukum secara adil, serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Zawawi 2015).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sumber informasi yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan. Data penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah jenis sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi atau lapangan yang menjadi objek penelitian. Data ini merupakan informasi pokok yang harus diambil dari sumber asli dan biasanya diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan subjek atau obyek yang sedang diteliti. Data ini dianggap sebagai sumber informasi utama dalam sebuah penelitian. Data primer ini belum pernah diproses sebelumnya dan bersifat asli, sehingga sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh jawaban atau informasi yang akurat dan valid (Rahmadi, 2011). Adapun dalam pengumpulan data ini peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan para PCNU Ponorogo terkait bagaimana peran dan sikap politik pengurus PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, serta tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin.

b) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari literatur atau sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Ini termasuk dalam kategori sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui pengamatan atau wawancara,

tetapi berasal dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Data sekunder sering digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer dalam sebuah penelitian (Rahmadi, 2011). Informasi ini bisa diperoleh dari buku-buku, dokumen ataupun data-data yang lain yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi peneliti. Informasi ini nantinya digunakan untuk menunjang data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau proses yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Menurut Hamzah dalam (Pahleviannur et al. 2022), pengumpulan data kualitatif adalah pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak terkait dengan pengukuran kuantitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian yaitu sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Wawancara dilakukan melalui dialog tanya jawab, dimana seorang peneliti menanyakan pertanyaan kepada responden atau narasumber untuk memperoleh informasi atau pendapat mereka mengenai suatu topik atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*deep interview*), di mana peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan informan yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah penelitian (Pahleviannur et al. 2022). Wawancara ini akan dilakukan dengan pengurus PCNU Ponorogo. Wawancara ditujukan untuk menggali informasi bagaimana peran dan sikap politik PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, serta tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Daftar Informan dalam wawancara ini sebagai berikut :

- Drs. H. Fachul Aziz, M.A. selaku ketua PCNU Ponorogo
- H. Sugeng Hariono, S.T. selaku wakil ketua PCNU Ponorogo
- Muhammad Ilham selaku ketua GP Ansor Ponorogo
- K. H. Moh. Sholihan selaku Rais Syuriah
- K.H. Muchtar Sunarto selaku wakil Rais Syuriah
- Zaenal Arifin selaku ketua MWCNU Kecamatan Slahung
- Suprawiti selaku ketua MWCNU Kecamatan Balong
- Rino selaku pengurus ranting NU Desa Karangpatihan
- Bahar Harahap selaku masyarakat NU
- Anik Nur H. selaku masyarakat NU

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi penelitian sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang telah tercatat atau terdokumentasi mengenai suatu topik atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara efisien dan dapat diulang oleh orang lain. Namun, peneliti perlu selektif dalam memilih sumber dokumentasi yang relevan dan terpercaya untuk memastikan validasi dan keabsahan data yang dikumpulkan (Pahleviannur et al., 2022). Metode ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau sebagai pembandingan, atau penjelas data-data yang diperoleh dari wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang sistematis untuk mengorganisir dan mengelompokkan catatan lapangan yang terkumpul dari sumber-sumber seperti wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya agar memungkinkan peneliti untuk menyusun laporan temuan mereka. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dianggap sebagai analisis deskriptif yang

dimulai dengan mengelompokkan data yang serupa, dan kemudian ditafsirkan untuk memberikan makna pada setiap aspek dan berhubungan. Setiap aspek kemudian dianalisis atau diinterpretasikan untuk memahami pentingnya hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya yang menjadi fokus penelitian (Mahardhani, 2022).

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman. Model ini melibatkan analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan terkumpul secara lengkap. Menurut Miles dan Huberman dikutip dalam (Pahleviannur et al. 2022), model ini terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta *verifikasi (conclusion drawing / verification)*.

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi dan fakta dari berbagai sumber untuk digunakan dalam penelitian atau analisis lebih lanjut. Metode pengumpulan data dapat melibatkan teknik seperti wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis yang ditetapkan (Pahleviannur et al., 2022). Penelitian ini mencatat hasil wawancara dan dokumen sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian tersebut.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dalam penelitian di mana data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disaring untuk membuang informasi yang tidak relevan dan memfokuskan data pada topik penelitian yang sedang diteliti. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjaga fokus penelitian dan membuat data lebih mudah diolah (Pahleviannur et al., 2022). Dengan kata lain, reduksi data adalah upaya terus-menerus untuk menyederhanakan dan memproses data sehingga dapat digunakan dengan lebih efektif dalam penelitian.

Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilih dan memilah data, abstraksi dan transformasi data-data yang muncul di lapangan terkait dengan sikap politik pengurus PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, serta tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik pengurus PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Proses reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan penggolongan data, mempertajam fokus penelitian, menghapus data yang tidak relevan, dan mengorganisasi data agar siap untuk tahap analisis berikutnya.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan informasi atau data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan dari penyajian data untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif dan menyajikan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam melakukan penyajian data penelitian, penting untuk memperhatikan bahwa penyajian data harus didasarkan pada analisis data yang valid dan objektif, serta harus memperhatikan konteks dan tujuan penelitian. Penyajian data harus dilakukan dengan cara yang profesional, jelas, dan mudah dipahami agar pembaca dapat memahami temuan penelitian secara baik dan akurat. Setelah tahap reduksi data selesai, hasil penelitian disajikan dalam berbagai format seperti, uraian, tabel, grafik, dan diagram, untuk memudahkan pembaca dalam memahami temuan penelitian (Pahleviannur et al., 2022). Penyajian data ini merupakan bagian dari bab pembahasan, dimana data-data yang dianggap relevan dimasukkan ke dalam bab tersebut.

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari penelitian di mana peneliti mengambil kesimpulan dari temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti dan data yang valid dan objektif, serta harus

menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Verifikasi penelitian adalah proses memastikan kebenaran atau validasi temuan penelitian. Dalam rangka melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi penelitian, peneliti harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian valid dan objektif, metode yang digunakan sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti yang kuat. Hal ini penting untuk menjamin kualitas dan kepercayaan hasil penelitian (Pahleviannur et al., 2022).

Analisis data yang digunakan peneliti ini nanti akan lebih fokus pada wawancara dengan informan tentang bagaimana peran dan sikap politik PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, serta tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Penelitian ini menggabungkan data dan dokumen yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan pemilihan umum. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori politik yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori budaya politik. Data-data yang dikumpulkan dari lapangan digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi teori-teori ini. Hasil analisis data ini diharapkan akan memperkuat penelitian ini dari segi akademik dan empiris, serta menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan struktur yang jelas dan terorganisir dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi tulisan dan mengikuti alur pikiran penulis. Dengan menggunakan sistematika penulisan yang tepat, tulisan dapat terlihat lebih profesional dan mudah dipahami. Sistematika penulisan juga membantu penulis untuk mengorganisir informasi secara sistematis dan memastikan bahwa semua elemen penting telah tercakup dalam tulisan. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan memahami kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan. Untuk itu, dalam penelitian ini disusun menjadi enam bab.

Pada bab satu yaitu pendahuluan, dimana dalam bab satu ini nanti akan menjelaskan mengenai latar belakang yang merupakan alasan dilakukan kajian dari objek penelitian tersebut. Dari latar belakang tersebut kemudian menciptakan beberapa rumusan masalah yang juga dipaparkan tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan konsep dari penelitian yang akan dikaji dan disusun secara sistematis.

Pada bab dua yaitu landasan teori, dimana dalam dua ini akan memaparkan uraian teoritis secara umum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan teori umum yang digunakan peneliti untuk mengkaji objek penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku pemilih, elite, dan budaya politik sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian dengan teori tersebut.

Pada bab tiga yaitu gambaran lokasi dan objek penelitian, dimana dalam bab tiga ini akan menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian Kabupaten Ponorogo, bagaimana keadaan histori dari Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai profil Nahdlatul Ulama Ponorogo.

Pada bab empat yaitu hasil pembahasan rumusan masalah yang pertama tentang sikap politik PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Didalam bab ini akan menjawab rumusan pertama memaparkan bagaimana sikap politik PCNU Ponorogo Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorog. Dengan bab ada tiga pembahasan yaitu, *pertama*, membahas tentang netralitas politik Nahdlatul Ulama (NU) pada Pilkada tahun 2020 dikabupaten Ponorogo; *kedua*, perpebedaan preferensi politik pengurus PCNU Ponorogo, dan ketiga, menjelaskan pengurus PCNU Ponorogo sebagai elite non-politik atau elite yang tidak memerintah karena berada di luar pemerintahan, tetapi memiliki peran strategis dalam organisasi NU.

Pada bab lima yaitu hasil pembahasan rumusan masalah yang kedua tentang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengurus PCNU Ponorogo dalam menentukan sikap dan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Didalam bab ini akan menjawab rumusan kedua memaparkan pengurus PCNU Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional dalam menentukan sikap dan pilihan politik mereka. Pendekatan ini mencerminkan keragaman faktor yang memengaruhi perilaku pemilih dan kompleksitas dalam proses politik

Pada bab enam yaitu penutup, dimana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan hasil penelitian yang mencakup segala hasil penelitian baik

secara teoritis maupun empiris. Sedangkan saran atau rekomendasi meliputi masukan atau pandangan peneliti untuk penelitian topik sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Budaya Politik

Penggunaan istilah "budaya politik" dalam studi ilmu politik mulai menjadi populer, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II dan munculnya aliran perilaku politik (*behavioralism*). Dalam studi ilmu politik, banyak ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang konsep budaya politik. Terutama, dalam literatur politik, terutama dalam pendekatan perilaku politik, istilah "budaya politik" digunakan untuk menjelaskan fenomena politik yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Pendekatan budaya politik dalam pengkajian ilmu politik bertujuan untuk lebih mendalam memahami perilaku politik individu atau kelompok. Dengan pendekatan ini, kita berusaha untuk menggali dan memahami faktor-faktor budaya, seperti nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan tradisi politik, yang memengaruhi cara orang atau kelompok tertentu berperilaku dalam konteks politik (Nur Alamsyah, 2010).

Banyak ahli berpendapat bahwa kemajuan suatu negara dapat diukur melalui sikap dan budaya politik dari warganya. Jika warga negara terbiasa berperilaku secara demokratis, kritis, dan partisipatif, maka ini dianggap sebagai indikator bahwa negara tersebut memiliki ciri-ciri demokratis. Perilaku demokratis ini mencerminkan budaya politik nasional atau karakter politik suatu negara. Dengan kata lain, untuk dianggap sebagai negara demokratis masyarakatnya harus memiliki budaya politik yang mendukung demokrasi, di mana warga negara aktif dalam proses politik, memiliki keterlibatan yang tinggi, dan bersikap kritis terhadap pemerintah. Budaya politik yang kuat ini dianggap sebagai faktor penting dalam memajukan stabilitas negara dan kemajuan secara keseluruhan (Lestari, 2017).

Budaya politik merujuk pada pengetahuan, sikap emosional, dan penilaian etika moral yang berkaitan dengan isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki budaya politiknya sendiri yang mencerminkan pandangan mereka tentang proses politik yang terjadi di dalamnya. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengukur perkembangan budaya politik. Budaya politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat yang memiliki ciri-ciri khasnya sendiri. Istilah budaya politik mencakup berbagai aspek, seperti legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses

pembuatan kebijakan pemerintah, aktivitas partai politik, perilaku aparat negara, serta respons masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian, budaya politik memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan politik dan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan alokasi sumber daya masyarakat secara nasional (Suryo, 2015).

Budaya politik mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk administrasi negara, kebijakan pemerintahan, sistem hukum, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang diinternalisasi oleh sejumlah anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka (Hasriani et al., 2015). Sedangkan budaya politik menurut (Almond & Verba, 1990), dalam bukunya berjudul "*Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*" yaitu budaya politik merujuk pada orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang dimiliki oleh individu. Ini yang tercermin dalam sikap dan perilaku politik. Pengertian budaya politik juga mengacu pada bagaimana warga negara memiliki pandangan khas terhadap sistem politik suatu negara dan berbagai komponennya, serta peran yang dimainkan oleh warga negara dalam sistem tersebut. Budaya politik dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya berdasarkan pengaruh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan konteks sosial. Budaya politik mencakup keyakinan, sikap, nilai-nilai, ide, perasaan, dan evaluasi individu-individu dalam masyarakat terhadap sistem politik negara dan peran yang mereka anggap penting dalam sistem tersebut.

Budaya politik adalah cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap akan peranan warga bangsa dalam sistem politik itu. Sehingga dengan demikian maka dia menjadi orientasi psikologis terhadap objek sosial pada sistem politik sebuah komunitas, dan melalui proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif (pemahaman atau pengetahuan dan keyakinan), afektif (ikatan emosional atau perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang objek politik), dan evaluasi atau opini tentang objek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap objek politik dan kejadian-kejadian. Budaya politik juga merupakan rangkaian kepercayaan, kebiasaan dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan politik. Budaya politik pada hakikatnya merupakan lingkungan psikologis dimana kegiatan-kegiatan politik berlangsung dan memberikan rasionalitas untuk dapat memberikan penolakan atau penerimaan sejumlah nilai dan norma yang lain (Hasriani et al., 2015).

Menurut (Almond & Verba, 1990), dalam bukunya berjudul "*Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*", mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada :

1. Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran dan segala kewajibannya. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
2. Orientasi afektif merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
3. Orientasi evaluatif merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Dari ketiga tersebut di atas, terdapat struktur dan kinerja mempengaruhi sikap. Sehingga, budaya politik mempengaruhi struktur dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, ketiga orientasi tersebut menunjukkan bahwa budaya politik cukup lentur dan dapat berubah secara dramatis sebagai respon terhadap kinerja razim, pengalaman sejarah dan sosialisasi politik.

Disamping itu, menurut (Almond & Verba, 1990), dalam bukunya berjudul "*Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*", mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik yaitu sebagai berikut: *Pertama*, tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya. *Kedua*, pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan. *Ketiga*, penguatan kebijakan. *Keempat*, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negeri.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, tipe-tipe budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pertama, budaya politik parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali tetapi keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang

bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kiai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius. Ciri-ciri dari budaya politik parokial yaitu sebagai berikut :

- a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
- b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat
- c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisialkan oleh sistem politik.
- d) Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
- e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
- f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
- g) Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi dan keagamaan.
- h) Partisipan masyarakat sangat tergantung pada pemimpinnya.

Kedua, budaya politik kaula, yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek out put atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subjek sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri dari budaya politik kaula yaitu sebagai berikut :

- a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek out put dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap

objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.

- b) Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah.
- c) Hubungan terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- d) Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan.
- e) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif .
- f) Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
- g) Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.

Ketiga, budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan, juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak (Nur Alamsyah, 2010).

Budaya politik partisipan merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik dalam berdemokrasi. Hal ini dikarenakan terjadi harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antar warga negara dan memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Masyarakat memiliki keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk menyampaikan kritik, mengorganisasikan diri dalam proses sebagai kontrol bila terdapat praktik-praktik pemerintah yang tidak memihak rakyat (Nur Alamsyah, 2010). Ciri-ciri dari budaya politik partisipan yaitu sebagai berikut :

- a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek-objek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- b) Bentuk kultur di mana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik).
- c) Anggota masyarakat partisipatif terhadap objek politik.
- d) Masyarakat berperan sebagai aktivis.
- e) Masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai penentu budaya politik.
- f) Masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.

Dari ketiga tipe budaya politik, menurut Almond tidak ada satu negara yang memiliki budaya murni parokial, kaula, dan partisipan. Menurut (Almond & Verba, 1990), dalam bukunya berjudul *“Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara”*, menyimpulkan bahwa budaya politik warga negara adalah budaya politik campuran yang didalamnya budaya individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambil peranan sebagai subjek yang pasif. budaya politik campuran ini menurut Almond dan Verba terdiri dari tiga bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Budaya politik subjek-parokial, yaitu budaya politik ini sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan masyarakat kesukuan atau feodal, dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.
2. Budaya politik subjek-partisipan, yaitu budaya politik ini sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebab seorang aktifis. Sementara sebagian penduduk lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah yang otoriter dan secara relatif memiliki serangkaian otoritas pribadi yang pasif.
3. Budaya politik parokial-partisipan, yaitu budaya politik ini berlaku di negara-negara berkembang yang pada umumnya masyarakat lebih berbudaya politik

parokial, akan tetapi norma-norma dalam struktur pemerintahan yang diperkenalkan kepada masyarakat biasanya bersifat partisipan.

Tipe-tipe budaya politik diatas merupakan suatu sub-sistem dari kebudayaan yang berlaku universal. Sehingga tidak bisa terlepas dari pengaruh kebudayaan universal tersebut. Dengan kata lain, budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang khas.

Dalam penelitian ini, pendekatan budaya politik dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami dan menganalisis sikap politik pengurus PCNU Ponorogo dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Ponorogo. Dalam analisis ini, pendekatan budaya politik membantu mengidentifikasi bagaimana pandangan, nilai-nilai, norma sosial, dan keyakinan yang dianut oleh pengurus PCNU Ponorogo mempengaruhi perilaku politik individu dalam mengambil keputusan dan tindakan mereka dalam proses pemilihan.

BAB III

GAMBARAN LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Kabupaten Ponorogo

Pada tanggal 11 Agustus 1946 Masehi, Kadipaten Ponorogo didirikan dan kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Penetapan tanggal tersebut dilakukan melalui kajian mendalam yang berbasis pada bukti-bukti peninggalan benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Selain itu, acuan yang digunakan untuk penetapan tanggal tersebut adalah buku *Handbook of Orientasi History*. Dalam kajian tersebut, ditemukan bahwa Bathoro Katong adalah pendiri dan diangkat sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathoro Katong kemudian memimpin Kadipaten Ponorogo yang berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo (<https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>).

Asal usul nama Ponorogo menurut buku Babad Ponorogo Poerwowidjojo (1997). Diceritakan bahwa nama Ponorogo berasal dari kesepakatan dalam pertemuan antara Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo di hari Jum'at saat bulan purnama. Pertemuan tersebut dilaksanakan di sebuah lapangan yang berada di dekat sebuah gumuk yang saat ini merupakan wilayah katongan. Mereka sepakat untuk memberi nama kota yang akan didirikan dengan nama "Pramana Raga". Namun, dengan seiring berjalannya waktu nama tersebut berubah menjadi Ponorogo (<https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>).

Kata "Pramana Raga" terdiri dari dua kata, yaitu "Pramana" dapat diartikan sebagai daya kekuatan atau rahasia hidup, sedangkan "Raga" berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa dibalik tubuh manusia terdapat sebuah rahasia kehidupan yang terkait dengan pengendalian emosi seperti amarah, aluwamah, shifiah, dan muthmainah. Seseorang yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya dengan baik akan mampu menyesuaikan diri di manapun dan kapanpun ia berada, sehingga mampu mencapai keberhasilan dalam kehidupan (<https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>).

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan jarak sekitar 200 Km dari Ibu Kota Provinsi dan sekitar 800 Km dari Ibu Kota Negara. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Ponorogo terletak di antara $111^{\circ} 07'$ - $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ - $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sekitar 1.371,78 Km², dengan ketinggian bervariasi mulai 82 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua area, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi terdiri dari beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, Ngebel, sementara 17 kecamatan lainnya adalah dataran rendah. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).

Gambar 1.
Peta Kabupaten Ponorogo



Luas Wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	RW	RT
1	Siman	37,95	18	45	95	289
2	Ponorogo	22,31	19	44	119	405
3	Babadan	43,93	15	56	123	480
4	Bungkal	54,01	19	63	129	340
5	Jenangan	59,44	17	60	120	402
6	Sambit	59,83	16	46	93	302
7	Sawo	124,71	14	54	160	490
8	Mlarak	37,20	15	49	104	267
9	Jetis	22,41	14	41	81	216
10	Sokoo	55,33	6	27	106	257
11	Pudak	48,92	6	19	31	79
12	Pulung	127,55	18	67	165	465
13	Ngebel	59,50	8	31	67	165
14	Kauman	36,61	16	54	113	303
15	Jambon	57,48	13	44	76	278
16	Badegan	52,35	10	34	45	229
17	Sampung	80,61	12	44	88	320
18	Sukorejo	59,58	18	58	139	388
19	Ngrayun	148,76	11	40	145	439
20	Slahung	90,34	22	61	154	413
21	Balong	56,96	20	65	121	342
	Jumlah	1.371.780	307	1.002	2.274	6869

(Sumber Data : RPJMD Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021)

Pembagian administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri 21 kecamatan yang terbagi menjadi 307 desa atau kelurahan, 1.002 dusun, 2.274 RW, dan 6.869 RT. Kecamatan Ngrayun memiliki wilayah terluas dengan luas 148,76 Km, sedangkan Kecamatan Ponorogo memiliki wilayah terkecil dengan luas 22,31 Km. Kecamatan Balong memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu 65 dusun, sedangkan Kecamatan Pudak memiliki jumlah desa paling sedikit dengan 6 desa dan jumlah dusun yang paling sedikit.

3. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018-2021 mencapai 969.456 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 483.174 jiwa dan perempuan sebanyak 486.282 jiwa. Sedangkan pembagian umum penduduk berdasarkan kelompok umur, yaitu dari usia 0-4 tahun sebanyak 50.192 jiwa, usia 5-14 tahun sebanyak 123.504 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 674.530 jiwa, dan di atas 65 tahun sebanyak 121.230 jiwa. Dengan adanya data demografi tersebut dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo

Kelompok Umur (Group)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	25,769	24,423	50,192
05-Sep	30,79	28,839	59,629
Okt-14	32,998	30,877	63,875
15-19	32,235	29,969	62,204
20-24	33,652	32,136	65,788
25-29	33,757	31,221	64,978
30-34	32,949	31,632	64,581
35-39	38,577	39,039	77,616
40-44	35,114	35,993	71,107
45-49	36,122	37,349	73,471
50-54	35,2	37,125	72,325
55-59	31,679	33,782	65,461
60-64	27,873	29,126	56,999
65-69	20,503	20,702	41,205
70-74	16,456	17,122	33,578
75+	19,5	26,947	46,447

(Sumber Data : BPS Kabupaten Ponorogo)

Kemudian untuk jumlah penduduk dari masyarakat Kabupaten Ponorogoberdasarkan migrasi, yang mana penduduk dalam kondisi yang datang serta penduduk yang kondisinya pergi dari wilayah Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2021 dengan jumlah di awal tahun adalah 977.781 dengan kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan jumlah penduduk yang berdatangan berjumlah 14.709 jumlah dengan kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlah penduduk yang berpergian berjumlah 14.807 jumlah dengan kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan data tersebut, sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah migrasi datang dan pergi serta kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2021 adalah 969.456 jumlah dengan penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Data agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dilakukan oleh Pusat Badan Statistika. Berdasarkan data tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo menganut agama islam dengan jumlah 839.127 jiwa atau sekitar 98,11% dari total penduduk. Selain itu, terdapat pula penganut agama kristen 2.864 (0,33%) jiwa, Katolik 2.268 (0,27%) jiwa, Budha 261 (0,03%) jiwa, Hindhu 82 (0,01%) jiwa, Konghucu 14 (0,002%) jiwa, agama lainnya 25 (0,003%) jiwa, serta penduduk yang tidak menjawab atau tidak dintanyakan mengenai agama sebanyak 10.640 (1,24%) jiwa.

4. Kondisi Topografi

Kondisi topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan ketinggian di antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah Kabupaten Ponorogo terletak di antara ketinggian 100 meter sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki curah hujan rata-rata sekitar 2.250 mm per tahun dan mengalami iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musin penghujan. Suhu udara di wilayah ini berkisar anatar 18° sampai dengan 31° Celcius.

Kabupaten Ponorogo adalah wilayah agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi untuk mengembangkan hasil tanaman bernilai ekonomi yang tinggi. Selain iti, wilayah tersebut juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisataKa dengan menampilkan keunikan dan kualitas yang unggul agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam menarik perhatian wisatawan.

Berikut merupakan keadaan dari curah hujan yang dikelompokkan menurut bulan di Kabupaten Ponorogo 2020 berdasarkan Pusat Badan Statistika Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.

Tabel 3.
Keadaan Curah Hujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Bulan	Keadaan Curah Hujan Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Ponorogo			
	Rata-rata Hari Hujan per Bulan (hari)	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm)	Curah Hujan Terkecil (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)

	2020	2020	2020	2020
Januari	16	16	1	114
Februari	21	21	1	107
Maret	19	17	1	108
April	10	14	0	78
Mei	10	18	1	113
Juni	3	11	1	57
Juli	2	6	1	25
Agustus	1	12	2	37
September	1	9	1	70
Oktober	9	12	1	102
November	13	22	1	142
Desember	18	16	0	114

(Sumber Data : BPS Kabupaten Ponorogo)

Dari penjelasan tabel diatas, bahwa keadaan cuaca di daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai curah hujan perhari yang tinggi pada awal bulan tahun 2020, yaitu pada bulan Februari. Kemudian mempunyai curah hujan perbulan yang tinggi pada akhir bulan 2020, yaitu pada bulan November. Pada tahun 2020 mempunyai curah hujan yang kecil pada bulan agustus, dan mempunyai curah hujan yang tinggi pada tahun 2020 yaitu pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember.

5. Kondisi Sosial

Masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo umumnya merupakan suku yang homogen dimana sebagian besar adalah berasal dari suku Jawa. Kabupaten Ponorogo memiliki ciri khas budaya yaitu kesenian reog sebagai salah satu aspek yang dapat memperkuat identitas daerah. Perkembangan nilai-nilai budaya yang bersifat religius merwarnai kehidupan masyarakat sebagai kekayaan budaya yang perlu mendapatkan tempat tersendiri sehingga menanamkan nilai moral yang mendukung pembangunan daerah.

Kabupaten Ponorogo mempunyai kepadatan yang mencapai 969.456 jiwa, serta untuk jumlah 483.174 dengan kelamin laki-laki dan 486.282 dengan kelamin perempuan. Mayoritas banyak masyarakat Kabupaten Ponorogo dari masyarakat yang miskin posisinya tinggal di pedesaan dan bermata pencarian sebagai petani. Berikut tabel mengenai kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 4.
Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021

Kemiskinan	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo
-------------------	---

	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	313.175,00	326.205,00	341.090,00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,7	1,44	1,08
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,4	0,31	0,18
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	83,97	86,74	89,94
Persentase Penduduk Miskin	9,64	9,95	10,26

(Sumber Data : BPS Kabupaten Ponorogo)

Penjelasan dari tabel di atas bahwa permasalahan sosial yang dihadapi Kabupaten Ponorogo yaitu tidak terlepas dari perihal kemiskinan. Kemiskinan sendiri sudah menjadi sebuah permasalahan dimana pun tempatnya, seperti halnya yang dialami oleh Kabupaten Ponorogo. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh berada faktor didalamnya dan menjadi sebab dari ketidak mampuannya dalam melaksanakan kegiatan usaha di aspek perekonomian.

Data mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2021. Data tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Maret tahun 2021, terdapat sekitar 89,99 ribu jiwa penduduk yang berada dalam kondisi miskin atau memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini meningkat sebesar 3,21 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret tahun 2020. Selain itu, presentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Ponorogo juga mengalami peningkatan dari 9,95% pada tahun 2020 menjadi 10,26% pada tahun 2021. Garis kemiskinan di wilayah Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret tahun 2021 adalah sebesar Rp. 341.090,00 ribu per kapita per bulan, meningkat sebesar 4,56% dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret tahun 2020.

6. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Ponorogo mulai membaik setelah sempat terpuruk karena pandemi covid 19 mulai muncul di Indonesia pada tahun 2020. Satu tahun pertumbuhan ekonomi Ponorogo sempat minus (-0,90) di tahun 2020, tahun 2021 sudah separo dari rata-rata selama sepuluh tahun terakhir. Sesuai data BPS Perekonomian Kabupaten Ponorogo berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 tersebut mencapai Rp. 21,35 triliun berdasarkan harga yang berlaku, atau sebesar Rp. 14,62 triliun berdasarkan harga konstan pada tahun 2010.

Perekonomian Kabupaten Ponorogo juga tumbuh sebesar 3,19% pada tahun 2021. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 berada pada angka Rp. 23,03 triliun. Naik senilai Rp. 1,68 triliun dari tahun 2021 yang sebesar Rp. 21,35 triliun.

Tabel 5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo
menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	PDRB Seri Tahun 2010 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,51	1,84	-3,94
B. Pertambangan dan penggalian	-5,90	1,30	5,08
A. Industri Pengolahan	1,39	6,67	11,05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-1,07	3,45	7,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	3,73	7,23	2,13
F. Konstruksi	-6,96	1,35	6,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,90	4,86	6,06
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,77	11,09	18,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,99	2,51	7,46
J. Informasi dan Komunikasi	7,22	6,41	4,34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,32	0,19	2,28
L. Real Estate	1,65	1,98	3,40
M, N. Jasa Perusahaan	-7,15	2,08	5,62
O. Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,76	-0,63	0,33
P. Jasa Pendidikan	2,73	1,04	0,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,43	5,84	2,54
R, S, T, U. Jasa Lainnya	-15,31	4,38	13,03
Produk Domestik Regional Bruto	-0,90	3,19	3,24
PDRB Tanpa Migas	-0,90	3,19	3,24

(Sumber Data : BPS Kabupaten Ponorogo)

Dari sisi produksi, terdapat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 2,51% dan yang paling rendah pada tahun 2020 sebesar -3,94%. Pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 5,08% dan paling rendah tahun 2020 sebesar -5,90%. Industri pengelolaan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 11,05% dan yang paling rendah pada tahun 2020 sebesar 1,39%. Pengadaan listrik dan gas mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 7,19% dan paling rendah tahun 2020

sebesar -1,07%. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 7,23% dan paling rendah tahun 2022 sebesar 2,13%. Transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 18,30% dan paling rendah tahun 2020 sebesar -5,77%. Informasi dan komunikasi mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 7,22% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,38%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 8,43% dan pada tahun 2022 hanya sebesar 2,54%.

7. Seni Budaya

Kesenian daerah yang terkenal di Ponorogo, yaitu seni Reog. Seni reog terdiri dari dua bagian, yaitu tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian pembukaan dibawakan oleh pria dengan pakaian serba hitam dan wajah yang dihiasi dengan warna merah. Sedangkan tarian inti tergantung pada kondisi acara yang diselenggarakan. Jika di acara pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah percintaan. Jika di acara hajatan khitanan, adegan yang ditampilkan adalah kisah pendekar. Adegan terakhir dalam tarian reog adalah singo barong yang dimaninkan oleh pelaku dengan topeng berbentuk kepala singa dan mahkota dari bulu burung merak. Meskipun ada skenario yang telah disusun, dalam praktiknya adegan dalam tarian reog tidak selalu mengikuti skenario yang telah ditentukan. Selalu ada interaksi antara pemain dan dalang, yang merupakan pemimpin rombongan, sera dengan penonton. Terkadang, seorang pemain yang kelelahan dapat diukar dengan pemain lainnya.

Selain seni reog, kesenian lain yang ada di Ponorogo adalah gajah-gajahan yang menyerupai hadroh atau samproh klasik, namun memiliki perbedaan dengan adanya patung gajah. Meski tidak memiliki pekam yang tetap, kesenian ini mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dalam hal alat musik, gerak tari, lagu, dan wujud musiknya. Budaya dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo di pengaruhi oleh masyarakat Jawa Tengah, dan di antaranya terdapat kegiatan seperti Larung Risalah Do'a, Grebeng Suro, dan Kirab Pusaka. Ada dua adat istiadat khas masyarakat Ponorogo, yaitu becekan yang merupakan suatu aktivitas memberikan bahan makanan atau khitanan, serta sejarah yang melibatkan silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada hari raya idul fitri dengan cara mendatangi rumah orang yang lebih tua.

8. Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo

8.1 Visi Kabupaten Ponorogo

Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Amanah, dan Taqwa)

8.2 Misi Kabuapten Ponorogo

- a) Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
- b) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
- c) Mewujudkan pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- d) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif.

B. Dinamika Politik di Kabupaten Ponorogo

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 270 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang melakukan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada). Namun, situasi dan kondisi pada saat itu sedang sulit karena sedang mengalami pandemi virus Corona (Covid-19). Oleh karena itu, keputusan untuk melaksanakan Pilkada di tengah kondisi sulit tersebut bukanlah hal yang mudah. Selain itu, melaksanakan Pilkada juga membutuhkan biaya yang besar. Meskipun begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan keputusan bahwa Pilkada akan dihelat pada pertengahan bulan Juli melalui Perpu No. 02 tahun 2020 tentang Pilkada. Dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Hilman et al., 2020).

Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo 2020, sebagai salah satu proses demokrasi, dimana mempertemukan kembali calon bupati Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlissoni. Kedua kadidat yang bersaing untuk memperebutkan posisi Bupati yaitu petahana Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono dan kandidat penantang Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Hasil Pilkada menunjukkan bahwa kadidat penantang, Sugiri Sancoko berhasil memenangkan posisi Bupati Ponorogo untuk periode 2021-2024 dengan meraih 352.047 suara atau 61,75%. Pasangan calon nomor 1, yakni Sugiri Sancoko-Lisdyarita, didukung oleh PDIP, PAN, PPP, dan Partai Hanura dengan total sembilan kursi di

DPRD Ponorogo. Sementara itu, pasangan calon petahana nomor 2, Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono, hanya memperoleh dukungan sebesar 218.073 suara atau 38,35%, dengan didukung oleh Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, dan PKS dengan total 36 kursi di lembaga legislatif (Mahardika, 2021). Pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita berhasil menguasai 20 kecamatan di Kota Reog. Sedangkan petahana hanya menang di Kecamatan Ngebel. Berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 6.
Rincian Hasil Suara Per Kecamatan

No	Kecamatan	Hasil Suara		Jumlah
		No. 1	No. 2	
1	Ngebel	5.826	7.332	13.158
2	Ngrayun	19.975	18.401	38.376
3	Sawoo	23.421	14.422	37.843
4	Sukorejo	21.877	12.957	34.834
5	Sampung	17.479	7.414	24.893
6	Pudak	3.714	2.546	6.260
7	Jetis	12.869	6.189	19.058
8	Badegan	12.624	7.473	20.097
9	Sooko	7.564	7.489	15.053
10	Babadan	26.059	14.243	40.302
11	Ponorogo	22.061	18.215	40.276
12	Sambit	15.409	8.864	24.273
13	Slahung	22.776	9.880	32.656
14	Jenangan	19.949	15.191	35.140
15	Bungkal	15.480	8.613	24.093
16	Jambon	18.134	9.175	27.309
17	Balong	20.047	9.354	29.401
18	Siman	17.139	9.961	27.100
19	Pulung	17.272	13.898	31.170
20	Kauman	19.393	8.965	28.358
21	Mlarak	12.979	7.491	20.470
Jumlah		352.047	218.073	570.120
		Selisih = 133.974 suara		

(Sumber Data : KPU Kabupaten Ponorogo)

Pada tahun 2020, Sugiri Sancoko berhasil menjadi Bupati Ponorogo setelah memenangkan pemilihan dengan menawarkan “Perubahan” untuk Kabupaten Ponorogo. Dia berhasil meraih hati masyarakat dengan strategi matang dan slogan “Ponorogo Hebat”. Sebelumnya, Sugiri Sancoko pernah maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Ponorogo pada tahun 2015, namun kalah dalam perolehan suara. Namun, pada tahun 2020 ia berhasil meraih kemenangan dan menggantikan Bupati sebelumnya yaitu Ipong Muchlissoni. Fakta menarik dari Pilkada Ponorogo adalah bahwa dari tahun 2005 hingga 2020, Bupati Ponorogo selalu berganti dalam lima tahun sekali. Hal ini dibuktikan sebagai berikut :

Tabel 7.
Pilkada Langsung Tahun 2005-2020

Tahun	Calon Kandidat	Diusung Partai	Pemenang
2005	1. Pasangan Supriyanto-Handoko Sudrisman	PDI-P	Pasangan Muhadi Suyono dan Amin
	2. Muhayadi Suyono-Amin	PKB	
	3. Yuli Nursanto-Achmad Soernarno	Partai Demokrat dan PPP	
	4. Asmuni-Soesilo Hadi Soeprapto	Partai Golkar	
	5. Moch. Supadjar-Muryanto	PNI Marhaenisme, PBSB, PBB, Partai Merdeka, PPK, PPIB, PNBK, PKPI, PPDI, PPNUI, PKPB, PKS, PBR, PDS, Partai Patriot Pancasila, PSI, PPD, partai Pelapor	
2010	1. Muhadi Suyono-Yusuf Pribadi (Hayu)	PKB, PDI-P, PKS	Pasangan Amin dan Yuni (Ada)
	2. Amin-Yuni Widyaningsih (Ada)	Partai Golkar	
	3. Suprianto-Nyamut Suseno (Primus)	Partai Demokrat dan PKB	
2015	1. Sugiri Sancoko-Sukirno	Partai Golkar, Demokrat, PKS, Hanura	Pasangan Ipong Muchlissoni dan Soedjarno
	2. Amin-Agus Widodo	PKB, PDI-P	
	3. Misranto-Isnen Supriyono	Jalur Independen	
	4. Ipong Muchlissoni-Soedjarno	Partai Gerindra, PAN, Nasdem	
2020	1. Sugiri Sancoko-Lisdjarita	PDIP, PAN, PPP, Hanura	Pasangan Sugiri Sancoko dan Lisdjarita
	2. Ipong Muchlissoni-Bambang Tri	Partai Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PKS	

(Sumber Data : Website news.detik.co)

Tabel presentasi partisipasi pemilih pada Pilkada di Kabupaten Ponorogo, maka tabel tersebut akan memberikan informasi mengenai jumlah pemilih yang ikut serta dalam Pilkada pada setiap tahunnya dan presentase partisipasi pemilih terhadap jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar minat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah, serta apakah terdapat peningkatan atau penurunan partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Berikut tabel presentasi partisipasi pemilih pada Pilkada di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

Tabel 8.
Data Presentase Pemilih dan Pengguna Hak Pilih antar Pilkada
Tahun 2005-2020

Pilkada	Jumlah Pemilih (DPT)	Penggunaan Hak Pilih	Tidak Memilih	Presentase Partisipasi
20 Juni 2005	720.767	510.330	210.437	70,80
03 Juni 2010	772.163	551.408	220.755	71,41
09 Desember 2015	764.651	568.591	196.060	74,36
09 Desember 2020	759.045	587.609	191.344	77,24

(Sumber Data : KPU Kabupaten Ponorogo)

Data partisipasi pemilih pada Pilkada di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2010 hingga 2020. Dari tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih dari Pilkada tahun 2010 ke Pilkada tahun 2020 sebesar 0,61% dengan lonjakan partisipasi pada Pilkada tahun 2015 sebesar 3,95%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga Ponorogo dalam menyalurkan hak pilihnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 mencapai 77,2% yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pilkada tahun 2015 yang hanya sekitar 74%. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan besar bagi penyelenggara Pilkada di Kabupaten Ponorogo untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga agar tingkat partisipasi tidak mengalami penurunan. Dengan demikian, meningkatkan partisipasi pemilih perlu menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya di Kabupaten Ponorogo.

C. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo

1. Terbentuknya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi massa Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab atau 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama pesantren di bawah pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini menganut paham Ahlul Sunnah Wal Jama'ah dan menganut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nahdlatul Ulama berakidah Islam dan berazaskan Pancasila. Beberapa tokoh ulama juga turut mendukung pendirian Nahdlatul Ulama, seperti K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Ma'shum Lasem, dan lain-lain. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang memiliki pengaruh besar di Indonesia dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Jayanti, 2017). Selain dari K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai tokoh pendirinya, juga didukung oleh para tokoh alim ulama yang diantaranya sebagai berikut :

- a) K. H. Basri Jombang
- b) K. H. Ridwan Semarang
- c) K. H. Nawawi Pasuruhan
- d) K. H. R. Asnawi Kudus
- e) K.H. R. Hambali Kudus
- f) K. Nakhrawi Malang
- g) K.H. M. Alwi Abdul Aziz
- h) K.H. Doromuntaha Bangkalan, dan lain-lain.

Terdapat mengenai sebab-sebab lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Muhammad Thaha Ma'ruf, NU lahir karena persoalan keagamaan di mana saat itu muncul beberapa aliran baru yang mengusung isu modernisme, sehingga mengakibatkan adanya perdebatan di kalangan umat Islam. Pendapat lain mengatakan bahwa NU didirikan untuk mewakili kepentingan para kiai dalam hubungannya dengan pemerintah dan juga kaum pembaharu, serta untuk menghambat perkembangan organisasi-organisasi yang sudah ada sebelumnya. Menurut ensiklopedi Islam, tujuan didirikannya NU adalah untuk memperjuangkan penerapan ajaran Islam yang berhaluan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah dan menganut mazhab empat dalam kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila. Dalam hal ini, NU bertindak sebagai wadah untuk menghimpun umat Islam yang berhaluan

Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut mazhab empat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia (Jayanti, 2017).

Nahdlatul Ulama memiliki sejarah dan proses panjang sebelum akhirnya didirikan pada tahun 1926. Proses ini dimulai ketika K.H. Wahab Hasbullah dan Mas Mansoer mendirikan madrasah bernama Nahdlatul Wathan pada tahun 1916 di Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1918, Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari juga mendirikan forum diskusi ilmiah keagamaan bernama Tashwirul Afkar, yang mempertemukan kelompok pesantren dan modernis. Pada tahun yang sama, Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari juga mendirikan koperasi dagang bernama Nahdlatul Tujjar. Namun, kebersamaan dan saling pengertian antara kelompok islam pesantren dan modernis kemudian berubah menjadi persaingan pada tahun 1920-an. Dari sinilah kemudian lahir Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan para tokoh ulama pesantren lainnya sebagai wadah perjuangan untuk mewakili kepentingan-kepentingan kiai dan memperjuangkan ajaran islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jam'ah serta menganut mazhab empat di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila (Ulum & Wahid HS, 2019).

Berdirinya Jami'iyah Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 1 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M sangat cepat menyebar dan menjadi topik pembicaraan yang ramai sampai ke Ponorogo. Faktor yang menyebabkan cepat menyebar dan ramainya kabar tentang berdirinya Jami'iyah Nahdlatul Ulama di Surabaya adalah karena adanya komunikasi antara sebagian santri yang berasal dari Ponorogo yang bertolak belakang (modok) di Pondok Pesantren Siiwalan Panji Buduran Sidoarjo. Salah satu dari santri tersebut Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Mbah KH. Ibrahim sebagai ketua PCNU Ponorogo yang pertama. Dari komunikasi Ibrahim dengan para masyayikh dan pini sepuh di Ponorogo, pada tahun 1926 telah diadakan persiapan pembentukan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Ponorogo. Setelah melalui musyawarah, pengurus inti dari PCNU Ponorogo ditetapkan, yaitu KH. Moh. Manshur sebagai Rais Syuriyah dan KH. Ibrahim sebagai Ketua Tanfidziyah (Farid, 2020).

KH. Moh. Manshur adalah seorang Kyai yang menempati urutan ketujuh di Pondok Pesantren Josari Jetis, yang didirikan pada tahun 1643 M. Sedangkan KH. Ibrahim yang dulunya merupakan santri di Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, memiliki hubungan dengan sesama alumni pondok tersebut, termasuk dengan KH.

Hasyim Asy'ari. Kelompok masyayikh dan pinisepuh di Ponorogo generasi awal yang disebutkan dalam kalimat tersebut termasuk beberapa tokoh penting dalam sejarah pesantren di Ponorogo, seperti Ky. Syarqowi, Ky. Moh. Manhudi, Ky. Syamsuddin, H. Irsyad, H. Baedlowi, H. Jahuri, H. Umar Sidiq, H. Fadli, H. Bisri, H. Abrori, H. Zaini (Farid, 2020).

Pada tahun 1926, PCNU Ponorogo belum resmi berdiri namun sudah ada persiapan yang dilakukan oleh KH. Ibrahim dengan para masyayikh dan pinisepuh di Ponorogo. Persiapan ini berjalan hingga tahun 1930, dan pada tanggal 10 Syawal 1348 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Maret 1930, diterbitkan Al-Idaroh Al-Aliyah yang ditandatangani oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib. Berdasarkan Al-Idaroh Al-Aliyah tersebut, PCNU Ponorogo diresmikan sebagai cabang ke-7 Jam'iyah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia (Farid, 2020).

Sejak didirikan, Nahdlatul Ulama telah menentukan beberapa bidang utama sebagai upaya untuk mencapai tujuan berdirinya dan cita-cita yang berhubungan dengan keagamaan maupun masyarakat. Upaya-upaya tersebut terdiri dari beberapa bidang yang berbeda sebagai berikut :

- a) Peningkatan silaturahmi/komunikasi/relasi-relasi antar ulama.
- b) Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan.
- c) Peningkatan penyiaran islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial.
- d) Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.

Pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama, dimana organisasi ini sangat peka terhadap pentingnya hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga memiliki keprihatinan terhadap nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama telah menetapkan kegiatan-kegiatan nyata untuk mengatasi masalah tersebut, seperti upaya untuk memperbaiki pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama melihat bahwa masalah ini harus diatasi melalui kegiatan nyata bukan hanya dengan wacana saja (Farid, 2020).

Kepemimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dalam periode awal, di mana KH. Manshur Josari tetap memegang posisi Rasi Syuriyah hingga tahun 1943, sementara KH. Moh. Manhudi tetap menjadi Katib. Sedangkan posisi ketua Tanfidziyah mengalami beberapa pergantian setelah KH. Ibrahim meninggal, pertama digantikan oleh Kyai Zaini (w.1936), kemudian oleh KH. Abdurrahim (w.1973), dan selanjutnya oleh Khondjen Koesno Mihardjo/Ki Koesno Mihardjo (w.1977) (Farid, 2020).

Sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar inti berdasarkan Statoeten Nahdlatu Oelama 1926 tersebut, maka yang segera dilakukan di Ponorogo yaitu :

- a) Pembangunan masjid NU
- b) Meningkatkan konsolidasi diantara ulama/para kyai yang berfahaman mengikuti madzhab empat.

Adapun imam masjid pada generasi awal dan beberapa masa sesudahnya antara lain yaitu :

- a) KH. Mahfud Afandi
- b) KH. Moh. Oemar Ahmady
- c) KH. Moh. Manhudi
- d) Poernomo
- e) KH. Abdul Baqin Al-Irsyad
- f) KH. Muhsin Sofwan

Masjid NU Ponorogo dibangun pada hari Minggu Kliwon tanggal 24 Dzulqo'dah 1349 H bertepatan dengan tanggal 2 April 1931 M, dengan petunjuk arah kiblat oleh Hadlrotasy Syaikh KH. Muhamad Hasyim Asy'ari. Renovasi pertama dimulai pada Senin Legi tanggal 1 Muharram 1398 H bertepatan dengan 12 Desember 1977 Masehi. Renovasi kedua dimulai pada Minggu Wage tanggal 1 Muharram 1433 H bertepatan dengan 27 November 2011. Renovasi ketiga dimulai pada 1 Muharram 1436 H bertepatan dengan 25 Oktober 2014. Peresemian dilakukan pada Sabtu Pahing tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 H, sesuai dengan tanggal 3 Maret 2018 M oleh Mustasyar PBNU KH. Ahmad Musthofa Bisri (Farid, 2020).

Pengurus Cabang NU baru ini, mereka segera melakukan safari ke berbagai kawedanan, kecamatan, dan desa di wilayah Ponorogo. Selama periode awal ini, mereka membangun hubungan dengan berbagai tokoh agama dan masyayikh di wilayah tersebut, seperti Kyai Abu Dawud Durisawo, KH. Romli Genthon, KH. Syamsuddin Durisawo, Kyai Humam Mangkujayan, Kyai Shodiqun Jurang krikil Ngunut, Kyai Thohir Mojoroto, Kyai Thoyib Jenes, Kyai Abdul Wahab Joresan, Kyai Fahrudin Coper, Kyai Chasanul Hidayah Bajang Balong, Kyai Imam Mukhtar Bajang Balong, Kyai Fathurroji Pulung, Kyai Abu Syukur Kradenan Jetis, Kyai Dasuki Cekok, Kyai Mohamad Thoyib Pilang, Kyai Thoyib Mangunan Sampung, Kyai Abdullah Hasyim Mangunan Sampung dan masih banyak lagi yang lain. Nama-nama Kyai tersebut dijadikan sebagai penggerak terbentuknya pengurus Majelis Wakil Cabang NU dan pengurus Ranting sebagai Mustasyar, Syuriyah, maupun Tanfidziyah (Farid, 2020).

Kegiatan silaturahmi dengan para Kyai kampung tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan meningkatkan amanah Ahlussunnah wal jama'ah seperti istighosah, sholat tasbeeh, pembacaan manaqib, dan sejenisnya. Selain itu, kegiatan Lailatul Ijtima' juga diadakan di berbagai tingkatan sebagai upaya untuk memperkuat solidaritas antar anggota NU. Semua kegiatan ini dilakukan pada saat Indonesia sedang menghadapi penjajahan, yang menunjukkan bahwa NU dan para Kyai kampung juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah pada waktu itu.

2. Forum Musyawarah

Konferensi adalah instansi permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkat kepengurusan Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang. Konbes (Konferensi besar) adalah nama untuk konferensi tingkat nasional. Namun institusi ini bukan tertinggi, karena untuk tingkat nasional masih ada muktamar dan Munas di atasnya. Konferwil (Konferensi wilayah) adalah nama institusi tertinggi untuk tingkat provinsi. Konfercab (Konferensi cabang) adalah nama institusi tertinggi untuk tingkat kabupaten. Konferensi MWC untuk tingkat kecamatan. Sedangkan untuk Pengurus Ranting menggunakan istilah Musyawarah Ranting (Musran) (Farid, 2020).

Pada level Pengurus Cabang NU Ponorogo, pedoman yang digunakan pada tahun 1970-an adalah Peraturan Rumah Tangga pasal 13 ayat 9. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengurus cabang dipilih untuk masa dua tahun oleh konferensi cabang dan

disahkan oleh Pengurus Besar NU dengan persetujuan pengurus NU wilayah, dan mereka dapat dipilih kembali. Penerapan masa periodik dua tahunan ini di PCNU Ponorogo sudah dilakukan, tetapi secara fleksibel. Tidak setiap kali konferensi cabang selalu mengadakan pergantian pengurus inti. Rentang waktu dua tahunan dalam praktik meliputi periode dari tahun 1975-1976; 1976-1977; 1977-1978; 1978-1979; 1979-1980 (Farid, 2020).

Sejak tahun 1980, rentang periode antara konferensi cabang NU Ponorogo berikutnya berubah menjadi 3 tahun. Hal ini berdampak pada masa kepengurusan PCNU Ponorogo, yang meliputi periode 1980-1983, 1983-1986, dan 1986-1989. Mulai tahun 1989, periode masa khidmah PCNU berubah menjadi 5 tahun, yang mengikuti perubahan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau garis yang diberikan oleh PBNU. Dalam rangka mengikuti perubahan ini, PCNU Ponorogo meliputi periode 1989-1994, 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Hal ini menunjukkan bahwa periode kepengurusan PCNU Ponorogo telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1980 dan mengikuti atauran yang ditetapkan oleh PBNU (Farid, 2020).

Adapun yang menduduki jabatan Rais Syuriyah maupun Ketua Tanfidziyah berdasarkan bermacam-macam rentang periode tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 9.
Periode Jabatan PCNU Ponorogo

No	Tahun	Rais	Ketua
1	1926-1930	KH. Moh. Manshur	KH. Ibrahim
2	1930-1943	Kh. Moh. Manshur	KH. Ibrahim KH. Zaini KH. Abdurrahim
3	1943-1963	KH. Syamsuddin	Khondjen Koesno Mihardjo
4	1963-1974	KH. Chozin Dawudy	KH. Maksun Yusuf
5	1974-1976	KH. Moh. Oemar Ahmady	H. Muchari Hadi Sardjono
6	1976-1977	KH. Moh. Oemar Ahmady	H. Muchari Hadi Sardjono
7	1977-1978	KH. Moh. Oemar Ahmady	H. Muchari Hadi Sardjono
8	1978-1979	KH. Moh. Oemar Ahmady	H. Muchari Hadi Sardjono
9	1979-1980	KH. Moh. Oemar Ahmady	H. Muchari Hadi Sardjono
10	1980-1983	KH. Muhayat Syah	K.H. Buchori
11	1983-1986	KH. Maghfoer Hasbullah	K.H. Buchori

12	1986-1989	KH. Maghfoer Hasbullah	Drs. H. Adam Basori
13	1989-1994	KH. Maghfoer Hasbullah	Drs. KH. Moh. Syarwani Maksud
14	1994-1999	KH. Maghfoer Hasbullah	Drs. KH. Moh. Syarwani Maksud
15	1999-2004	KH. Ahmad Dardiri	KH. Moehatim Hasan, SH.
16	2004-2009	H. Imam Sayuti Farid	H. Moehatim Hasan, SH.
17	2009-2014	H. Imam Sayuti Farid	Drs. H. Fatchul Aziz, MA.
18	2014-2019	H. Imam Sayuti Farid	Drs. H. Fatchul Aziz, MA.
19	2019-2024	KH. Moh. Sholehan	Drs. H. Fatchul Aziz, MA.

(Sumber Data : Official Website PCNU Ponorogo)

3. Pengurus MWCNU Se-Kabupaten Ponorogo

Tabel 10.

Daftar Nama Pengurus MWC Se-Kabupaten Ponorogo 2019-2024

MWCNU	Nama	Jabatan
Ponorogo	KH. Moh. Djaelani	Rois
	Imam Mudakir	Ketua
Babadan	KH. Romdloni Fahrur	Rois
	K. Abdurrokhim	Ketua
Jenengan	K. Sunarto	Rois
	K. Ahmad Samuji	Ketua
Ngebel	Nur Ihsan	Rois
	M. Muslih Taslim	Ketua
	Sugito	Sekretaris
Pulung	K. Ahmad Syafi'i	Rois
	Mujahidin	Ketua
Pudak	K. Seni Wibowo	Rois
	Suwanto	Ketua
Sooko		Rois
	Suwito	Ketua
Sawoo	KH. Hasanun	Rois
	Imam Nawawi	Ketua
Sambit	Muhaji Lestari	Rois
	K. Choirul Huda	Ketua
Jetis	KH. Masyhuri	Rois
	H. Suyanto	Ketua
Mlarak	KH. Qomari Ridlwan	Rois
	H. Halwani Syukron	Ketua
Siman	K. Muhtar Sunarto	Rois
	Poernomo	Ketua
Bungkal	K. Qomaruddin	Rois
	Lukmanul Hadi	Ketua
Ngrayun	K. Thoha	Rois

	Saifullah	Ketua
Slahung	KH. Imam Muhadji	Rois
	K. Zaenal Arifin	Ketua
Balong	K. Imam Makruf	Rois
	Suprawito	Ketua
Kauman	K. Moh. Sholikhin	Rois
	K. Edi Prayitno	Ketua
Jambon	KHA. Dimyathi Syaibani	Rois
	K. Moh. Jafar Shiddiq	Ketua
Badegan	K. Sofwan	Rois
	Mahdudin	Ketua
Sampung	K. Mahfud Ali	Rois
	K. Suyadi	Ketua
Sukorejo	K. Abdul Ro'uf	Rois
	Nur Anwar	Ketua

(Sumber Data : Official Website PCNU Ponorogo)

4. Visi, Misi, dan Tujuan PCNU Kabupaten Ponorogo

4.1. Visi PCNU Ponorogo

“Pada tahun 2024, Nahdlatul Ulama Ponorogo menjadi *Jama'iyah Diniyah Ijtima'iyah Ahlusunnah wal Jama'ah* yang mandiri dan kokoh serta memberi maslahat bagi umat menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, berkeadilan, dan demokratis”.

4.2 Misi PCNU Ponorogo

Misi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo sebagai berikut:

- a) Melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) menuju organisasi yang mandiri;
- b) Mengupayakan penguatan kapasitas inividu (*individual capacity*) jajaran pengurus dan jajaran perangkat dalam mewujudkan individu pengurus yang trampil dan ceras dalam melayani umat;
- c) Meningkatkan dan menguatkan karakter aswaja dan nasionalisme warga NU (*character building*) secara terencana, sistematis dan terstruktur bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama;
- d) Memberdayakan berbagai aset yang ada untuk mempercepat terwujudnya kemandirian organisasi dan kemaslahatan warga NU;

- e) Mendorong terwujudnya kemandirian lembaga-lembaga NU seperti: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Rumah Sakit Muslimat NU, Pondok Pesantren, Lembaga Perekonomian, dan lembaga lain dilingkungan Nahdlatul Ulama;
- f) Mendorong kemandirian warga NU baik secara: ekonomi, sosial, politik, budaya maupun pendidikan;
- g) Merapikan barisan dan gerak langkah perjuangan NU serta semangat pengabdian dibawah komando Alim Ulama yang terhimpun dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

5.1 Tujuan

Tujuan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponrogo adalah :

- a) Memperkuat sistem organisasi dan kelembagaan;
- b) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c) Memperkuat karakter Aswaja *An-Nahdliyyah* berwawasan kebangsaan;
- d) Mengembangkan layanan sosial-budaya;
- e) Memperkuat sektor ekonomi *jami'iyah dan jama'ah*;
- f) Memperkuat sektor pendidikan menuju pendidikan yang unggul;
- g) Mengembangkan sektor pertanian bagi warga NU;
- h) Meningkatkan layanan kesehatan berstandar NU;
- i) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

5. Dinamika Nahdlatul Ulama Ponorogo Perspektif Pendidikan

Dinamika pendidikan dikalangan Nahdliyin Ponorogo tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren sejak sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Bahkan, diakui oleh banyak kalangan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang didirikan oleh kaum pesantren. Selain itu, terapat juga beberapa sekolah atau madrasah formal yang didirikan oleh Nahdliyin Ponorogo sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat (Farid, 2020).

5.1 Tentang Berdirinya Sekolah/Madrasah Formal

Sejak awal, Nahdlatul Ulama telah membentuk Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang khusus mengurus bidang pendidikan. Di Ponorogo, lembaga ini dipimpin oleh beberapa tokoh yang berbeda pada setiap periode kepemimpinan. Dalam perkembangannya, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU kemudian bergabung di bawah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Akte Notaris Munyati Sullam, SH, Nomor 4). Lembaga Pendidikan Ma'arif NU memiliki jenjang pendidikan mulai dari tingkat Play Group, Taman Kanak-Kanak/Roudlotul Athfal, hingga tingkat SD/MI. Selain itu, lembaga ini juga menyediakan pendidikan lanjutan seperti SMP/MTs, SMA/Aliyah, dan SMK. Bahkan, terdapat pula tingkat pendidikan tinggi yang disediakan oleh lembaga ini.

5.1.1 Tingkat Play Group/Taman Kanak-Kanak/Roudlotul Athfal

Taman Kanak-Kanak Muslimat NU yang pertama berdiri di Ponorogo adalah Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Cabang Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Tangkuban Perahu Ponorogo yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1945. Dalam perkembangan mutakhir Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina bakti Wanita Perwakilan Ponorogo mempunyai binaan : Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal sejumlah 204 dan Play Group sejumlah 64. Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal/Play Group Muslimat NU tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan se-kabupaten Ponorogo.

5.1.2 Tingkat Tingkat SD/MI

Madrasah-madrasah Diniyyah yang kategori generasi awal di Ponorogo meliputi :

- a) Madrasah Diniyyah Ma'arif Al-Islamiyyah, Selorejo Ngunut berdiri pada tanggal 1-11-1993.
- b) Madrasah Diniyyah Ma'arif Cekok berdiri pada tanggal 1-7-1934.
- c) Madrasah Diniyyah Ma'arif Patihan Wetan berdiri pada tanggal 1-1-1942.

- d) Madrasah Diniyyah Ma'arif Mayak berdiri pada tanggal 1-1-1947.
- e) Madrasah Diniyyah Ma'arif Mangunsuman berdiri pada tanggal 5-1-1949.
- f) Madrasah Diniyyah Ma'arif Patihan Kidul berdiri pada tanggal 30-10-1949.
- g) Madrasah Diniyyah Ma'arif Bareng berdiri pada tanggal 1-7-1950.
- h) Madrasah Diniyyah Ma'arif Panjeng berdiri pada tanggal 3-2-1950.
- i) Madrasah Diniyyah Ma'arif Kadipaten beriri pada tanggal 1-7-1950.

Dalam perkembangan tahun 2015 di Kabupaten Ponorogo telah terdapat Madrasah Ibtida;yyah Ma'arif sebanyak 45 buah. Sedangkan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) hanya satu , yaitu SD Ma'arif yang berada di Jalan Sultan Agung Nomor 83A Ponorogo.

5.1.3 Tingkat MTs/MA

Sampai dengan tahun 2015 MTs. Ma'arif se-Kabupaten Ponorogo berjumlah 18 buah, sedangkan MA Ma'arif se-Kabupaten Ponorogo berjumlah 17 buah. Secara keseluruhan data sekolah/madrasah Ma'arif se-Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

Tabel 11.
Jumlah Sekolah/Madrasah Ma'arif

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	SD Ma'arif NU	1
2	MI Ma'arif NU	45
3	SMP Ma'arif NU	9
4	MTs Ma'arif	28
5	MA Ma'arif NU	17
6	SMA Ma'arif NU	2
7	SMK Ma'arif NU	3
	Jumlah	105

5.1.4 Tingkat Pendidikan Tinggi

Dalam rangka melengkapi wadah pendidikan Jami'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif sebagai lembaga yang ditugasi untuk menangani bidang pendidikan, telah direncanakan berdirinya suatu Perguruan Tinggi dibawah naungan NU sejak tanggal 17 Mei 1967. Dalam tingkat pendidikan tinggi ini Nahdlatul Ulama Ponorogo membina INSURI dan AKAFARMA.

6. Dinamika Nahdlatul Ulama Ponorogo Perspektif Sosial

6.1 Mendirikan Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo

Rumah Sakit Umum (RSU) Muslimat Ponorogo saat ini dikelola oleh Badan Pelaksana Pelayanan Kesehatan NU (BPPK-NU) Ponorogo sebagai wakil dari pemilik yaitu PCNU dan PC Muslimat NU Cabang Ponorogo. RSU Muslimat Ponorogo ditetapkan sebagai RSU kelas type D sesuai dengan SK dari Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor HK.03.05/1/1902/12, tertanggal 10 Oktober 2012 dan ijin tetap penyelenggaraan Rumah Sakit oleh Surat Keputusan Bupati Ponorogo No. 1376 Tahun 2012, tertanggal 17 Desember 2012. Pada tahun 2012 RSU Muslimat Ponorogo menghadapi survey Akreditasi versi 2012 dengan mendapat hasil: LULUS PARIPURNA.

6.2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu "AL-IKHLAS" Ponorogo

Ide untuk mendirikan Panti Asuhan Al-Ikhlash bermula dari pembicaraan informal antara beberapa tokoh NU Ponorogo. Beberapa tokoh NU Ponorogo berdiskusi dan merencanakan pembentukan panti asuhan tersebut, dan kemudian mereka memutuskan untuk mendiskusikan ide tersebut dengan KH. Hasyim Sholeh Mayak. Setelah melalui proses konsultasi dan persiapan, MWC NU Ponorogo secara resmi mendirikan Panti Asuhan Al-Ikhlash pada tanggal 13 Oktober 1984.

6.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Muslimat NU Cabang Ponorogo "DARUL MUHSHININ"

LKSA Darul Muhsinin didirikan oleh PC Muslimat NU Ponorogo pada tahun 2003, dan berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 132A RT/RW 02/04 Surodikraman Ponorogo. Selain panti asuhan, LKSA ini Juga memiliki usaha pertokoan yang terintegritas di Jalan Jenderal Ahmad Yani 132A.

6.4 Beberapa LKSA/Panti yang lain

Selain LKSA yang sudah disebutkan tadi di Ponorogo masih banyak LKSA yang lain semisal di pondok pesantren Hudatul Muna Brotonegaran, LKSA AL-Amin di Gandu Mlarak Ponorogo, LKSA di Gundik Slahung, LKSA di Jerakan Banyudono Ponorogo dan masih banyak yang lain lagi.

6.5 Program Kerja PCNU Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat 2019-2024

Konfercab (Konferensi cabang) Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo tahun 2019 telah menetapkan GBPK (Garis-Garis Besar Program Kerja) berdasarkan hasil analisis evaluasi diri yang mengacu pada Rencana Strategis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat 2019-2020. Sembilan isu utama yang akan dihadapi PCNU Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan pada ke sembilan isu strategis tersebut serta mengacu pada hasil evaluasi diri ditetapkan beberapa mata program dasar PCNU Ponorogo sebagai berikut.

6.5.1 Peningkatan sistem organisasi dan kelembagaan

- a) Penyusunan SOP (*Standard Operational Prosedur*) PCNU Ponorogo;
- b) Penataan manajemen berbasis bule ocean dan rumusan 9 (sembilan) nilai keberkahan;
- c) Penguatan jaringan kerja dengan prinsip simbiosis mutualistis (saling tidak merugikan);
- d) Pemberdayaan aset waqaf dan non waqaf menjadi asep produktif;
- e) Pengelolaan zakat, infaq dan shadoqah menjadi berdaya guna untuk kesenjangan warga NU;

- f) Menjadikan Teknologi Informasi sebagai media perjuangan Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan.

6.5.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Ideologisasi dan kaderisasi secara sistematis, masif dan berkelanjutan;
- b) Menggali dan mengembangkan potensi SDM dibidang pendidikan unggul;
- c) Menyiapkan SDM handal dibidang layanan kesehatan;
- d) Pemberdayaan SDM politik NU menuju khoiro ummah;
- e) Penyiapan SDM dibidang ekonomi.

6.5.3 Penguatan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan

- a) Pendidikan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan untuk warga NU;
- b) Memfasilitasi lahirnya berbagai komunitas dan media dalam penguatan karakter Aswaja An-nahdliyyah berwawasan kebangsaan;
- c) Mengembangkan strategi dakwah Aswaja;
- d) Penguatan tradisi literasi Aswaja;
- e) Menyiapkan Da'i muda Asjawa.

6.5.4 Pengembangan layanan sosial-budaya

- a) Mengembangkan strategi kebudayaan berbasis 9 (sembilan) nilai keberkahan dalam NU;
- b) Mendorong perlindungan tenaga kerja, buruh, petani dan pedagang kecil;
- c) Mendorong adanya layanan sosial dan kependudukan berbasis kearifan lokal;

- d) Mengadvokasi warga NU dalam berbagai bidang sosial dan budaya;
- e) Peningkatan layanan terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

6.5.5 Penguatan sektor ekonomi jami'iyah dan jama'ah

- a) Menumbuhkan ekonomi jami'iyah atau jama'ah secara terencana dan berkelanjutan;
- b) Memperkuat peran Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) dalam gerakan ekonomi jami'iyah dan jama'ah;
- c) Memfasilitasi terbentuknya Balai Diklat dan tumbuhnya Home Industri dikalangan warga NU berbasis MWC, Ranting dan Pondok Pesantren.
- d) Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah berbasis ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dan koin NU;
- e) Ekspansi Badan Usaha milik NU keluar wilayah Ponorogo.

6.5.6 Penguatan sektor pendidikan menuju pendidikan yang unggul

- a) Penataan struktur dan SDM yang berkualitas ditubuh LP Ma'arif NU;
- b) Memfasilitasi terbangunnya jaringan antar lembaga pendidikan, baik diinternal maupun eksternal NU guna mewujudkan pendidikan unggul;
- c) Mewujudkan Balai Diklat untuk terjaga kependidikan dikalangan LP Ma'arif NU;
- d) Memfasilitasi terbentuknya Tim Khusus yang mendesain adanya Passive Income LP Ma'arif NU dan Sekolha/Madrasah Ma'arif;
- e) Mengakses berbagai beasiswa bagi siswa berprestasi yang tetap menyelamatkan aqidah Aswaja.

6.5.7 Pengembangan sektor pertanian bagi warga NU

- a) Menyiapkan mentor pertanian dari sisi penanaman, pengelolaan hasil dan penciptaan pasar;
- b) Memfasilitasi dan mendampingi usaha-usaha rintisan dibidang pertanian warga NU;
- c) Mendorong lahirnya regulasi yang melindungi dan berpihak kepada para petani;
- d) Mengadvokasi petani dan buruh tani dari warga NU;
- e) Mengupayakan adanya jaringan menuju terwujudnya praktek pertanian terpadu.

6.5.8 Peningkatan layanan kesehatan berstandar NU

- a) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan Rumah Sakit berstandart NU;
- b) Membentuk klinik layanan kesehatan berbasis Pondok Pesantren dan MWC NU;
- c) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang kesehatan dengan prinsip simbiosis mutualistis;
- d) Mensosialisasikan dan mengkampanyekan pola hidup sehat dan higienis.

6.5.9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup

- a) Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan tanggap bencana dan perubahan iklim;
- b) Mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap isu bencana dan perubahan iklim;
- c) Melakukan upaya-upaya mitigasi untuk menghindari masyarakat dari dampak bencana;
- d) Melakukan sosialisasi dan penguatan masyarakat agar menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim;
- e) Melakukan advokasi yang berpihak pada keramahan lingkungan.

Tabel 12
**Matriks Program Kerja PCNU Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat
 2019-2024**

No	Mata Program	Pelaksana
1	Penguatan sistem organisasi dan kelembagaan	
	a. Penyusunan SOP (Standart Operational Prosedur) organisasi dilingkungan PCNU Ponorogo	PCNU
	b. Penataan manajemen organisasi berbasis blue ocean dan 9 (sembilan) nilai keberkahan	PCNU
	c. Penguatan jaringan kerja dengan prinsip simbiosis mutualistis (saling tidak merugikan)	PCNU, semua lembaga
	d. Pemberdayaan aset waqaf dan non waqaf menjadi aset produktif	PCNU, LAZISNU, LPWNU, LPNU, LTM
	e. Pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh menjadi berdaya guna untuk kesejahteraan warga NU	PCNU, LAZISNU, LBMNU, LTM, LKKNU, LPBI
	f. Menjadikan Teknologi Informasi sebagai media perjuangan Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan	ASWAJA CENTRE, LTNU, RM, LTM, LDNU, RADIO LFNU
2	Pengembangan SDM	
	a. Ideologisasi dan kaderisasi secara sistematis, masif dan berkelanjutan	PCNU, semua lembaga
	b. Menggali dan mengembangkan potensi SDM dibidang pendidikan unggul	LP Maarif, Litbang, Lakpesdam, RMI, LPTNU, LDNU
	c. Menyiapkan SDM handal dibidang layanan kesehatan	PCNU, LKNU, BPPKNU
	d. Pemberdayaan SDM Politik NU menuju khoiro ummah	PCNU
	e. Penyiapan SDM dibidang ekonomi	HPN, LPNU, LP2NU
3	Penguatan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan	
	a. Pendidikan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan untuk semua warga NU	SEMUA LEMBAGA
	b. Memfasilitasi lahirnyaberbagai komunitas dan media dalam penguatan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan	SEMUA LEMBAGA
	c. Mengembangkan strategi dakwah Aswaja	LDNU, ASWAJA CENTRE, LTM, LTN, RADIO, KBIH
	d. Penguatan tradisi literasi Aswaja	LDNU, ASWAJA CENTRE, LTM, LTN,

		LITBANG, RMI, LFNU
	e. Menyiapkan Da'i Muda Aswaja	LDNU, RMI, LTM, MAARIF, ASWAJA CENTRE
4	Pengembangan layanan Sosial Budaya	
	a. Mengembangkan strategi kebudayaan berbasis 9 (sembilan) nilai keberkahan dalam NU	LESBUMI, LAKPEDAM, LITBANG, LDNU
	b. Mendorong perlindungan tenaga kerja, buruh, petani dan pedagang kecil	LPBHNU, LITBANG, LAKPESDAM, SARBUMUSI, LPNU, LP2NU
	c. Mendorong adanya layanan sosial dan kependudukan berbasis kearifan lokal	LKKNU, LAKPESDAM, LKNU, LITBANG
	d. Mengadvokasi warga NU dalam berbagai bidang sosial dan budaya	PCNU, LPBHNU, LESBUMI, LAKPESDAM
	e. Peningkatan layanan terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam	LPBI, LAZISNU
5	Penguatan sektor ekonomi jam'iyah dan jama'ah	
	a. Menumbuh kembangkan ekonomi jam'iyah dan jama'ah secara terencana dan berkelanjutan	PCNU, HPN, LPNU, LP2NU, RMI, PKBM BH
	b. Memperkuat peran Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) dalam gerakan ekonomi jam'iyah dan jama'ah	HPN, LPNU
	c. Memfasilitasi terbentuknya balai diklat dan tumbuhnya home industri dikalangan warga NU berbasis MWC, Ranting, dan pondok pesantren	PCNU, HPN, LITBANG, LAKPESDAM, LPNU, LP2NU, RMI
	d. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis ZIS (Zakat, infaq, dan shadaqoh) dan koin NU	PCNU, LAZISNU
	e. Ekspansi Lembaga Badan Usahan milik NU keluar wilayah Ponorogo	LPNU, HPN
6	Penguatan Sektor pendidikan menuju pendidikan unggul	
	a. Penataan struktur dan SDM yang berkualitas ditubuh LP Ma'arif NU	LP MAARIF, LITBANG, LAKPEDAM
	b. Memfasilitasi terbangunnya jaringan antara lembaga pendidikan, baik diinternal maupun eksternal NU guna mewujudkan pendidikan unggul	PCNU, LP MAARIF, LITBANG, LAKPESDAM, LPTNU, RMI
	c. Mewujudkan balai diklat untuk tenaga kependidikan dikalangan LP Ma'arif NU	PCNU, HPN, LP MAARIF, LITBANG
	d. Memfasilitasi terbentuknya tim khusus yang mendesain adanya passive income LP	PCNU, LAZISNU, LP MAARIF

	Ma'arif NU dan sekolah/madrasah Ma'arif	
	e. Mengakses berbagai beasiswa bagi siswa berprestasi yang tetap menyelamatkan aqidah Aswaja	PCNU, LP MAARIF, LPTNU
7	Pengembangan sektor pertanian bagi warga NU	
	a. Menyiapkan mentor pertanian dari sisi penanaman, pengelolaan hasil dan pencapaian pasar	HPN, LPNU, LP2NU
	b. Memfasilitasi dan mendampingi usaha-usaha rintisan dibidang pertanian warga NU	HPN, LPNU, LP2NU
	c. Mendorong lahirnya regulasi yang melindungi dan berpihak kepada para petani	LPBHNU, LPNU, LP2NU, LAKPESDAM
	d. Mengadvokasi petani dan buruh tani dari warga NU	LPBHNU, SARBUMUSI, LPNU, LP2NU
	e. Mengupayakan adanya jaringan menuju terwujudnya praktek pertanian terpadu	PCNU, HPN, LPNU, LP2NU, LAKPESDAM
8	Peningkatan layanan kesehatan berstandar NU	
	a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan rumah sakit berstandar NU	BPPK, LKNU
	b. Membentuk klinik layanan kesehatan berbasis pondok pesantren dan MWC NU	BPPK, LKNU
	c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang kesehatan dengan prinsip simbiosis mutualistis	PCNU, BPPK, LKNU, KBIH
	d. mensosialisasikan dan mengkampanyekan pola hidup sehat dan hegienis	BPPK, LKNU, LP MAARIF, RMI, LKNU, LTM, LDNU
9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	
	a. Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan tanggap bencana dan perubahan iklim	LPBI, LAZISNU
	b. Mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap isu bencana dan perubahan iklim	LPBHNU, LPBI
	c. Melakukan upaya-upaya mitigasi untuk menghindarkan masyarakat dari dampak iklim	LPBI, LPHNU, LAZISNU
	d. Melakukan sosialisasi dan penguatan masyarakat agar menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	LPBI, LAZISNU
	e. Melakukan advokasi yang berpihak pada keramahan lingkungan	LPBI, LAZISNU, LPBHNU

7. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo Masa Khidmat 2019-2024

7.1 Mustasyar

- a) KH. Ma'aruf Mochtar
- b) KH. Husen Aly
- c) Drs. KH. Ansor M Rusydi
- d) KH. Jiryan hasbulloh
- e) Drs. KH. A. Choliq Ridwan
- f) KH. Abdussami' Hasyim
- g) Drs. KH. Imam Sayuti Farid, SH, M.Si
- h) KH. Abdul Qadir Murdani
- i) KH. Ach. Heryanto, BA

7.2 Syuriah

- a) Rais : KH. Moh. Sholihan
- b) Wakil Rais : K. Hanif Abdul Ghofir
- c) Wakil Rais : Drs. KH. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I
- d) Wakil Rais : KH. Hasanun
- e) Wakil Rais : KH. Ayyub Ahdian Syam, SH
- f) Wakil Rais : KH. Muhtar Sunarto
- g) Wakil Rais : KH. Romdloni Fahrur
- h) Wakil Rais : KH. Abid Mufarrihin, SE
- i) Wakil Rais : Dr. K. Ahmad Syafi'i SJ, M.Si
- j) Katib : K. Fauzi Romadhon
- k) Wakil Katib : KH. Sholihin
- l) Wakil Katib : Gus Muqorrobin
- m) Wakil Katib : K. Agus Mahmud Isa Al-Mudzofar

- n) Wakil Katib : Gus Muh. Kholis Hidayat

7.3 A'wan

- a) Drs. KH. Ahmad Muzayyin
- b) KH. Muh. Dimiyati
- c) KH. Murhadi.
- d) Drs. KH. Moh. Muhsin
- e) KH. Imam Muhadji, S.Pd.I
- f) KH. Ahmad Zawawi
- g) KH. Mahmudin Sholeh, M.Pd.I
- h) KH. Sunarto
- i) K. Syahrul Munir
- j) K. Sunartip Fadian, M.Ag

7.4 Tanfidziyah

- a) Ketua : Drs. H. Fatchul Aziz, MA
- b) Wakil Ketua : K. Kholid Ali Husni, M.Pd.I
- c) Wakil Ketua : Dr. Ahmadi Bardan, M.Ag
- d) Wakil Ketua : H. Sugeng Hariono, ST
- e) Wakil Ketua : Drs. H. Askab Jamzuri
- f) Wakil Ketua : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
- g) Wakil Ketua : KH. Fatchurrahman, M.Pd. I
- h) Wakil Ketua : KH. Fatchurrahman, M.Pd. I
- i) Wakil Ketua : Drs. H. Sugeng Al-Wahid, M.Si
- j) Sekretaris : Dr. H. Lutfi Hadi Aminudin, M.Ag
- k) Wakil Sekretaris : Taufiq Ashary, S.Pd
- l) Wakil Sekretaris : Agus Khoirul Hadi, S.Pd. I
- m) Wakil Sekretaris : Idam Mustofa, M.Pd

n) Wakil Sekretaris : H. Agus Nasruddin

Adapun struktur kepengurusan PCNU Ponorogo terdiri dari pengurus Mustasyar, Syuriah, A'wan, dan Tanfidziyah dengan jumlah pengurus yang berbeda-beda. Mustasyar terdiri dari 9 pengurus, Syuriah terdiri dari 14 pengurus, A'wan terdiri 10 pengurus, dan Tanfidziyah sebanyak 14 pengurus. Total keseluruhan pengurus PCNU Ponorogo periode 2019-2024 adalah sebanyak 47 orang. Selanjutnya untuk Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU di Kabupaten Ponorogo berjumlah 21 MWCNU sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo saat ini. Kemudian, Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Ponorogo terbagi ke dalam dua elemen yaitu warga NU atau biasa disebut dengan Nahdliyin dalam bentuk struktural atau berada dalam kepengurusan seperti PCNU tingkat kabupaten serta di tingkat kecamatan disebut MWCNU, dan elemen kedua disebut kultural yaitu warga NU yang berada di luar kepengurusan.

BAB IV

SIKAP POLITIK PCNU KABUPATEN PONOROGO PADA PILKADA TAHUN 2020

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi berbasis Islam terbesar di Indonesia. Kehadiran NU tidak bisa dilepaskan dari pengaruh elite-elite yang berada di dalamnya. Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada nahdliyin dan elite yang berada pada struktur organisasi, untuk memilih sesuai dengan pandangan politik secara pribadi. Elite yang dimaksud adalah struktur organisasi kepengurusan PCNU Ponorogo secara individual boleh berpolitik. Tetapi permasalahannya dapat dipisahkan secara tegas dan jelas antara tindakan tokoh sebagai individu yang memiliki hak untuk berpolitik, dengan sikap NU sebagai organisasi. Karena elite dalam organisasi adalah orang yang berpengaruh dalam mengendalikan arah organisasi tersebut ingin netral atau sebaliknya semua tergantung pada perilaku dan sikap elitnya. Untuk itu peneliti ingin membahas mengenai peran dan sikap politik PCNU Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 kemarin.

A. Menjaga Netralitas Organisasi

Menjaga netralitas merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan peran dan fungsi dari sebuah organisasi, terutama dalam konteks politik. Netralitas organisasi mengacu pada sikap dan kebijakan organisasi untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau tidak memberikan dukungan resmi kepada calon atau partai politik tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi tetap fokus pada tujuan utamanya tanpa terpengaruh oleh perubahan dalam peta politik. Menjaga netralitas organisasi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa terjerat dalam pertarungan politik yang dapat mengganggu stabilitas dan kredibilitasnya. Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik bukanlah hal yang baru. Nahdlatul Ulama (NU) secara formal tidak menunjukkan dirinya sebagai entitas politik. Meskipun Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi tidak terlibat secara langsung dalam politik, namun anggota-anggotanya memiliki kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki kepentingan untuk mempertahankan sikap modernitasnya, yang dalam kegiatan politik praktis sikap modernitas tersebut dapat diartikan dalam netralitas sikap politik Nahdlatul Ulama (NU) dengan politik praktis.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik dalam pemilihan umum. Nahdlatul Ulama (NU) telah kembali mengikuti peraturan organisasinya yang mengarahkan organisasi ini untuk menjalankan peran utamanya sebagai organisasi sosial dan keagamaan, seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturannya yang merujuk pada *khittah* 1926. Netralitas Nahdlatul Ulama (NU) diimplementasikan melalui fatwa yang dihasilkan dalam muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Dalam fatwa tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa NU kembali sepenuhnya kepada tujuan awal yang digariskan oleh para pendirinya saat organisasi ini didirikan, yaitu sebagai organisasi sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Dengan kata lain, NU memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan fokus pada perannya sebagai organisasi sosial dan keagamaan (Syamsurijal, 2023).

Hasil muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-27 di Situbondo, Jawa Timur dalam keputusan Nomor 02/MNU-27/1984 yang dengan tegas menyatakan bahwa NU telah kembali kepada prinsip-prinsip yang tertuang dalam *khittah* 1926. *Khittah* Numenjadi landasan berfikir, bersikap, dan bertindak bagi anggota NU yang harus tercermin dalam perilaku politik individu maupun dalam organisasi, serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keputusan tersebut menegaskan komitmen NU untuk menjalankan prinsip-prinsip *khittah* 1926 sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan mereka (Mufarikhin, 2022). Menjaga netralitas organisasi, dalam konteks sikap politik PCNU Ponorogo pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berada di cabang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mereka tetap netral dan tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, terutama dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Netralitas Politik Nahdlatul Ulama (NU) Pada Pilkada Tahun 2020

Netralitas politik dalam Nahdlatul Ulama (NU) merupakan istilah yang menggambarkan kemampuan organisasi ini untuk menahan elite dan anggotanya tidak terlibat dalam persaingan kekuasaan seperti yang dilakukam oleh partai politik. Meskipun begitu, keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) dan segala aktivitasnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik di Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang sudah jauh semakin terbuka dan liberal dengan semangat kompetensi tinggi untuk menduduki kekuasaan formal negara membuat sebagian

elite Nahdlatul Ulama (NU) sadar bahwa posisi-posisi tersebut harus diisi dan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 ormas tersebut tidak mengeluarkan kebijakan atau keputusan atas nama lembaga, baik tingkat wilayah dan cabang dalam hal dukung mendukung pasangan calon kepala daerah. Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur bakal menggelar Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 kemarin. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa timur menegaskan sikap netral sebagai bentuk menjaga khittah NU, termasuk komitmen identitas organisasi, dan jati diri Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah diniyah ijtima'iyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan). Penegasan sikap tersebut disampaikan setelah dikeluarkannya surat intruksi nomor: 752/PW/A-II/L/IX/2020 yang ditunjukkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur beserta perangkat organisasi dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) beserta perangkat organisasi se-Jawa Timur (<https://jatim.nu.or.id/metropolis/pwnu-jatim-tegaskan-netral-di-pilkada-2020-cFR5y>).



Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ponorogo, DRS. Fathul Azis, MA secara tegas menyatakan tentang netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ponorogo yang akan berlangsung 9 Desember 2020 kemarin. Sikap tersebut sesuai dengan intruksi

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang meminta pengurus NU netral dalam perhalatan politik tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa intruksi dari pusat ini, telah disoialisasikan kepada seluruh kader NU, termasuk yang berada di tingkat akar rumput di wilayah Kabupaten Ponorogo. Beliau juga mengatakan bahwa langkah ini menunjukkan bahwa komitmen PCNU untuk mempertahankan netralitas dan independensi organisasi dalam politik. Untuk diketahui sebelumnya, ada empat poin dalam surat intruksi yang dilayangkan oleh pimpinan wilayah NU untuk semua kadernya. Intruksi ini muncul sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan nama NU dan atributnya dalam menghadapi Pilkada 2020.



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ponorogo menyatakan sikap netral dalam Pemilihan kepala daerah Ponorogo. Pengurus PCNU yang menjadi tim sukses harus nonaktif dari kepengurusan. Keputusan tegas tersebut diambil dari rapat internal PCNU yang dilakukan di Kantor PCNU Ponorogo pada Jum'at 4 September 2020. Rapat tersebut melibatkan jajaran Syuriah dan Tanfidziah PCNU serta Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Ponorogo. Ketua PCNU Ponorogo, mengatakan dalam rapat tersebut seluruh peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait sikap NU Ponorogo pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Berdasarkan masukan dan pendapat, mereka agar NU kembali ke khittah. Artinya dalam Pilkada di Kabupaten Ponorogo untuk bersikap netral. Tujuannya untuk menghindari gesekan antar warga NU”,

(Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Maka dari hasil rapat tersebut, PCNU Ponorogo menyatakan sikap atau maklumat kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo meliputi tiga hal. *Pertama*, PCNU secara kelembangaan dalam Pilkada Ponorogo 2020 bersikap netral. *Kedua*, dalam Pilkada Ponorogo tidak ada kader atau pengurus NU yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati Ponorogo. *Ketiga*, pengurus NU di seluruh tingkatan yang menjadi tim sukses salah satu paslon, harus menonaktifkan dari kepengurusan.

Dengan demikian, PCNU Kabupaten Ponorogo secara konsisten menjalankan kebijakan netral dalam Pilkada tahun 2020, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah hasil dari komitmen organisasi untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung pasangan calon kepala daerah, sejalan dengan prinsip-prinsip dan identitas NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sikap netral ini juga mencerminkan peran dan tanggung jawab PCNU Kabupaten Ponorogo mematuhi intruksi yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur dalam menjaga independensi dan integritas organisasi. Untuk melihat bentuk netralitas politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 kemarin dibuktikan sebagai berikut :

1.1 Tidak memihak salah satu pasangan calon

Tidak memihak salah satu pasangan calon adalah sikap yang sangat penting dalam menjaga integritas dan netralitas sebuah organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada), sikap ini mencerminkan komitmen dari ormas NU untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan tidak memihak calon manapun, Nahdlatul Ulama (NU) menjaga agar perannya tetap sejalan dengan misi dan nilai-nilai organisasinya sebagai sebuah *jam'iyah diniyah ijtima'iyah*, yaitu organisasi yang berfokus pada aspek keagamaan dan kemasyarakatan. Ini adalah langkah yang bijak untuk menghindari potensi konflik internal dan menjaga integritas organisasi sebagai entitas yang berkontribusi positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa campur tangan

dalam urusan politik praktis yang dapat memecah belah masyarakat NU.

Secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memang netral di berbagai tingkatan dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Seperti di tingkat cabang yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Nahdlatul Ulama (NU) itu ormas, bukan lembaga politik atau partai politik. PCNU Ponorogo tidak mendukung pasangan calon manapun pada Pilkada tahun 2020. Kami adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga kaitannya dengan Pilkada tidak mengusung dan tidak mendukung secara organisasi kepada salah satu calon yang berpartisipasi. Lambang NU tidak diperbolehkan dibawa dalam kegiatan politik dan kampanye. Secara organisasi kami tetap netral. Politik di NU secara organisasi itu adalah politik kebangsaan yaitu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga kita terlibat disitu supaya NKRI itu tidak terpecah-pecah. NU dalam konteks politik tersebut, seperti politik dalam konteks mencari posisi politik supaya negara ini tidak terpecah belah. Sehingga secara organisasi kita tidak melakukan politik praktis.”
(Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, PCNU Kabupaten Ponorogo secara organisasi menegaskan bahwa mereka tidak melakukan politik praktis. Sikap yang diampil oleh PCNU Ponorogo adalah netral atau tidak memihak ke salah satu calon kandidat dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar kemarin. Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) islam terbesar yang ada di Kabupaten Ponorogo, tidak mengeluarkan kebijakan atau keputusan resmi sebagai lembaga dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin. Sebagai organisasi keagamaan dan sosial, Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah kekuatan politik yang berperan dalam proses politik secara langsung. Ini berarti Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi tidak memberikan dukungan resmi kepada calon bupati dan wakil

bupati manapun dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersebut. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada peran mereka dalam politik kebangsaan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Dengan demikian, NU di Kabupaten Ponorogo berupaya untuk memainkan peran politiknya dalam mendukung keutuhan negara, tetapi tetap menjaga peran sosialnya sebagai organisasi keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa NU tidak terlibat politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan politik, tetapi berfokus pada menjaga dan melindungi tatanan sosial kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai *islam ahlusunnah wal jama'ah*. Hal ini mencerminkan netralitas yang diambil oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

1.2 Merestui semua pasangan calon

Merestui semua calon dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin merupakan salah satu bentuk netralitas politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo. Dengan merestui semua calon, PCNU Ponorogo menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki preferensi atau dukungan khusus terhadap calon tertentu. PCNU Ponorogo tidak memihak atau mendukung secara eksklusif satu kelompok atau individu dalam kontestasi politik. Merestui semua calon mencerminkan PCNU Ponorogo terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Mereka mengakui bahwa pemilihan umum adalah cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sebagai organisasi kemasyarakatan tidak ingin membatasi atau memengaruhi pilihan masyarakat dengan cara yang bersifat partisan.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo sebagai organisasi kemasyarakatan islam dengan merestui semua calon, maka dapat membantu mencegah polarisasi dan konflik dalam pengurus PCNU di Ponorogo jika tidak mendukung salah satu calon kandidat. Ini adalah upaya untuk memelihara kedamaian dan keharmonisan dalam ormas. Dengan merestui semua calon, PCNU Ponorogo memberikan kebenaran kepada anggotanya dan masyarakat untuk

membuat keputusan politik mereka sendiri tanpa ada tekanan dari organisasi. Ini menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya dan memilih sesuai dengan keyakinannya. Bentuk dari PCNU Ponorogo merestui semua calon dibuktikan dengan Sebelum pemilihan dilaksanakan kedua calon pasangan bupati dan wakil bupati mendatangi kantor (PCNU) Ponorogo untuk meminta doa restu. Pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita yang mengawali kunjungan tersebut. Inti dari kedatangan Sugiri Sancoko beserta segenap rombongan yang hadir ingin meminta doa restu dan dukungan kepada segenap warga Nahdlatul Ulama (NU).



Tidak jauh berbeda pasangan calon Ipong Muchlissoni-Bambang juga membawa misi untuk menyambung silaturahmi dan mohon doa restu kepada Nahdlatul Ulama (NU). Yakni sebagai paslon yang berangkat dari kubu petahana, Ipong turut menyampaikan capaian-capaian yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Dalam hal ini, dapat dibaca agar supaya ke depan kepercayaan masyarakat Ponorogo, khususnya warga NU terhadap kepemimpinan Ipong terus terjaga. Dan melanjutkan kepemimpinan di periode kedua pada pilkada 2020 tersebut.



Kemudian berangkat dari agenda-agenda politik tersebut, PCNU Ponorogo sebagai organisasi tetap menunjukkan sikap politik yang netral. Tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Kami dari PCNU Ponorogo kemarin menerima silaturahmi dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta rombongan. Tentu sebagai tuan rumah harus menerima dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan kemarin, kita akan mendukung siapa pun putra terbaik Ponorogo yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada, karea kita berkepentingan untuk memiliki pemimpin yang baik. Dan prinsip Nahdlatul Ulama (NU) sesuai dengan khittoh, NU itu tidak boleh berpolitik praktis, tetapi juga tidak boleh buta tentang politik. Yang terpenting Ponorogo sebagai kota religius dan kota budaya harus teap dipertahankan dan kembangkan. Siapapun juga nanti bupatinya, kita berharap kalau ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin di Ponorogo di masa yang akan datan”, (Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Merestui semua calon dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin merupakan salah satu bentuk netralitas politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo. Meskipun PCNU Ponorogo menerima kunjungan dari semua pasangan calon dan memberikan doa restu, mereka secara tegas menyatakan tetap netral dalam politik praktis dan tidak memihak memberikan dukunga resmi kepada salah satau pasangan calon. Harapan dari Nahdlatul Ulama (NU) terhadap semua pasangan calon

yang bertarung dalam Pilkada kemarin adalah ingin adanya perubahan di Kabupaten Ponorogo kearah yang lebih baik, religius, dan maju.

1.3 Memberikan kebebasan warganya untuk memilih

Secara lembaga Nahdlatul Ulama (NU) sudah kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi tidak boleh berpolitik. Artinya, Nahdlatul Ulama (NU) bukan lagi sebagai lembaga politik yang bisa terjun langsung dalam politik praktis. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Ketua PCNU Ponorogo memberikan hak sepenuhnya kepada *nahdliyin* untuk mendukung calon tertentu pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin sesuai dengan hak yang dimiliki oleh individu, asalkan tidak mengatasnamakan organisasi dan tetap menjunjung tinggi etika dan norma dalam berpolitik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Masyarakat Ponorogo, khususnya jamaah NU agar terus menjaga perdamaian dan persaudaraan, jangan sampai terpecah belah serta saling bermusuhan hanya karena berbeda politik. Memang NU secara organisatoris saya tegaskan netral. Dengan sikap netral organisasi tersebut memberikan kebebasan kepada jamaah untuk memilih calon yang sesuai hati yang nurani dan pilihan masing-masing. Ya kita berikan hak untuk memilih siapaun. Yang penting tetap rukun, damai. Yang penting warga NU tidak membawa lambang NU dalam kegiatan politik dan kampanye”, (Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Sependapat apa yang disampaikan oleh Zaenal Arifin selaku Ketua MWC NU Kecamatan Slahung:

“Memang kemarin dari ketua PCNU Ponorogo tidak memberikan anjuran atau dorongan kepada warga atau kadernya untuk mendukung salah satu calon sehingga yang dilakukan kemarin hanya memberi arahan untuk memilih calon yang mereka anggap baik”, (Wawancara secara online dengan Zaenal Arifin Ketua MWC NU Kecamatan Balong 12 September 2023).

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi tetap netral dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Nahdlatul Ulama (NU) tetap memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Namun individu-individu warga NU memiliki hak dan kebebasan untuk terlibat dalam politik sesuai dengan kapasitas mereka sebagai warga negara. Sebagai warga NU mereka memiliki hak untuk menyampaikan pandangan politik pribadi dan berpartisipasi dalam proses politik sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka sendiri. Sikap politik pribadi tersebut tidak boleh dicampurkan dengan kepengurusan di NU, maksudnya dalam proses politik tidak boleh menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi. Nahdlatul Ulama (NU) tidak melarang individu untuk berpartisipasi dalam politik praktis.



Hasil dari rapat internal PCNU yang dilakukan di Kantor PCNU Ponorogo pada Jum'at 4 September 2020. Rapat tersebut melibatkan jajaran Syuriah dan Tanfidziah PCNU serta Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Ponorogo. Ketua PCNU Ponorogo memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih secara cerdas pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dimana organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak memberikan ajuran atau dorongan kepada warganya untuk mendukung salah satu calon sehingga yang dilakukan hanya

memberikan arahan untuk memilih calon yang mereka anggap baik. Nahdlatul Ulama (NU) yaitu organisasi sosial keagamaan yang menyatakan netral dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Warga NU dipersilahkan memberikan suara sesuai dengan keputusan dan pilihan hati nurani masing-masing, maksudnya memberikan kebebasan kepada semua anggotanya untuk mendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Sehingga perlu ditegaskan bahwa sikap politik masing-masing pimpinan dan pengurus NU merupakan sikap politik individu bukan sikap organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Mereka bisa membedakan mana yang menyangkut kepentingan individu dan mana yang menyangkut organisasi. Mereka tidak akan mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Selama ini ada hal normatif yang menjadi garis kebijakan NU di dalam menghadapi setiap pergantian calon bupati dan wakil bupati yaitu sebagai organisasi islam tidak dalam kapasitas untuk menentukan sikap politik praktis.

Dalam merespon perkembangan politik, Nahdlatul Ulama (NU) memberikan petunjuk kepada warganya agar tetap menggunakan hak politiknya secara benar dan bertanggung jawab. Hal tersebut tercantum pada lembar Keputusan Mukatam NU Nomor 06/MNU-28/1989 tentang masalah umat yang didalamnya memuat pandangan dan sikap NU terhadap politik pada muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Nahdlatul Ulama (NU) merumuskan pedoman berpolitik bagi warganya dengan menegakkan *al-Akhlak al-Karimah* (akhlak yang mulia), baik berupa etika sosial, maupun norma politik (Wulandari, 2022).

Dengan pedoman ini, keterlibatan warga Nahdlatul Ulama (NU) dengan partai politik bersifat individual, tidak atas nama organisasi. Hal ini ditetapkan karena NU telah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan yang mengurus masalah pendidikan, kemasyarakatan, sosial, dan dakwah. NU mengarahkan kepada warganya agar melakukan aktivitas politik secara benar dan

beranggung jawab. Perilaku politik warga NU dan perilaku lainnya harus berprinsip pada keluhuran akhlak. Sembilan pedoman sikap warga NU dalam bidang politik, tampak seperti di bawah ini yaitu sebagai berikut (Ridho & Zahratan, 2023):

1. Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengalaman ajaran Islam *Ahlussunah wal Jama'ah*.
7. Berpolitik bagi NU, dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dengan suasana persaudaraan, *tawadhu'* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).
9. Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dengan pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Sembilan pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) ini untuk mempertegas khittah NU 1926, dapat dipahami bahwa sikap politik warga NU dalam politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan. Kekuasaan memiliki jangka waktu tertentu, sedangkan politik kebangsaan yang dikembangkan oleh NU adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. NU bukan sebagai lembaga politik tetapi bukan berarti membuat warga NU pasif dalam berpolitik. Sehingga pedoman berpolitik yang dikeluarkan pada dalam Mukhtamar ke-26 ditujukan kepada warga NU yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik dan ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis dan konstitusional. Di mana warga Nahdlatul Ulama (NU) berhak dan berkewajiban untuk mengikuti serta menaati Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu warga NU khususnya pengurus PCNU Ponorogo juga berhak untuk mengikuti proses demokrasi Pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 di Kabupaten Ponorogo. Pengurus PCNU Ponorogo berhak untuk dipilih serta memilih dalam mengikuti pesta demokrasi. Namun, dalam memilih dan dipilih pengurus PCNU Ponorogo tidak boleh mengatasnamakan NU.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang mengambil posisi netral maksudnya tidak terlibat dalam ranah politik praktis terhadap salah

satu pasangan calon. Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo melalui khittahnya menegaskan bahwa: *Pertama*, Nahdlatul Ulama (NU) adalah gerakan islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat sehingga tidak mempunyai hubungan organisatoris dan bukan merupakan afiliasi dari suatu partai politik. *Kedua*, setiap warga NU sesuai dengan hak bebas untuk menyalurkan aspirasi melalui organisasi lain atau partai politik. Dari fatwa khittah tersebut jelas bahwa persoalan politik sepenuhnya diserahkan pada kehendak individu masing-masing pengurus PCNU Ponorogo. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, tetapi anggota-anggotanya memiliki kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas politik. NU memberikan kebebasan anggotanya untuk terlibat dalam politik praktis sesuai dengan hak pribadinya tetapi mereka tidak boleh menggunakan organisasi sebagai alat untuk kepentingan pribadi.

Secara kelembagaan Nahdlatul Ulama (NU) membebaskan warganya dalam menentukan sikap politiknya. Nahdlatul Ulama Ponorogo berpendapat, dengan kenetralan dan ketidak berpihakan warga Nahdlatul Ulama secara langsung terhadap salah satu pasangan calon dikarenakan mengingat akan dampak yang diterima oleh Nahdlatul Ulama (NU), seperti: *Pertama*, warga Nahdlatul Ulama (NU) akan diklaim bergabung dengan salah satu tim sukses atau partai politik pengusung pasangan calon bupati dan akhirnya afiliasi Nahdlatul Ulama (NU) akan dikaitkan dengan salah satu pasangan calon; *Kedua*, Nahdlatul Ulama (NU) akan terkena imbas apabila tokoh atau partai politik yang didukung tersebut nantinya bermasalah sehingga akan berimbas pada Nahdlatul Ulama (NU) secara kelembagaan. NU memiliki peran politik kebangsaan yaitu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencari posisi politik guna menjaga tatanan sosial kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam *ahlussunnah wal jama'ah*.

B. Perbedaan Preferensi Politik Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo

Dalam hal berpolitik, pengurus PCNU Kabupaten Ponorogo memiliki kesadaran secara utuh bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik, serta memiliki perhatian terhadap input dan output dalam sistem politik. Seperti beberapa pengurus PCNU Ponorogo ikut berpartisipasi dalam rangkaian politik, khususnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin, sehingga membuat adanya perbedaan

preferensi politik di dalam kepengurusan PCNU Ponorogo. Secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) netral dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, tetapi masing-masing pengurus PCNU Ponorogo berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya mungkin aktif di partai politik yang berbeda atau pekerjaan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa masing-masing pengurus PCNU Ponorogo dapat memiliki sikap politik yang berbeda, yang mencerminkan preferensi pribadi mereka. Adanya perbedaan preferensi politik di kepengurusan NU memang tidak menyalahi aturan organisasi, karena NU membebaskan kader atau pengurusnya dalam menentukan pilihan politik praktis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Tetapi selaku pribadi warga negara itu hak-hak politiknya dijamin oleh negara. Maka hak-hak itu dipergunakan untuk memilih seorang pemimpin, karena mereka setiap hari bersama-sama otomatis kecocokan kira-kira mana yang lebih cocok, tetapi dalam kapasitas sebagai warga Ponorogo warga negara yang mempunyai hak pilih. Maka harus dibedakan antara kebijakan organisasi, kebijakan pengurus, kebijakan diri sebagai warga negara. Sehingga ini yang dilakukan adalah sebagai kapasitas diri sebagai warga negara. Tidak boleh kita abai dalam proses politik, karena itu nantinya akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sehingga masing-masing individu warga NU menghimpun diri, silaturahmi, kecocokan kira-kira mana yang pas. Kalau ada keterpilihan itu sebagai pribadi, ya secara otomatis ada beberapa pasang tidak mungkin tidak ada keterpilihan yang dipilih. Bukan saya pribadi-pribadi warga NU, ya saya selaku ketua PCNU Ponorogo menjaga bagaimana ini tidak bercampur antara sikap politik pribadi dengan kepengurusan di NU. Jadi begitu mereka melibatkan diri dalam proses politik itu, tidak boleh menggunakan organisasi karena itu adalah sikap politik pribadi”, (Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Perbedaan preferensi politik di kalangan pengurus PCNU Ponorogo adalah hal yang wajar dan merupakan hak pribadi masing-masing individu. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) netral secara resmi dalam konteks politik praktis, tetapi hal ini tidak membatasi hak politik individu untuk memilih sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. PCNU Ponorogo memahami bahwa pilihan politik adalah masalah pribadi dan hak setiap individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Meskipun ada perbedaan pendapat antara pengurus PCNU Ponorogo, hal ini dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan hak untuk memiliki preferensi politik masing-masing. Ketidaksamaan suara dalam mendukung calon kandidat pada Pilkada kemarin adanya alasan yang cukup beragam. Pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 kemarin ada perbedaan pendapat antara pengurus PCNU Ponorogo. Hal tersebut dibuktikan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita

Perbedaan preferensi politik pengurus PCNU Ponorogo mencerminkan keragaman pandangan politik yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, sebagian pengurus PCNU Ponorogo memilih untuk mendukung pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan pribadi mereka dan keyakinan bahwa pasangan tersebut mewakili nilai-nilai dan program-program yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Dukungan terhadap pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita menjadi hasil dari pemahaman bahwa mereka memiliki visi dan rencana yang dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Ponorogo. Sebagai anggota masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan daerah, beberapa pengurus PCNU Ponorogo mungkin bahwa pasangan tersebut memiliki komitmen untuk memajukan Kabupaten Ponorogo dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, dukungan ini juga bisa menjadi ekspresi dari hak politik individu yang dijalankan oleh pengurus PCNU Ponorogo. Meskipun Nahdlatul Ulama (NU) secara organisasi netral dalam politik praktis, pengurus PCNU Ponorogo memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih calon yang mereka yakini sebagai pemimpin yang terbaik.

Perbedaan preferensi ini adalah contoh bentuk konkret pandangan yang ada di masyarakat, bahkan di dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Ini juga menunjukkan bahwa dalam sebuah demokrasi, individu memiliki hak untuk berpendapat dan memilih sesuai dengan keyakinan mereka, yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kebebasan dalam berpolitik. Beberapa pengurus PCNU Ponorogo telah menyatakan dukungan mereka kepada pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo :

“Pengurus PCNU Ponorogo aktif dalam berpolitik baik dalam memberikan masukan, bersikap dan lain-lainnya. Seperti beberapa pengurus dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini sangat antusias. Kemarin pada pemilihan bupati dan wakil bupati kebetulan mayoritas pengurus NU di Ponorogo lebih banyak mendukung Sugiri Sancoko. Kebetulan yang jadi pengurus NU kebetulan hampir 85%

mendukung pak Sugiri. Karena Pengurus NU tidak bodoh-bodoh amat sekarang. Secara pribadi berfikir kira-kira siapa yang biasa diajak untuk berjuang membantu saya bersama dan membantu di NU. Berfikirnya individu tetapi kemanfaatannya untuk jammiyah. Jadi NU tidak bodoh-bodoh amat kayak tahun kemarin. Saya termasuk pengurus NU yang mendukung penuh Pak Sugiri Sancoko. Saya kemarin menjadi ketua tim pemenangan resminya pak Sugiri Sancoko. Bukan hanya mendukung justru saya bertanggung jawab penangkalannya Pak Sugiri Sancoko”, (Wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo 27 Juni 2023).

Hasil wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo, mengungkapkan bahwa sebagian besar pengurus PCNU Ponorogo dengan antusiasnya mendukung pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Dukungan ini merupakan ekspresi dari hak politik individu mereka dan bukan hasil dari tekanan atau kebijakan organisasi NU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NU sebagai organisasi bersikap netral dalam politik praktis, anggota dan pengurusnya memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan dan penilaian pribadi mereka. Sugeng Hariono menjelaskan bahwa para pengurus Nahdlatul Ulama (NU) yang mendukung pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita melihat dukungannya sebagai peluang untuk aktif berkontribusi dalam memajukan masyarakat dan juga untuk memperkuat organisasi NU secara keseluruhan. Sugeng Hariono, sebagai wakil ketua PCNU Ponorogo, tidak hanya memberikan dukungan pribadi, tetapi juga mengambil tanggung jawab sebagai ketua tim pemenangan resmi pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo. Tindakan ini menunjukkan tingkat komitmen dan peran aktif dari pengurus NU Ponorogo dalam mendukung pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari pengurus NU Ponorogo tidak hanya sebatas dukungan retorika atau simpati, tetapi juga melibatkan tindakan nyata untuk memastikan kemenangan pasangan calon yang mereka dukung dalam Pilkada.

Hal sama juga disampaikan oleh Ilham selaku ketua GP Ansor yang mengungkapkan bahwa:

“Saya kemarin memilih Pak Sugiri, karena beliau dulu pernah juga sebagai Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah (PW) Ansor Jawa Timur.

Maka dari itu saya kemarin lebih condong ke Pak Sugiri”, (Wawancara dengan Ilham selaku ketua GP Ansor Ponorogo 17 Juni 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh K.H. Moh Sholihan selaku Rais Syuriah mengungkapkan bahwa:

“Saya kemarin mendukung Sugiri Sancoko karena beliau layak memimpin Kabupaten Ponorogo, ditambah beliau sangat menginginkan Kabupaten menjadi kota santri yang berbudaya. Pengalaman Sugiri Sancoko di Komisi E DPRD Jawa Timur merupakan modal yang baik untuk menciptakan dan menggali UMKM yang ada di Kabupaten ini. Kita melihat banyak seklai UMKM yang belum tersentuh oleh pemerintahan kabupaten, padahal mempunyai potensi didalamnya. Selain itu alasan saya mendukung Sugiri Sancoko beliau juga mempunyai gaya komunikasi yang baik. Keterpilihan saya ke Sugiri Sancoko merupakan hak pribadi saya dalam menentukan pilihan bukan atas permintaan seseorang apa lagi permintaan dari Sugiri Sancoko”, (Wawancara dengan K.H. Moh Sholihan selaku Rais Syuriah).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa alasan mengapa sebagian pengurus PCNU Ponorogo dan anggota organisasi lainnya mendukung pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo. Beberapa pengurus PCNU Ponorogo merasa bahwa Sugiri Sancoko-Lisdyarita memiliki pengalaman yang cukup, terutama kemarin pernah menjadi menjadi Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah (PW) Ansor Jawa Timur. Pengalaman ini dianggap sebagai modal yang baik untuk memimpin Kabupaten Ponorogo. Sugiri Sancoko memiliki program pembangunan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebagian pengurus NU. Misalnya, keinginan untuk menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai "kota santri yang berbudaya" dianggap sebagai tujuan yang baik. Mereka juga menyoroti potensi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, serta gaya komunikasi baik yang dimiliki oleh Sugiri Sancoko. Yang paling penting, para narasumber menekankan bahwa dukungan mereka adalah hak pribadi yang tidak dipengaruhi oleh permintaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Sugiri Sancoko sendiri. Ini menunjukkan bahwa keputusan mereka untuk mendukung pasangan tersebut didasarkan pada keyakinan pribadi mereka dan pandangan mereka tentang bagaimana pasangan tersebut dapat mengabdikan kepada masyarakat dan organisasi mereka.

Pengurus PCNU Ponorogo memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik. Mereka menganggap politik sebagai sarana untuk memberikan masukan dan pengaruh dalam sisten politik. Namun terdapat perbedaan preferensi politik di antara mereka, terutama dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin, dimana mayoritas pengurus PCNU Ponorogo mendukung Sugiri Sancoko-Lisdyarita atau hampir 85% mendukung Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Dukunga mereka mencerminkan pemikiran kolektif yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dalam hal ini, pengurus PCNU Ponorogo tidak hanya melihat aspek politik semata, tetapi mereka juga membawa harapan besar bahwa pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita akan menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi seluruh warga Ponorogo. Dukungan ini dipandang sebagai wujud dari keinginan bersama untuk melihat Ponorogo semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan pasangan calon tersebut.

2. Memberikan dukungan pasangan calon Ipong Muchlissoni-Bambang Tri W.

Selain mendukung pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita, terlihat bahwa ada keragaman dalam dukungan yang berikan oleh pengurus PCNU Ponorogo dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Beberapa di antara mereka juga memberikan dukungan kepada pasangan calon Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono, mencerminkan beragam pandangan politik yang ada di dalam organisasi tersebut. Dukungan terhaap pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono mungkin didasarkan pada pertimbangan pribadi yang berbeda dengan mereka yang mendukung pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita.

Para pengurus PCNU Ponorogo yang mendukung pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono mungkin memiliki alasan dan keyakinan tertentu yang membuat mereka memilih pasangan ini sebagai pilihan mereka dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dukungan tersebut bisa dipahami sebagai ekspresi hak politik individu mereka, yang memungkinkan mereka untuk memilih sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi yang mereka yakini. Terdapat beragam faktor yang dapat mempengaruhi keputusan dukungan individu ini,

seperti pandangan tentang program-program pasangan calon, rekam jejak mereka, atau bahkan pertimbangan pribadi lebih mendalam.

Dalam sebuah organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), dimana pluralitas politik adalah hal yang umum, dukungan terhadap pasangann yang berbeda mencerminkan keragaman anggota dan pengurusnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota NU, meskipun terlibat dalam organisasi keagamaan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki preferensi politik yang berbeda-beda. Terlepas dari perbeaan panangan politik, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi tetap berkomitmen untuk tetap neral dalam politik prkatis dan fokus pada peran serta dalam politik kebangsaan yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, keragaman dukungan politik ini adalah bagian alami dari dinamika dalam sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Keberagaman dukungan ini juga mencerminkan pentingnya proses demokrasi dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana individu memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan pemikiran mereka sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Nasruddin selaku wakil sekretaris PCNU yang mengungkapkan bahwa :

“Di NU tidak aturan untuk mendukung siapa dalam politik praktis seperti Pilkada 2020 kemarin, NU sebagai ormas memberi kebebasan pada kadernya termasuk pengurus NU dalam pemilihan kemarin. Saya kemarin mendukung pasangan nomor urut dua yaitu Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono dan pengurus NU lainnya memang tidak mempermasalahkan hal itu. Alasan saya kemarin mendukung Pak Ipong yaitu karena saya kemarin berada di partai pengusung dari Pak Ipong, maka dari itu saya harus mendukung Pak Ipong, kalau sampai saya tidak mendukung saya kan dicopot dari pekerjaanya. Jadi bisa dibilang sikap politik di pengurus NU ini memang beraga”, (Wawancara secara online dengan Agus Nasruddin selaku wakil sekretaris PCNU).

Hasil wawancara dengan Agus Nasruddin selaku wakil sekretaris PCNU Ponorogo mencerminkan bahwa keberagaman dukungan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo adalah hasil dari proses demokrasi yang dijunjung tinggi. NU sebagai organisasi memberikan kebebasan kepada kader-kadernya, termasuk pengurus NU, untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan pemikiran mereka dalam pemilihan kepala daerah. Agus

Nasruddin sendiri memberikan dukungan kepada pasangan calon Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono karena beliau berada di partai yang mengusung pasangan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan dukungan politik Agus Nasruddin didasarkan pada faktor partai politik dan komitmen yang dijalankan dalam konteks politik praktis. Hal ini menegaskan bahwa dalam Pilkada, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan pemikiran dan keyakinan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut di dalam proses pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh K.H. Muchtar Sunarto selaku wakil Rais Syuriah mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya figur Ipong Muchlissoni dirasa paling layak dari segi finansial, gaya komunikasi yang baik ke masyarakat, dan secara fisik mumpuni untuk mengemban amanah ini. Selain itu, janji politik yang beliau paparkan ketika kampanye, dimana beliau lebih menekankan pada sektor ekonomi masyarakat maka saya tertarik pada program prioritasnya, seperti berusaha menekan penyakit sosial dan ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dalam segi pendidikan beliau juga menjanjikan akan memberikan perhatian khusus kepada madrasah diniyah. Dimana madrasah tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Janji politik selanjutnya akan mengikut sertakan NU dalam kegiatan pemerintah. Bentuk dukungan kemarin seperti mensosialisasikan calon kepada masyarakat dan kita juga kemarin mengadakan pengajian”, (Wawancara dengan K.H. Muchtar Sunarto selaku wakil Rais Syuriah).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, alasan yang menjadi dasar dukungannya terhadap Ipong Muchlissoni. Pertama, ia menyebutkan bahwa Ipong Muchlissoni dianggap paling layak dari segi finansial, yang menunjukkan keyakinannya bahwa Ipong memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk memimpin Kabupaten Ponorogo. Kedua, gaya komunikasi yang baik ke masyarakat merupakan faktor penting, dan Ipong dilihat memiliki kemampuan tersebut. Ketiga, secara fisik, Ipong dianggap mumpuni untuk mengemban amanah sebagai pemimpin daerah. Selain itu, juga menyebutkan beberapa janji politik yang diusung oleh Ipong Muchlissoni selama kampanye. Dalam hal ini, Ipong menekankan prioritasnya pada sektor ekonomi masyarakat, dengan upaya untuk mengurangi penyakit sosial dan ketimpangan sosial yang ada di Kabupaten Ponorogo. K.H. Muchtar Sunarto menyatakan bahwa ia

tertarik pada program-program prioritas ini. Selanjutnya, Ipong juga menjanjikan perhatian khusus kepada madrasah diniyah, yang menurut K.H. Muchtar Sunarto, kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Terakhir, janji politik Ipong untuk mengikutsertakan NU dalam kegiatan pemerintah juga disoroti, menunjukkan komitmen Ipong untuk melibatkan NU dalam proses pembangunan daerah. Bentuk dukungan kemarin seperti mensosialisasikan calon kepada masyarakat dan kita juga kemarin mengadakan pengajian juga menggambarkan cara konkrit di mana dukungan politik dilakukan oleh beberapa anggota pengurus NU Ponorogo kepada pasangan calon Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono dengan menginformasikan dan meyakinkan masyarakat tentang pilihan mereka. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi aktif dalam proses politik yang melibatkan sosialisasi dan penyampaian pesan kepada pemilih.

Keragaman preferensi politik di kalangan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo selama pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin. Bahwa dalam Nahdlatul Ulama (NU) tidak ada peraturan yang mengikat atau yang memaksa pengurus untuk mendukung kandidat tertentu dalam politik praktis seperti Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kemarin. NU sebagai organisasi memberikan kebebasan kepada anggotanya, termasuk pengurus NU Ponorogo untuk memilih kandidat yang mereka dukung. Dalam hasil wawancara tersebut, menyatakan beliau mendukung pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono. Alasannya adalah karena beliau memiliki afiliasi dengan partai yang secara resmi mengusung kandidat tersebut. Beliau merasa ada kewajiban pribadi untuk mendukung pasangan tersebut karena keterlibatannya dalam partai tersebut.

3. Bersikap netral

Selain bersikap mendukung pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita dan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono, ternyata ada juga pengurus PCNU Ponorogo yang memilih untuk bersikap netral dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin. Sikap netral ini mencerminkan keragaman pandangan dan preferensi di kalangan pengurus PCNU Ponorogo. Pengurus PCNU Ponorogo yang bersikap netral juga memperkuat gagasan bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah, individu memiliki kebebasan untuk memilih

sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing termasuk pilihan untuk tidak berpihak pada salah satu calon.

Tidak hanya itu, pengurus NU Ponorogo juga ada yang memilih untuk bersikap netral dalam kontestasi politik tahun 2020 kemarin. Hal ini diungkapkan oleh Zaenal Arifin selaku Ketua MWC NU Kecamatan Slahung :

“Memang selama saya selama menjadi ketua MWC NU tidak melibatkan diri dan tidak paham dalam urusan politik praktis. Mengenai Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kemarin dari PCNU memang tidak ada keharusan untuk menentukan siapa calon yang harus dipilih, dan menurut kami memang sebagai pengurus Nahdlatul Ulama (NU) tingkat apa saja, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam kancah politik apapun, karena menurut saya NU bukan merupakan alat yang bisa di mainkan untuk kepentingan politik praktis. Memang banyak dari warga NU yang aktif di partai politik, tetapi bukan karena serta merta mewakili NU, ia meminta agar aktor politik mengandalkan kredibilitas untuk meraup suara, tetapi bukan karena NU. Partisipasi saya dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin, datang ke TPS untuk memberikan suara dan penentuannya ada di balik suara, yang penting kita harus menggunakan hak pilih kita tidak boleh golput”, (Wawancara secara online dengan Zaenal Arifin Ketua MWC NU Kecamatan Balong 12 September 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Suprawito selaku Ketua MWC NU Kecamatan Balong yang mengungkapkan bahwa :

“Saya kemarin pada Pilkada tidak memihak salah satu pasangan calon, alasan yang mendasari saya untuk bersikap netral adalah khittah 1928 yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh ikut dalam kegiatan politik. Hal itulah yang menyebabkan saya tidak memihak kepada calon manapun. Walaupun saya kemarin netral tidak berpihak kepada salah satu pasangan tetapi saya merestui kedua calon pasangan tersebut”, (Wawancara secara online dengan Suprawito Ketua MWC NU Kecamatan Balong 12 September 2023).

Hasil wawancara mengungkapkan sikap netral yang dipengang oleh pengurus Nahdlatu Ulama (NU) Ponorogo selama kontestasi politik tahun 2020 kemarin. Beliau mengatakan tidak terlibat dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang urusan politik praktis. Beliau menekankan bahwa dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kemarin, tidak ada keharusan dari pihak PCNU Ponorogo untuk menentukan pilihan terhadap calon tertentu. Menurut

pandangan beliau, pengurus NU di tingkat apapun tidak seharusnya terlibat dalam politik praktis. Alasan untuk bersikap netral juga karena kembalinya khittah NU yang menegaskan bahwa NU seharusnya menjaga netralitas dalam kegiatan politik. Ini mencerminkan pemahaman bahwa NU, sebagai organisasi keagamaan, harus menjaga independensinya dalam konteks politik dan tidak terlibat secara aktif dalam mendukung calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah. Beliau juga menekankan bahwa NU tidak boleh dianggap sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Meskipun banyak dari warga NU yang aktif di partai politik, mereka melakukan bukan karena atas nama NU tetapi sebagai individu yang berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan mengandalkan kredibilitas mereka sendiri untuk mendapatkan dukungan pemilih. Baginya partisipasinya dalam Pilkada tahun 2020 kemarin adalah untuk memberikan suara dengan mendukung proses demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya.

Maka dapat diambil kesimpulan keterlibatan pengurus PCNU Ponorogo di panggungan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin memiliki peran sebagai berikut :

1. Sebagai aktor yaitu berperan sebagai tim sukses atau tim pemenangan

Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo pun demikian, setiap pasangan yang maju mempunyai tim sukses masing-masing. Tim sukses yang bekerja untuk memenangkannya di Pilkada Kabupaten Ponorogo ini tidak hanya berasal dari partai pengusungnya. Berkat komunikasi yang baik dan berkala yang dilakukan oleh calon, akhirnya ia didukung oleh Nahdlatul Ulama yang notabennya adalah organisasi sosial keagamaan dan salah satu organisasi terbesar terutama di Kabupaten Ponorogo. Pengurus PCNU Ponorogo dapat dikatakan sebagai aktor politik yang berperan sebagai tim sukses atau tim pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Para pengurus dan anggota PCNU Ponorogo secara aktif terlibat dalam mendukung pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Mereka tidak hanya memberikan dukungan retorika, tetapi juga terlibat dalam aktivitas seperti menjadi ketua tim pemenangan resmi pasangan calon tersebut. Mereka aktif dalam memberikan masukan, bersikap, dan berperan aktif dalam memenangkan pasangan calon yang mereka dukung.

Pengurus dan anggota PCNU Ponorogo yang mendukung pasangan calon tersebut berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan berkontribusi pada kampanye serta upaya untuk memenangkan pasangan tersebut dalam Pilkada. Ini mencerminkan peran aktif mereka dalam proses politik lokal dan komitmen mereka terhadap pasangan calon yang mereka yakini sebagai pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, PCNU Ponorogo dapat dianggap sebagai salah satu aktor politik yang berperan dalam pemilihan tersebut, khususnya sebagai tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon tertentu, yaitu Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Mereka berperan dalam mengorganisir, mensosialisasikan, dan mendukung pasangan tersebut dalam upaya memenangkan Pilkada di Kabupaten Ponorogo.

2. Sebagai pendukung yaitu mendukung terhadap calon bupati dan wakil bupati

Pengurus PCNU Ponorogo sebagai pendukung yaitu mendukung terhadap calon bupati dan wakil bupati mengacu pada peran aktif PCNU Ponorogo dalam mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pengurus tersebut bukan hanya pemilih pasif, melainkan mereka secara aktif terlibat dalam proses politik Pilkada dengan memberikan dukungan mereka kepada calon bupati dan wakil bupati tertentu.

Bentuk dukungan PCNU Ponorogo terhadap pasangan calon kandidat tersebut dibuktikan dengan menjadi tim sukses atau tim pemenangan. Mensosialisasikan calon pasangan kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi tentang mereka serta menjelaskan alasan dukungan mereka. Mengadakan pengajian atau acara keagamaan sebagai bagian dari kampanye yang bertujuan untuk memperkenalkan dan meyakinkan masyarakat tentang pilihan politik mereka. Keterlibatan dalam partai politik yang secara resmi mengusung pasangan tersebut dan merasa memiliki kewajiban untuk mendukungnya. Dukungan ini mencerminkan peran aktif mereka dalam proses politik dan keinginan untuk memengaruhi hasil pemilihan dengan memilih pasangan calon yang mereka yakini.

3. Sebagai partisipan yaitu hanya memberikan restu pada semua calon bupati dan wakil bupati tetapi tidak terlibat dalam saling dukung mendukung.

Pengurus PCNU Ponorogo bertindak sebagai partisipan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dengan memberikan restu kepada semua calon bupati dan wakil bupati yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Mereka secara tegas menyatakan netralitas politik dengan tidak terlibat dalam saling mendukung calon tertentu. PCNU Ponorogo menekankan bahwa mereka tidak memberikan dukungan resmi kepada salah satu pasangan calon dan bahwa pengurus NU di tingkat apapun seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Mereka hanya memberikan doa restu dan tidak memihak secara aktif kepada calon tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa PCNU Ponorogo menjaga independensinya sebagai organisasi keagamaan dalam konteks politik dan tidak memanfaatkan NU sebagai alat untuk kepentingan politik praktis. Sebagai gantinya, anggota NU yang terlibat dalam partai politik melakukan itu atas nama pribadi mereka sendiri dan bukan atas nama NU.

Dilihat dari sikap dan partisipasi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dalam politik praktis, maka termasuk ke dalam tipe budaya politik partisipatif. Budaya politik menurut Almond dan Verba, budaya politik menunjuk kepada suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Sedangkan pengertian dari budaya politik partisipatif adalah salah satu tipologi budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.

Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo menunjukkan kesadaran politik yang sangat tinggi dan keinginan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mereka terlibat dalam pemilihan umum dan berupaya memberikan dukungan aktif kepada kandidat yang mereka pilih. Beberapa di antara mereka bahkan terlibat secara langsung dalam kampanye sebagai ketua tim pemenang. Masing-masing pengurus NU Ponorogo dalam hal ini menyadari bahwa dirinya warga negara yang aktif dalam bersikap partisipatif sehingga dapat disebut juga sebagai orang yang memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi. Dengan adanya kesadaran politik yang tinggi tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan sikap politik dalam kepengurusan PCNU Ponorogo, masing-masing individu mendukung pasangan sesuai dengan pilihannya. Budaya politik partisipatif di kalangan pengurus PCNU Ponorogo mencerminkan tingkat partisipasi aktif, kesadaran politik yang tinggi, dan penerimaan terhadap perbedaan sikap politik dalam organisasi. Mereka memahami pentingnya berpartisipasi dalam politik sebagai hak dan kewajiban warga negara, namun juga

memperhatikan faktor kepentingan pribadi juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik juga dapat mengakibatkan pemihakan dan perbedaan preferensi politik di antara pengurus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo menilai adanya perbedaan sikap politik di kepengurusan PCNU Ponorogo sangat wajar, menurutnya :

“Menurut saya sangat wajar kalau adanya perbedaan sikap politik di kepengurusan organisasi, termasuk di PCNU Ponorogo. Kita berfikir lebih dewasa, ya tidak apa-apa namanya orang berpolitik itu kan bebas. Cara berfikir masing-masing orang kan kita bisa menganalisa kita tahu dia disana bergabung ini, karena dia sedang kepentingan pribadi. Kalau tujuannya sama pasti akan ketemu, tetapi kalau tujuannya tidak sama karena beda kepentingan ya insyaallah dia akan bergeser ke sana. Dan itu kita hargai dan hormati. Contoh pada Pilkada kemarin, karena partai pengusungnya beliau itulah yang menguasai kegiatan dari pada program-program pemerintah kalau sampai dia tidak mendukung, dia akan dicopot dari kegiatannya. Kita harus pahami, ya sudah kamu ada disitu saja karena sumber ekonomimu yang mengatur sebelah. Ya tidak apa-apa saya hargai, daripada saya memaksakan terus sumber kehidupan dia diputus otomatis saya membebaskannya. Makanya ini belajar perbedaan kita harus guyup rukun tergantung visi misinya apa bagaimana, ya sudah kita tidak boleh menghujatnya”, (Wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo 27 Juni 2023).

Hasil wawancara menunjukkan, perbedaan sikap politik di kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dianggap wajar dan diterima. Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpolitik sesuai dengan pilihan dan kepentingannya sendiri. Perbedaan sikap politik dalam organisasi adalah hal yang wajar. Setiap orang memiliki pemikiran yang dewasa, dan hal itu tidak masalah karena berpolitik adalah hak yang bebas bagi setiap individu. Setiap orang bisa memiliki cara berpikir dan analisis yang berbeda-beda, serta memiliki kepentingan pribadi yang berbeda. Jika tujuan akhirnya sama, mereka akan bersatu dan bekerja sama. Namun, jika tujuan mereka berbeda karena kepentingan yang berbeda pula, maka secara wajar individu tersebut akan cenderung mendukung pilihan yang sejalan dengan kepentingannya. Misalnya dari Pilkada kemarin, dimana kegiatan PCNU Ponorogo dipengaruhi oleh partai politik yang mendukung pasangan tertentu. Jika seseorang itu tidak mendukung pasangan tersebut, dia bisa dipecat dari kegiatan tersebut. Hal ini disadari dan menghormati perbedaan tersebut. Perbedaan ini perlu dipahami dan dihargai, karena jika seseorang dipaksa untuk terus berada di posisi yang berbeda dengan kepentingannya itu bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, penting untuk belajar menghargai perbedaan dan tetap menjaga kerukunan dalam organisasi tanpa saling menghujat atau memusuhi satu sama lain.

Adanya perbedaan sikap politik memang hal yang wajar di lingkungan organisasi terlebih di PCNU Ponorogo. PCNU Ponorogo atau masing-masing pengurus tentu melihat terlebih dahulu para peserta pemilihan bupati dan wakil bupati yang menjadi peserta pemilihan umum di dalamnya sebelum akhirnya menentukan sikapnya. Pengurus NU Ponorogo menentukan pilihan politiknya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun atau dari pengurus lainnya. Sikap politik masing-masing individu ditentukan setelah mengetahui latar belakang keterlibatan para calon menjadi peserta pemilu, menilai pasangan mana yang pantas didukung dan dipilih dan hal lainnya. Maka wajar ketika pilihan politik masing-masing pengurus berbeda, karena penilaian seseorang dapat berbeda-beda pula.

Perbedaan sikap politik di kepengurusan PCNU Ponorogo dianggap wajar dan diterima. Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpolitik sesuai dengan pilihan dan kepentingannya sendiri. Perbedaan sikap politik dalam organisasi adalah hal yang wajar. Setiap orang memiliki pemikiran yang dewasa, dan hal itu tidak masalah karena berpolitik adalah hak yang bebas bagi setiap individu. Perbedaan sikap politik memang hal yang sangat biasa di lingkungan organisasi terlebih di pengurus NU Ponorogo, karena masing-masing individu memiliki orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang disebut sebagai komponen orientasi politik.

Orientasi kognitif menunjukkan pada bagaimana pengetahuan seseorang terhadap objek politik atau aktor politik, dalam hal ini masing-masing pengurus NU Ponorogo memiliki pengetahuan tentang calon bupati dan wakil bupati yang bertarung di Pilkada tahun 2020. Para pengurus juga memiliki pengetahuan mengenai calon-calon yang menjadi peserta pemilihan tersebut, termasuk latar belakang keterlibatan mereka dalam berpolitik. Pengetahuan ini membantu mereka dalam membuat keputusan politik dan menentukan sikap berpolitik yang sesuai dengan pandangan pribadi dan kepentingan organisasi. Pengetahuan ini merupakan landasan awal dalam pembuatan keputusan politik mereka dan menjadi faktor penting dalam pengaruh mereka terhadap sistem politik.

Kemudian orientasi afektif, orientasi ini menunjuk pada perasaan seseorang mengenai sistem politik, peran dan perilaku aktor politik. Sehingga individu dapat bersikap menerima atau menolak. Orientasi afektif dalam hal ini juga mencakup kesadaran politik yang tinggi, kesiediaan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat politik di dalam organisasi. Beberapa pengurus memilih untuk mendukung kandidat tertentu karena mereka melihat manfaat bagi organisasi (NU) atau memiliki keterkaitan personal dengan kandidat tersebut. Namun, ada juga yang memilih

untuk bersikap netral, menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan prinsip-prinsip kesetiaan terhadap khittah NU daripada afiliasi politik pribadi. Terakhir orientasi evaluatif yang menunjukkan pada bentuk penilaian individu terhadap sistem politik atau aktor politik. Dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 pengurus NU Ponorogo atau masing-masing pengurus tentu menilai terlebih dahulu para peserta calon bupati dan wakil bupati sebelum akhirnya menentukan sikapnya.

Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo menekankan bahwa mereka membuat keputusan politik secara independen tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pengurus NU lainnya. Mereka menjelaskan bahwa keputusan politik yang mereka ambil didasarkan pada penilaian dan pertimbangan yang matang, yang mencakup pemahaman tentang latar belakang serta keterlibatan calon kandidat dalam pemilihan umum, menilai pasangan mana yang pantas untuk didukung dan dipilih dan hal lainnya. Mereka juga mengungkapkan bahwa perbedaan dalam preferensi politik di antara anggota NU adalah hal yang wajar dan dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap individu memiliki penilaian dan pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kandidat dan isu-isu politik tertentu. Oleh karena itu, perbedaan dalam pilihan politik merupakan refleksi dari kebebasan bersikap dan berpikir yang dihargai dalam organisasi NU. Kebebasan bersikap dan adanya perbedaan pandangan bagi pengurus NU memang sejalan dengan aturan yang terdapat pada sembilan pokok pedoman bagi warga NU dalam bidang politik. Jadi, para pengurus NU Ponorogo dalam menentukan sikapnya, tetap mengacu pada pedoman yang telah diatur. Sehingga para pengurus harus tetap menjunjung tinggi persatuan, menghormati perbedaan, dan berkomitmen untuk mencapai kemaslahatan dan kepentingan organisasi secara bersama.

Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian di lapangan terkait dengan perbedaan preferensi politik pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dalam Pilkada tahun 2020 kemarin. Pengurus NU Ponorogo memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menganggap penting untuk berpartisipasi dalam proses politik. Adanya perbedaan preferensi politik di antara pengurus NU Ponorogo, terutama dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Mayoritas pengurus NU Ponorogo mendukung Sugiri Sancoko, ada juga yang mendukung Ipong Muchlissoni, dan ada juga yang netral. Walaupun terdapat perbedaan preferensi politik, pengurus NU Ponorogo menganggap perbedaan ini sebagai sesuatu yang wajar dan terima. Mereka menghormati hak setiap individu untuk membuat keputusan politik secara independen. Faktor-faktor yang menyebabkan pengurus NU Ponorogo

berbeda dukungan atau adanya perbedaan preferensi politik dalam Pilbub tahun 2020 kemarin adalah faktor internal NU yang memberikan kebebasan penuh bagi kader atau pengurus NU untuk berpartisipasi dalam politik praktis, karena tidak mengeluarkan kebijakan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Faktor lainnya yaitu ada juga pengurus NU yang aktif dan memiliki jabatan di partai politik sehingga wajar terjadi perbedaan sikap politik, kemudian kepentingan pribadi juga termasuk ke dalam faktor yang menyebabkan adanya perbedaan sikap politik, karena pengurus memiliki kepentingan yang nantinya untuk menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri, selain itu juga berprinsip kepada khittah NU.

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PCNU PONOROGO DALAM MENENTUKAN PILIHAN POLITIKNYA PADA PILKADA TAHUN 2020

Pilihan-pilihan politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo tentunya tidak hadir begitu saja, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai hal. Organisasi keagamaan dan politik merupakan suatu fenomena yang khas dan didalamnya mencakup pola perilaku pemilih warga Nahdlatul Ulama (NU) khususnya PCNU Ponorogo dengan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya. Pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, merupakan rangkaian proses demokrasi yang menyajikan berbagai rangkaian peristiwa setiap individu akan menyambut hal tersebut secara berbeda-beda. Ada berbagai hal yang terlibat dalam proses munculnya perilaku pemilih PCNU Ponorogo. Proses menjatuhkan pilihan dan pemahaman serta tanggapan berbagai fenomena politik didasari oleh berbagai hal dan faktor sosial. Hal ini melibatkan dimensi kognisi dan juga dimensi afeksi berupa hal-hal yang bersifat emosional. Selain hal tersebut terdapat dimensi evaluatif yang menjadi preferensi dalam bersikap selanjutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Yang namanya politik itu kan karena unsur kecocokan. Kecocokan itu karena programnya, kecocokan itu karena kedekatannya, peretemannya, kecocokan itu karena bisa melihat progres sebelumnya, bisa karena perilaku sebelumnya, itu adalah banyak hal yang membentuk sebuah kecocokan politik itu kan utamanya proses politik. Proses pemilihan pemimpin, biasanya diawali siapa dia, seperti apa programnya, kemudian latar belakangnya, bagaimana dulu sempak terjangnya kan seperti itu”, (Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Kecocokan antara faktor-faktor tersebut dapat membentuk preferensi dan sikap pemilih terhadap calon tertentu. Dengan mempertimbangkan tersebut, pemilih PCNU Ponorogo akan membuat keputusan politik mereka. Maka dari itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari PCNU Ponorogo menentukan pilihan politiknya. Maka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik pengurus PCNU Ponorogo pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo antara lain sebagai berikut :

1. Kesamaan Agama

Agama merupakan landasan mental spiritual yang sangat kuat, bagi umatnya berguna untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam konteks

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo tahun 2020, sebagian pemilih memilih calon pemimpin yang berdasarkan kesamaan agama. Mereka percaya bahwa seorang pemimpin baik haruslah memiliki keyakinan agama yang kuat dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Mereka menganggap bahwa pemimpin yang memiliki komitmen agama yang tinggi akan lebih mungkin untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Para pemilih yang memilih berdasarkan alasan agama mengharapkan bahwa calon pemimpin memiliki tingkat ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama yang dianut. Mereka juga menilai pemimpin dari segi ahlakul karimah, yaitu perilaku yang baik dan mulia sesuai dengan nilai-nilai agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Dalam menentukan pilihan calon kepala daerah faktor utama yang saya lihat agamanya. Yang jelas agamanya harus islam, karena masyarakat Ponorogo mayoritas beragama islam. Maka dari itu, dalam menentukan calon kandidat agama sangat penting”, (Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Hal sama juga disampaikan oleh Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo yang mengungkapkan bahwa:

“Ya kita orang islam wajib muslim. Alasan saya memilih pasangan calon bupati Sugiri-Lisdyarita, saya melihat dari cara beliau bertutur kata, bersikap, dan cara beliau dalam berkampanye yang selalu mengutamakan agama”, (Wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo 27 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor kesamaan agama memainkan peran yang sangat penting dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 kemarin. Dimana pengurus PCNU Ponorogo lebih mengutamakan memilih calon bupati dari orang yang beragama sama dengan alasan bahwa kandidat yang beragama sama mempunyai ukuran kebenaran yang sama, dan berpendapat jika berbeda agama akan berbeda pola pikirnya. Selain itu pengurus PCNU Ponorogo beranggapan bahwa peran agama pada faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih seseorang adalah memberikan batasan mana yang baik dan mana yang tidak baik, menilai seorang kandidat atau figur dalam nilai-nilai atau agama. Dengan kata lain agama menjadi landasan dan rujukan nilai dalam memilih kandidat yang baik atau yang tidak baik.

Faktor kesamaan agama salah satu faktor yang paling penting, di mana kepercayaan dan nilai-nilai agama yang serupa menjadi faktor kunci dalam menentukan dukungan politik mereka. Sebagai organisasi keagamaan, PCNU Ponorogo memiliki basis keagamaan yang kuat, dan pengurusnya cenderung mendukung calon yang dianggap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai agama yang sama. Agama dapat mempengaruhi kehidupan seseorang khususnya bagi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo, disaat yang sama corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang juga akan berimplikasi terhadap kehidupannya. Dengan demikian, adanya kesamaan agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan dirinya sendiri dapat membentuk perilaku politik seseorang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa faktor agama menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar pertimbangan PCNU Ponorogo dalam memilih. PCNU Ponorogo memiliki kecenderungan untuk menggunakan kesamaan agama dalam menentukan pilihan politik pemilihan calon bupati dan wakil bupati 2020. Namun berhubung konstestan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin memiliki agama yang sama yaitu islam, hal ini juga kemudian tidak dapat menjadi acuan utam dalam menentukan perilaku pemilih pengurus PCNU Ponorogo dalam menentukan pilihan politiknya.

2. Kesamaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Pemilih yang mengikuti suatu organisasi tertentu di tingkat lokal seperti menjadi kader atau anggota partai politik, organisasi keagamaan cenderung menggunakan hak pilihnya karena sikap mereka telah terbentuk oleh organisasi yang diikutinya. Dengan keikutsertaan mereka tergabung dalam suatu organisasi, akan otomatis pengetahuan mereka terkait isu-isu yang berkembang dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersebut akan bertambah, baik tentang figur calon bupati dan wakil bupati atau tim sukses yang berada dibelakangnya. Sehingga, hal ini tersebut sedikit banyak dalam menentukan sikap mereka dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin.

Kesamaan dalam keanggotaan atau afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terbukti menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku pemilih dalam memilih calon kandidat. Fenomena ini muncul akibat afiliasi kelompok, di mana individu cenderung lebih merasa dekat dan memiliki ikatan emosional dengan anggota kelompok yang sama. Dalam konteks pemilihan umum, anggota ormas sering kali

merasakan ikatan identitas dan saling dukung yang membentuk lingkungan sosial yang kuat, yang pada akhirnya memperkuat rasa solidaritas dan persatuan di antara mereka.

Ketika anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki pilihan calon kandidat yang juga memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan organisasi yang sama, perasaan kepercayaan, kebanggaan, dan loyalitas terhadap ormas tersebut dapat memainkan peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Individu merasa bahwa dengan memilih calon yang berasal dari lingkungan ormas, mereka turut serta dalam memperkuat dan memajukan tujuan serta nilai-nilai yang diemban oleh organisasi. Ini menciptakan rasa keterkaitan yang lebih dalam dengan proses pemilihan umum dan mendorong pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat yang dapat mewakili aspirasi ormas mereka.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo yang mengungkapkan bahwa:

“Ya kita orang islam wajib muslim. Wajib muslim dalam konteks kebangsaan wajib dia orang Nahdlatul Ulama (NU). Kalau dia NU nya bagus sudah tentu NKRI harga mati pancasila jaya. Kalau bukan orang NU, mohon maaf bisa menjadi islam garis keras. Ya otomatis sudah kita sampaikan karen NU itu amal mahruf nahi munkar, carilah pemimpin-pemimpin yang kelak meringankan hisab kita dihadapan Allah SWT. Dimana NU itu berpijak moderat, kalau bukan orang NU berbahaya. Orang NU insyaallah aman, karena orang NU itu islmnya rahmatan lil alamin”, (Wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo 27 Juni 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ilham selaku ketua GP Ansor yang mengungkapkan bahwa:

“Saya kemarin memilih Pak Sugiri, karena beliau dulu pernah juga sebagai Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah (PW) Ansor Jawa Timur. Maka dari itu saya kemarin lebih condong ke Pak Sugiri”, (Wawancara dengan Ilham selaku ketua GP Ansor Ponorogo 17 Juni 2023).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat fakta yang dimana pengurus PCNU Ponorogo memilih bakal calon Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2020 kemarin dikarenakan adanya kesamaan dalam organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam memilih kandidat pada pemilihan umum, para pengurus PCNU Ponorogo cenderung lebih condong untuk memilih kandidat yang memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Keyakinan bahwa calon yang sejalan

dengan nilai-nilai organisasi akan mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakil, menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Keterikatan emosional dan ikatan kekeluargaan yang terjalin dalam lingkungan organisasi juga memperkuat dorongan untuk mendukung calon-calon yang berasal dari latar belakang NU.

Hasil temuan menunjukkan selain menggunakan kesamaan agama dalam menentukan pilihan politik kesamaan dalam organisasi juga menjadi patokan pengurus PCNU Ponorogo dalam memilih calon kandidat bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin. Namun berhubung dengan kedua kontestan juga memiliki kesamaan organisasi dimana kedua calon kandidat bupati tersebut merupakan kader dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu dibuktikan sebagai berikut dimana Ipong Muchlissoni selain berlatar belakang seorang pengusaha, ia juga merupakan cucu dari Usman Subadi merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo yang cukup mempunyai pengaruh di masanya. Sekaligus orang pertama di Kabupaten Ponorogo yang menjabat Ketua Gerakan Pemuda Anshor, salah satu organisasi sayap perjuangan NU. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga tokoh-tokoh NU di Kabupaten Ponorogo. Selama memimpin DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur, beliau juga dikenal sebagai satu orang dekat dengan Gus Dur. Selain itu Sugiri Sancoko sebagai Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah (PW) Ansor Jawa Timur dan pernah menjawab sebagai Wakil Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur. Maka kesamaan agama dan kesamaan organisasi kemudian tidak dapat menjadi acuan dalam menentukan pilihan politik PCNU Ponorogo

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo kemarin, memberikan gambaran kepada kita bahwa suatu latar belakang lingkungan dapat membentuk kepribadian atau karakter seseorang dalam menentukan perilaku pemilih. Ungkapan yang disampaikan oleh salah satu narasumber menjadi bukti bahwa lingkungan dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada anggota Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan pilihannya di Pilkada kemarin. Pentingnya afiliasi dengan NU atau organisasi terkait dalam menentukan pilihan calon kandidat pada pemilihan umum. Interaksi sosial, nilai-nilai bersama, dan norma-norma yang diterima dalam lingkungan ormas menjadi faktor yang membentuk pandangan dan preferensi pemilih dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan mereka dan pemilihan kepala daerah.

3. Status Sosial

Permasalahan dalam pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo terkait status sosial juga menjadi faktor pendukung dalam menentukan perilaku politik di lingkungannya. Keterkaitan tersebut berdasarkan bagaimana status sosial dapat membentuk pola pikir seseorang dalam bertindak. Disini peneliti akan memberikan pertanyaan bagaimana pengurus PCNU Ponorogo menilai seseorang kandidat apakah mereka akan melihat status sosial seseorang kandidat seperti pendidikan yang tinggi dari calon bupati dan wakil bupati, kesamaan suku atau etnis atau pekerjaan, ataupun keluarga dan bahkan alasan pertemanan. Wawancara yang dilakukan dengan Rino sebagai pengurus ranting NU Desa Karangpatihan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pandangannya terhadap status sosial para kandidat dalam melakukan pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

“Tidak dipungkiri bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat memberikan suatu karakter tersendiri. Tapi dalam hal ini kalau saya, saya memilih tidak terlalu memperhatikan tingkat pendidikan calon, tetapi saya memilih calon karena melihat rekam jejak calon tersebut”, (Wawancara secara online dengan Rino selaku pengurus Ranting NU Desa Karangpatihan 13 September 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ilham selaku ketua GP Ansor yang mengungkapkan bahwa:

“Tidak perlu tingkat pendidikan yang tinggi intinya pada saat calon terpilih nantinya dapat membuat masyarakat sejahtera. Yang penting calon baik jujur tidak korupsi, dan dapat diandalkan”, (Wawancara dengan Ilham selaku ketua GP Ansor Ponorogo 17 Juni 2023).

Namun adapula warga yang berpendapat berbeda dengan argumen di atas, seperti halnya Anik Nur Habyba selaku warga NU, Dosen Universitas Trisakti yang berpendapat :

“Menurut saya dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang makanya saya memperhatikan tingkat pendidikan calon, tingak pendidikan seseorang membentuk pola pikir yang hebat juga pasti mempengaruhi proses pengambilan keputusan”, (Wawancara secara online dengan Anik Nur Habyba selaku dosen Universitas Trisakti 13 September 2023).

Dapat disimpulkan bahwa bagi sebagian orang pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan untuk memberikan suara. Peneliti menyimpulkan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo tidak

memilih dikarenakan status sosial seorang kandidat bahkan ada beberapa narasumber mengemukakan bahwa pendidikan yang tinggi belum tentu dapat dikatakan bahwa pemimpin yang terpilih akan dapat menjadi amanah, melainkan karena pengalamannya di bidang tersebut. Tetapi warga NU juga ada yang sadar akan pentingnya tingkat pendidikan dari calon bupati dan wakil bupati tersebut.

Faktor status sosial seperti pendidikan calon bupati dan wakil bupati menjadi faktor pendukung dalam menentukan pilihannya. Hasil penelitian dari narasumber bahwa dalam menentukan pilihannya, narasumber tersebut masih mempertimbangkan latar belakang pendidikan seseorang. Hal tersebut untuk menyakinkan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan menunjukkan kredibilitas calon pemimpin. Oleh karena itu, seorang calon bupati dan wakil bupati harus memiliki pendidikan atau pengalaman yang baik. Namun dua narasumber lainnya tidak menganggap bahwa pendidikan seorang calon bupati dan wakil bupati tidak begitu penting. Peneliti melihat bahwa hal ini tidak sejalan dengan yeori yang mengatakan bahwa faktor pendidikan seorang calon menjadi pertimbangan yang kuat bagi seseorang. Terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang calon bupati dan wakil bupati yang terpenting ialah bisa bekerja untuk masyarakat dan mampu mensejahterakan masyarakat.

4. Program atau Visi Misi Calon Kandidat

Perilaku politik seseorang individu pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) atas dasar suatu program atau visi misi dari suatu pasangan calon kandidat yang akan cenderung mereka lihat sebagai ajang memilih berdasarkan keuntungan yang lebih besar kedepannya. Perilaku politik pengurus PCNU Ponorogo pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat dipengaruhi oleh program kerja atau visi-misi yang ditawarkan oleh calon kandidat. Mereka cenderung memilih calon yang mereka percaya dapat memberikan manfaat dan keuntungan lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo di masa depan.

Dengan demikian pengurus PCNU Ponorogo melakukan pemilihan politik mereka berdasarkan pertimbangan rasional yang terfokus pada kepentingan masyarakat dan harapan perubahan yang diinginkan, dengan memilih calon yang menawarkan program atau visi misi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo:

“Ya jelas dengan adanya visi misi, kita dapat melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh calon jika terpilih kelak, dengan adanya program-program calon pastinya akan berpengaruh sangat besar dengan pilihannya suatu calon bupati dan wakil bupati, dengan melihat program-program atau visi misi dari calon kandidat maka dapat melihat garis besar apa yang menjadi tujuan dari para calon tersebut” (Wawancara dengan Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Ponorogo 16 Juni 2023).

Hal senada disampaikan oleh Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo yang mengungkapkan bahwa:

“Jelas kita harus melihat visi dan misi bakal calon, alasannya karena dari visi dan misi lah kita bisa melihat bakal calon yang sesuai dengan yang kita inginkan, hal tersebut penting untuk menyakinkan masyarakat apa-apa saja yang bisa diperbuat kedepannya dengan program-programnya. Suatu hal yang pasti dalam memilih suatu calon pemimpin dilihat dari visi misinya, apabila visi misinya dapat membawa perubahan dalam masyarakat bukan hanya janji yang tinggi tapi tidak terbukti, dengan begitu kita dapat memilih dengan jelas. Saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama (NU) saya melihat dahulu apakah programnya mempunyai dampak kepada kepentingan masyarakat khususnya warga NU”, (Wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo 27 Juni 2023).

Sama juga yang disampaikan oleh Ilham selaku ketua GP Ansor yang mengungkapkan bahwa:

“Visi misi maupun program yang mereka tawarkan adalah hal yang sangat penting karena untuk menilai yang mana diantara kandidat yang memiliki tujuan yang dianggap lebih mampu memajukan masyarakat. Visi misi ini juga merupakan landasan atau tolak ukur keberhasilan selama menjabat. Ya tentu sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU) cukup berpengalaman di dalam memilih pemimpin tentu melihat bagaimana visi dan program kerja calon ada tidak manfaat bagi orang banyak dan lebih khususnya bagi warga NU”, (Wawancara dengan Ilham selaku ketua GP Ansor Ponorogo 17 Juni 2023).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa pengurus PCNU Ponorogo sebagian besar memilih karena melihat visi misi atau program-programnya yang menjadi andalan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin. Pengurus PCNU Ponorogo melakukan pemilihan politik mereka dengan pertimbangan yang sangat rasional dan berfokus pada kepentingan masyarakat serta harapan perubahan yang diinginkan. Visi-misi dan

program kerja calon kandidat menjadi kriteria utama dalam menentukan pilihan politik mereka.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo dalam menentukan pilihannya berdasarkan visi-misi seseorang calon bupati dan wakil bupati dan program yang akan dijalankan calon bupati kedepan sangat penting. Hal ini menjadi salah satu alasan narasumber dalam menentukan pilihan. Peneliti melihat bahwa narasumber yang memandang visi-misi dan program penting adalah salah satu faktor yang dapat menyakinkan narasumber terhadap calon bupati tersebut. PCNU Ponorogo sudah mempunyai harapan-harapan calon pemimpin yang berkualitas yang bukan hanya sekedar janji saja tetapi bisa membuktikan apa yang mereka janjikan kepada masyarakat dan bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang dipercayakan oleh rakyat khususnya masyarakat Ponorogo. Dengan terlaksankannya program yang sudah dijanjikan pada saat kampanye PCNU Ponorogo dapat menilai bahwa pemimpin yang akan dipilihnya mampu memberikan kesejahteraan di masyarakat. Bagi peneliti narasumber yang memilih calon pemimpin berdasarkan program yang dijanjikan adalah salah satu pemilih yang memiliki sifat rasional.

Hasil temuan menunjukkan bahwa Visi atau program yang disampaikan oleh Sugiri Sancoko untuk menjadikan Ponorogo Kota Santri Berbudaya. Sugiri Sancoko memiliki visi atau program untuk mengubah Kabupaten Ponorogo menjadi kota santri yang berbudaya. Hal ini dianggap penting agar generasi muda Ponorogo dapat tumbuh dan berkembang di pesantren, menjadi pribadi yang tabah, tangguh, dan beriman. Ini mencerminkan kepedulian terhadap pendidikan dan budaya Islam, yang merupakan nilai penting bagi NU. Gaya komunikasi yang dimiliki Ipong Muchlissoni dan Sugiri Sancoko sama-sama memiliki gaya komunikasi yang baik. Gaya komunikasi yang baik juga dianggap penting oleh pemilih. Hal ini bisa dianggap sebagai bagian dari pertimbangan rasional karena pemilih mengukur kemampuan calon untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan membawa pesan mereka. Selain itu program Ipong Muchlissoni yang berjanji ingin memperbaiki pendidikan, beliau menjanjikan akan memberikan perhatian khusus kepada Madrasah Diniyah. Dimana madrasah tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mengikutsertakan PCNU Ponorogo dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan hak untuk memberi saran dalam perencanaan anggaran pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan

komitmen untuk melibatkan organisasi keagamaan seperti NU dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

5. Figur atau Kepribadian dari Calon Kandidat

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo, pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, memiliki peran penting dalam menentukan sikap dan pilihan politiknya. Selain visi misi dan program kerja yang diusung oleh calon-calon yang bertarung, faktor lain yang memengaruhi sikap dan pilihan politik PCNU Ponorogo adalah figur dan kepribadian calon. Dalam konteks politik lokal, PCNU Ponorogo cenderung mempertimbangkan calon yang memiliki rekam jejak yang baik. Mereka juga cenderung memilih calon yang memiliki komitmen kuat terhadap upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Semua faktor ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap dan pilihan politik PCNU Ponorogo dalam Pilkada tahun 2020, dengan harapan agar calon yang terpilih nantinya dapat mengemban amanah dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Hariono selaku wakil *ketua PCNU Ponorogo yang mengungkapkan bahwa:*

“Iya saya memilih karena melihat figur dan kepribadian calon, jika memang dia memperlihatkan kelakukan atau sikap yang baik kenapa tidak memilih calon tersebut, kita harus tau kepribadian bakal calon, alasannya karena dari kepribadian kita tau bagaimana dia menjadi pemimpin nantinya”, (Wawancara dengan Sugeng Hariono selaku wakil ketua PCNU Ponorogo 27 Juni 2023).

Pandangan yang sama dengan informan yang diungkapkan oleh Zaenal Arifin selaku Ketua MWC NU Kecamatan Slahung :

“Ketokohan atau figur seseorang menjadi dasar utama dalam memilih calon bupati dan wakil bupati. Karena, elite Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan representasi warga NU sangat memperhatikan figur calon kandidat. Ditambah lagi dengan kemampuan manajemn mengelolah pemerintahan maka keinginan masyarakat untuk sejahtera dapat terwujud lewat program kerjanya”, (Wawancara secara online dengan Zaenal Arifin Ketua MWC NU Kecamatan Balong 12 September 2023).

Sama juga yang disampaikan oleh Anik Nur Habyba selaku warga NU, Dosen Universitas Trisakti yang mengungkapkan bahwa:

“Karna figur atau kepribadian sangat menentukan bagaimana kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin utamanya dalam hal pengambilan keputusan serta kemampuannya dalam melihat dan menyelesaikan sebuah masalah, hal tersebut sebagai salah satu bentuk cerminan dirinya dalam masyarakat, hal tersebut dapat memberikan nilai lebih karena dianggap berpengaruh dalam lingkungan. Karena sebelum kita memilih kita harus kenali dulu siapa yang akan kita pilih, karena hal itu menyangkut kehidupan banyak orang”, (Wawancara secara online dengan Anik Nur Habyba selaku dosen Universitas Trisakti 13 September 2023).

Oleh karena itu, Ilham selaku ketua GP Ansor bahwa yang mempengaruhi perilaku pemilih pengurus NU dalam menentukan pilihan kepala daerah, karena menurutnya:

“Pilihan terhadap calon tertentu harus juga melihat disamping kemampuan dalam memimpin juga tidak kalah pentingnya adalah moralnya. karena cerminan sebuah masyarakat yang baik adalah cerminan dari pemimpinnya yang bermoral”, (Wawancara dengan Ilham selaku ketua GP Ansor Ponorogo 17 Juni 2023).

Dapat disimpulkan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo mayoritas memilih calon kepala daerah dikarenakan melihat kepribadian atau figur calon kepala daerah. mereka berpendapat dengan reputasi yang baik maka itu dapat menjadi pemimpin yang baik dan juga menjadi cerminan bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan yang baik dalam konteks politik lokal dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Perilaku pemilih pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo tentu saja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Setelah melakukan interaksi dengan calon kepala daerah dan melakukan dialog, kemudian menentukan pilihan calon kepala daerah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama, para pengurus PCNU Ponorogo mendukung calon kepala daerah tentu saja mempunyai nilai dan tujuan tertentu. Para pengurus PCNU Ponorogo mendukung salah satu calon kandidat kepala daerah tertentu dengan berbagai macam pertimbangan. Oleh karena itu, visi-misi dan program kerja sangat menjadi motivasi utama di dalam mendukung calon kepala daerah. Namun, demikian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana daya tarik figur calon kepala daerah. Visi, misi, tujuan dan figur yang sejalan dengan nilai-nilai islam dan tujuan organisasi menjadi pertimbangan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah.

Hasil temuan menunjukkan bahwa Visi atau program untuk Menjadikan Ponorogo Kota Santri Berbudaya, Sugiri Sancoko memiliki visi atau program untuk mengubah Kabupaten Ponorogo menjadi kota santri yang berbudaya. Hal ini dianggap penting agar generasi muda Ponorogo dapat tumbuh dan berkembang di pesantren, menjadi pribadi yang tabah, tangguh, dan beriman. Ini mencerminkan kepedulian terhadap pendidikan dan budaya Islam, yang merupakan nilai penting bagi NU. Gaya komunikasi yang dimiliki Ipong Muchlissoni dan Sugiri Sancoko sama-sama memiliki gaya komunikasi yang baik. Gaya komunikasi yang baik juga dianggap penting oleh pemilih. Hal ini bisa dianggap sebagai bagian dari pertimbangan rasional karena pemilih mengukur kemampuan calon untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan membawa pesan mereka. Bentuk janji yang disampaikan oleh calon kandidat kepada Pengurus PCNU Ponorogo yaitu alam segi pendidikan, beliau menjanjikan akan memberikan perhatian khusus kepada Madrasah Diniyah. Dimana madrasah tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mengikutsertakan pengurus Nahdlatul Ulama dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan hak untuk memberi saran dalam perencanaan anggaran pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan organisasi keagamaan seperti NU dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Faktor-faktor yang telah diungkapkan oleh narasumber penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo memiliki pertimbangan yang rasional sesuai dengan model pendekatan ini. Menurut Surbakti pendekatan pilihan rasional dapat diartikan sebagai cara pemilih dalam mengakalkulasikan untung dan rugi. Bagi narasumber penelitian perhitungan untung dan rugi dapat menjadi pertimbangan yang kuat dalam keputusan pilihan baik memilih kandidat calon bupati. Hasil penelitian sejalan dengan model pendekatan rasional masing-masing narasumber menjadikan program yang dijanjikan sebagai keuntungannya dalam memilih pasangan calon. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa sikap pemilih dalam memberikan pilihannya pada salah satu calon tergantung pada visi-misi, program yang dijanjikan serta figur kandidat. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa perilaku pemilih pengurus NU Ponorogo dapat sesuai dengan konsep pendekatan pilihan rasional.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa pilihan politik PCNU Ponorogo cenderung memilih berdasarkan pertimbangan rasional, yaitu dengan memeriksa program-program

yang dijanjikan oleh calon-calon, visi-misi mereka, dan figur kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan faktor identitas atau afiliasi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini, pengurus PCNU Ponorogo nampaknya mengutamakan kandidat yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan pendidikan Islam, serta program-program yang berfokus pada masalah ekonomi dan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat setempat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Sikap Politik Pengurus PCNU Ponorogo pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, tetapi memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk terlibat dalam aktivitas politik sesuai dengan hak pribadi mereka. Dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo kemarin, NU tidak mengeluarkan keputusan atau dukungan resmi kepada salah satu pasangan calon. Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo memiliki perbedaan preferensi politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, dengan sebagian mendukung Sugiri Sancoko, sebagian mendukung Ipong Muchlissoni, dan ada juga yang netral. Perbedaan preferensi politik ini dianggap wajar dan diterima oleh pengurus NU Ponorogo, karena organisasi NU memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya dalam politik praktis dan tidak mengeluarkan kebijakan mendukung salah satu pasangan calon. Faktor-faktor yang menyebabkan pengurus NU Ponorogo berbeda dukungan atau adanya perbedaan preferensi politik dalam Pilbub tahun 2020 kemarin adalah faktor internal NU yang memberikan kebebasan penuh bagi kader atau pengurus NU untuk berpartisipasi dalam politik praktis, karena tidak mengeluarkan kebijakan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Faktor lainnya yaitu ada juga pengurus NU yang aktif dan memiliki jabatan di partai politik sehingga wajar terjadi perbedaan sikap politik, kemudian kepentingan pribadi juga termasuk ke dalam faktor yang menyebabkan adanya perbedaan sikap politik, karena pengurus memiliki kepentingan yang nantinya untuk menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri, selain itu juga berprinsip kepada khittah NU. Keterlibatan PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 kemarin yaitu: *Pertama*, sebagai aktor yaitu berperan sebagai tim sukses atau tim pemenang. *Kedua*, sebagai pendukung yaitu mendukung terhadap calon bupati dan wakil bupati. *Ketiga*, sebagai partisipan yaitu hanya memberikan restu pada semua calon bupati dan wakil bupati tetapi tidak terlibat dalam saling dukung mendukung tetap menggunakan hak pilih dengan cara memberikan suara di hari pemungutan suara.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi PCNU Ponorogo dalam menentukan sikap dan pilihan politik pada Pilkada tahun 2020 kemarin meliputi, faktor kesamaan agama dan organisasi yang sama yang dianut oleh masing-masing kandidat mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan pilihan politik. Kinerja yang baik lebih dipilih dari pada latar belakang pendidikan seseorang calon kandidat. *Selain itu* faktor rasional memberikan pertimbangan menentukan pilihannya berdasarkan visi-misi seseorang calon bupati dan wakil bupati dan program yang akan dijalankan calon bupati kedepan sangat penting. Visi-misi dan program kerja sangat menjadi motivasi utama di dalam mendukung calon kepala daerah. Namun, demikian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana daya tarik figur calon kepala daerah. Visi, misi, tujuan dan figur yang sejalan dengan nilai-nilai islam dan tujuan organisasi menjadi pertimbangan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan faktor identitas atau afiliasi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini, pengurus PCNU Ponorogo nampaknya mengutamakan kandidat yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan pendidikan Islam, serta program-program yang berfokus pada masalah ekonomi dan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengutan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung netralitas politik. Diperlukan upaya untuk memperkuat peran ormas NU dalam menjaga netralitas politiknya. Seperti pembuatan kebijakan yang lebih jelas terkait partisipasi anggotanya dalam aktivitas politik, serta pemahaman yang lebih tentang bagaimana individu dapat terlibat tanpa menggunakan NU sebagai alat untuk politik.
2. Perlunya pendidikan politik bagi anggota Nahdlatul Ulama (NU). Menyadari bahwa anggota NU memiliki kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas politik, maka penting untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota NU dengan ini dapat membantu mereka untuk menentukan pilihannya.
3. Untuk pengurus Nahdlatul Ulama (NU) hendaknya untuk senantiasa terus menerapkan tentang pemahaman terhadap khittah 1926 dan mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan berbegara sebagai wujud

untuk berkhidmah terhadap ummat dan visi-misi perjuangan Nahdlatul Ulama (NU).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57–62. <https://doi.org/10.21831/jpa.v9i1.31618>
- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.837>
- Almond, G., & Verba, S. (1990). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. *Jakarta: Bumu Aksara*.
- Amin, K. (2017). Elite Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa: Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. *Jurnal Sosiologi USK*, 11(2), 167–187.
- Amin, M., Bonto, S., & Khaerah, N. (2021). Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 di Kabupaten Pangkep. *KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies*, 1(2), 195–210.
- Anggoro, D. (2023). Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 (Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung). *Skripsi*.
- Antari, P. E. D. (2018). Intepretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://core.ac.uk/download/pdf/231316145.pdf>
- Apriyawan. (2020). Politik Elite NU: Keterpihakan dalam Pilpres Tahun 2019. *Skripsi*.
- Ardila, S. P. (2022). Perilaku Memilih Masyarakat Desa Nagari, Kota Rawang, kecamatan IV Jurai, kabupaten Pesisir Selatan paa Pemilu Legislatif. *Skripsi*.
- Arravi, M. A., Kushandajani, & Martini, R. (2021). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Santri di Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 311–327.
- Chalik, A. (2017). Pertarungan Elite dalam Politik Lokal. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Despita, W. F., & Gautama, M. I. (2022). Peran Kompas dalam Proses Pemenangan Ahmadi-Antos pada Pilkada 2020 di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan*

- Edwinarta, C. D., & Dwijayanti, R. (2018). Komunikasi Politik Elit NU dan Muhammadiyah dalam Pilkada Kediri. *Jurnal Kajian Media*, 2(1), 20–29. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>
- Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. *Electronic Journal Portal Universitas Negeri Surabaya*, 9(1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Farid, I. S. (2020). *Dinamika Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo*.
- Fauziah, A. H. (2015). Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Suksesi Kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014. *Skripsi*.
- Febrina, R. H., Mustika, B. U., & Dedeas, A. R. (2016). Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 115–129. <https://doi.org/10.22146/jsp.13131>
- Febriyanto, M. S. (2021). Analisis Pola Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. *Skripsi*.
- Hasriani, Madani, M., & Handam. (2015). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 52–65.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih (Identity Politics and Imaging Govenor Candidate to Conduct Voter). *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1737–1748.
- Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, & Lestarini, N. (2020). Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 (Regional Election in Ponorogo Regency: Political Map in The Middle Covid-19 Pandemic). *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 129–148. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8983>
- Jama, S. R., Wiyono, S., & Hady, N. (2021). Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 290–301. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p290-301>

- Jayanti, A. (2017). Analisis Kritis Kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Manthiq : Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 1–13. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/416>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia : Studi di Batam (The Simultaneous Regional Election in Indonesia: A Study in Batam). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(1), 48–56. <http://www.kemendagri.go.id/ar>
- Kurniawan, H. A. (2022a). Analisis Perilaku Politik Elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dalam Pilkada kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Skripsi*.
- Kurniawan, H. A. (2022b). Analisis Perilaku Politik Elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020. *Skripsi*.
- Lestari, D. (2017). Perilaku Politik dan Elite (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elite PWNU pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Terhadap Khittah 1926). *Skripsi*. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40975%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40975/1/DIAH LESTARI-FISIP .pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40975%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40975/1/DIAH%20LESTARI-FISIP.pdf)
- Madani, A. (2023). KONSEP ELITE POLITIK Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah. *Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*. https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP_ELITE_POLITIK_Menelisik_Perilaku/A0HBEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=partisipasi+politik+adalah&pg=PA36&printsec=frontcover
- Mafazah, N. S. (2020). BUDAYA POLITIK DAN ELITE Sikap Politik Pengurus PCNU Pandeglang Banten terhadap Pencalonan Ma ' ruf Amin dalam Pilpres Tahun 2019 Disusun oleh : *Skripsi*.
- Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pradina Pustaka Grup.
- Mahardika, R. (2021). Warok Pendekar Penghenti Money Politics : Peran Jejaring Warok dalam Kontestasi Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal PolGov*, 3(2), 269–320. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i2.2503>
- Masyhuri, M. (2016). NU dan Paradigma Teologi Politik Pembebasan: Refleksi Historis Pasca Khittah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 158–178.
- Maulita, Zulham, & Akmal, M. (2016). Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe). *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 2016.

- Mufarikhin. (2022). Perilaku Politik Warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017. *Skripsi*.
- Muzakki, J. F., & Fauzi, A. M. (2022). Upaya Pembangunan Citra Ormas Islam Moderat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Paradigma*, 11(1).
- Nugraha, J. (2022). Analisis Perilaku Politik Komunitas Motor Ninja Fans Club (NFC) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya. *Skripsi*.
- Nur Alamsyah, M. (2010). Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Academica*, 2(02), 413–425.
- Nuzula, N. (2016). Politik Elite Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Skripsi*.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisyah, M., & Ahyar, D. B. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *CV. Pradina Pustaka Grup* (Cet. 1).
- Pariangu, U. T. (2019). Elite Maling dan Politik Kapital. *Sidoarjo: Zifatama Jawara*.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press* (Cet. 1).
- Ridho, M. I., & Zahratan, A. (2023). Membaca Politik Kebangsaan NU dan Muhammadiyah (Reading NU and Muhammadiyah National Politics). *Mozaic: Islamic Studies Jurnal*, 02(01), 10–19.
- Rohman, F. N. (2019). Sikap Politik PW IPNU Terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. *Skripsi*.
- Saputra, U. (2014). Perilaku Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Desa Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. *Aspirasi: Jurnal SI Ilmu Politik*, 2(4).
- Saraswati, D. R., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2016). Fenomena Politik Soroh Terhadap Sikap Politik Organisasi MGPSSR Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karangasem Tahun 2015. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/22195>
- Sholikin, A. (2018). Perbedaan Sikap Politik Elektoral MUhammadiyah antara Pusat dan Daerah. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 3(2), 1–22.
- Sholikin, A., & Karim, A. G. (2015). DEVIASI SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2-10 di Sleman dan Maros). *Skripsi*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/88394>

- Simanjuntak, D. F., & Fernandes, R. (2022). Perilaku Pemilih Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif di Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 5(3), 343–352. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.644>
- Sulton, Sunarto, & Mahardhani, A. J. (2022). Perilaku politik mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. *JPK; Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 56–61. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Suryo, H. (2015). Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan. *JURNAL Transformasi*, 1(27), 1–47.
- Syamsurijal. (2023). Mengintip Nahdlatul Ulama (NU) dari Timur: Khittah NU dalam Pandangan dan Pengalaman Nahdliyin di Sulawesi Selatan. *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 9(1).
- Ulum, Mi., & Wahid HS, A. (2019). Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia). *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75.
- Umamah, C. (2019). Mobilisasi Politik Muslimat Jawa Timur Dalam Memenangkan Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Journal Political Science*, 1–15.
- Varma, S. (2007). Teori Politik Modern. *Jakarta: Grafindo Persada*.
- Wenda, G., Lopian, M., & Kasenda, V. (2018). Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya (Suatu Studi Pendidikan Non-Formal). *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/20814/20505>
- Wulandari, Y. (2022). CIVIL SOCIETY DAN KEKUATAN POLITIK: Studi atas Dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Joko Widodo- Ma ' ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*.
- Yati, A. M. (2018). Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil dalam Menjawab Tantangan Dakwah. *Jurnal Al-Bayan*, 24(2), 296–316.
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ummul Quro*, 5(1), 85–99. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Sejarah Ponorogo | Pemerintah Kabupaten Ponorogo*. Diakses September 8, 2023, dari <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>
- <https://ponorogokab.bps.go.id/>. Diakses September 8, 2023.
- <https://kab-ponorogo.kpu.go.id/>. Diakses September 8, 2023.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5317282/mengapa-petahana-selalu-kalah-di-pilkada-ponorogo>. Diakses Sepetember 8, 2023.

RPJMD Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

<https://www.coursehero.com/file/91974177/RPJMD-2021-2026pdf/>.

<https://nuponorogo.or.id/pengurus-mwc/>. Diakses Sepetember 8, 2023.

LAMPIRAN



Foto bersama Ketua PCNU Kabupaten Ponorogo, 16 Juni 2023 di Kantor PCNU Kabupaten Ponorogo.



Foto bersama Wakil Ketua PCNU Ponorogo, 27 Juni 2023 di rumah narasumber.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1346/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

30 Mei 2023

Yth.
Pengurus Nahdlatul Ulama Ponorogo Di
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**POLITIK ELITE NAHDLATUL ULAMA (NU): Sikap Politik Pengurus PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Vera Sulistyana Devi Cristyani
NIM : 1906016118
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Ponorogo, 20 Februari 2000
CP/e-mail : 081331216461
Nama Ayah/ Ibu : Mujiatun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Karangpatihan, Kec. Balong, Kab. Ponorogo

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ah. Dekan Kasub. bag
Akademik

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
PONOROGO**

JL.KH. Ahmad Dahlan No.60
Bangunsari Ponorogo Email:
pcnuponorogo60@gmail.com
Website
:<https://nuponorogo.or.id>

Nomor : 277/PC/Tanf/L-19/VI/2023 , 23 Dzulq'dah 1444 H
Lampiran : - 13 Juni 2023 M
Perihal : **SURAT BALASAN PENELITIAN**

Kepada Yang Terhormat

Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di - SEMARANG

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam silaturrahim dengan do'a semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan Allah SWT. dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amiin.

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : 134/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2023 maka dengan ini kami Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo memberikan izin untuk melaksanakan observasi, wawancara dan penggalan data secukupnya kepada :

NAMA	:	Vera Sulistyana Devi Cristyanti
NIM	:	1906016118
Jurusan/ Fakultas	:	Ilmu Politik
Judul	:	"POLITIK ELITE NAHDLATUL ULAMA (NU); Sikap Politik Pengurus PCNU Ponorogo pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wallohulmuwaffiq ilaa aqwamit thoriq *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA Ponorogo

Ketua


Drs. H. Fatchul Aziz, MA



Sekretaris


Dr. H. Luthfi Hadi A, M. Ag

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Masjid Al - Akbar Timur 9 Surabaya 60235, Telepon (031) 8292677 Faksimile (031) 8284996
E-mail : pwnujatim@gmail.com Website : www.pwnujatim.or.id

Nomor : 752/PWIA-III/IX/2020
Lampiran : —
Hal : Instruksi PWNU Jawa Timur

19 Muharram 1442
07 September 2020

Yth Sdr.

1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur beserta Perangkat Organisasi
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Perangkat Organisasi se-Jawa Timur

Di-
Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

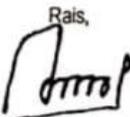
Salam silaturahmi disampaikan, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi setiap aktifitas yang kita lakukan, amin

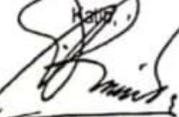
Menyampaikan dengan hormat, bahwa mencermati maraknya pelaksanaan kegiatan dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020, maka demi menjaga tegaknya khittah NU, komitmen identitas, serta jatidiri NU sebagai *jam'iyah diniyah jtimayyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dengan ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Atribut NU;
Seluruh atribut/lambang/symbol dan lain-lain yang bisa dipersepsikan sebagai ciri khas NU tidak dipergunakan (dilarang) pada seluruh kegiatan politik praktis seperti kampanye dan sejenisnya.
2. Pengurus NU sebagai Juru Kampanye (Jurkam);
Sebagai warga negara, warga NU berhak secara aktif terlibat pada kegiatan pemilukada dan kegiatan politik praktis yang lain. Namun bagi pengurus NU dan pimpinan perangkat organisasinya di semua tingkatan jika menjadi juru kampanye (Jurkam) maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan non-aktif dari jabatan sebagai pengurus yang diajukan kepada PCNU setempat atau PWNU.
3. Pengurus NU Dalam Hal Menghadiri Kampanye;
Dalam jabatan formalnya sebagai pucuk pimpinan organisasi, Rais dan Ketua NU tidak menghadiri kampanye calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah setempat, dan hal ini juga bertaku bagi seluruh Pengurus Harian NU, Pimpinan Harian Lembaga dan Badan Otonom serta Badan Khusus NU di semua tingkatan, kecuali telah menyatakan diri non-aktif yang dibuktikan terlebih dulu dengan surat resmi kepada PCNU setempat atau PWNU.
4. Pengurus NU Dalam Hal Penggunaan Kantor NU;
Untuk sementara waktu selama kegiatan dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan pemilukada, PCNU dan seluruh perangkat organisasi NU (lembaga, badan otonom, dan badan khusus) tidak menggunakan kantor NU dan atau kantor perangkat organisasi NU pada semua tingkatan sebagai tempat perayaan politik pencalonan, penyambutan, dan penerimaan serta kegiatan sejenisnya atas calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah setempat.

Demikian surat instruksi ini dibuat untuk diindahkan dan dilaksanakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Rais,

KH. Anwar Manshur

Ketua,

Drs. KH. Safrudin Syarif

Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Ketua,

KH. Marzuqi Mustamar, M. Ag. Prof. KH. Muzakki Grad Dip SEA, M. Ag, M. Phil, Ph. D.
Sekretaris,


Tembusan:
1. PBNU di Jakarta.
2. Arsip.

Koordinator Perangkat PCNU Ponorogo Masa Khidmat 2019-2024

Kebijakan Umum dan Pembinaan Banon

1. KH. Moh. Solehan
2. K. Fauzi Romadlon
3. H. Fatchul Aziz
4. Lutfi Hadi Aminuddin

Muslimat	Fatayat	GP Ansor	IPNU	IPPNU	PAGAR NUSA	PERGURU	ISNU	JAMQUR	PMII	JATMAN	ISHARI	SARBUMUSI
Tuffy Laily	Nuurun Nahdliyah Karunia Yulianti	Samsul Ma'arif	Wahyu Agus Arifin	Mazaya Fikroatul Aimmah	Wahyudi Abdullah	Mukhtar Wahid	Abid Rohmanu	Khoirul Anwar	Mukhtar Wahid	KH. Hamim Adlan	Mukhtar Wahid	Widarto

Pengembangan Amaliyah Aswaja LBMNU-ASWAJA CENTER-LFNU	Pengembangan SDM LPTNU-LP MA'ARIF-LAKPESDAM-LITBANG-RMI NU	Pengembangan Ekonomi Warga LPNU-LP2NU-BINTANG9-IMNU-HPN	Dakwah dan Hubungan Masyarakat LTMNU-LDNU-KBIH/ASBIHU	Informasi dan Komunikasi LTNNU-LESBUMI-RADIO ASWAJA	Pengembangan Kesejahteraan Umat LAZISNU-LKKNU-LPBINU-BPPKNU-LKNU	Advokasi dan Penghimpunan Aset LWPNU-LPBHNU-SARBUMUSI
Miftahul Huda Gus Muqarrabin K. Agus Mahmud	Ahmadi Bardan KH. Fatchurrohman Idam Mustofa	H. Sugeng Hariono Agus Khoirul Hadi	Sugeng A. Wahid M. Nur Kholis H	KH. Halwani Syukron Agus Nasruddin	K. Kholid A. Husni KH. Sholihin	H. Askab Jamjuri Taufiq Ashari

LBM-NU	ASWAJA CEBTRE	LPT-NU	LP MA'ARIF-NU	LP-NU	LP2-NU	LTM-NU	LDNU	LTN-NU	LESBUMI-NU	LAZIZ-NU	LKK-NU	LWP-NU	LPBH-NU
K. Badrus Sholeh Arif	Iswahyu-di	H. Marwan Salahuddin	Asaduddin Luqman	M. Hasby Ashshidhiqy	Ahmad Syarbini	H. M. Tohari	K. Moh. Nur. Sholihin	Budi Hermawan	Ahmad Sauji	Sumarlin	Hariadi	H. Moh. Irhamni	Mahrus Rofi'i

LF-NU
Umar Salim

LAKPESDAM	LITBANG-NU	BINTANG 9	IM-NU	KBIH
Fathul Hadi	H. Sutejo	Ikhwan Nasution	Ahmad Mubarak	Sugeng A. Wahid

RADIO ASWAJA
Agus Nasruddin

LPBI-NU	BPPK -NU
Novi Tri Hartanto	H. Joko Susanto

RMI-NU
K. M. Nabil Hasbulloh

HPN-NU
Agus Setyaji

LK-NU
H. Budi Santoso

Draf Pertanyaan Wawancara

1. Dengan apa siapa? Di Nahdlatul Ulama (NU) sebagai apa?
2. Apakah bapak aktif dalam kegiatan di Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo?
3. Apakah bapak terlibat dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 kemarin?
4. Apa yang mendorong bapak terlibat berpartisipasi dalam kegiatan politik, terutama dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kemarin?
5. Bagaimana bapak memandang jamaah atau anggota dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kemarin?
6. Apa kemarin pada saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bapak tergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon kandidat?
7. Apakah kemarin secara organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) terlibat dalam kegiatan politik tersebut? Apakah kemarin NU mendukung salah satu pasangan calon kandidat?
8. Menurut bapak, bagaimana pendapat bapak dengan adanya perbedaan sikap politik di kepengurusan NU Ponorogo?
9. Kira-kira apa yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antar pengurus PCNU Ponorogo kemarin pada saat Pilkada?
10. Pada saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kemarin, apakah bapak menentukan pilihan politiknya karena kesadaran diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain?
11. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan alasan tingkat pendidikan yang tinggi dari salah satu pasangan, atau karena alasan keluarga, pertemanan, kesamaan jenis kelamin, kesamaan etnis/suku, kesamaan pekerjaan, atau karena kesamaan agama?
12. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan adanya kesamaan keanggotaan dalam suatu organisasi masyarakat atau organisasi politik?
13. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan sikap anda yang terbentuk oleh organisasi (LSM, ormas, partai politik yang anda ikuti)?
14. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan ikatan emosional atau kedekatan ideologi (mempunyai ideologi yang sama) antara anda dengan salah satu partai politik yang mengusung calon yang sudah anda pilih?
15. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan anda mempunyai kedekatan emosional dengan salah satu pasangan calon, dalam hal ini sudah mengenal dekat sosok pasangan calon yang sudah anda pilih tersebut?
16. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan kepribadian atau figur dari kandidat yang dicalonkan?

17. Apakah bapak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan program-program atau visi misi yang ditawarkan oleh calon yang sudah anda pilih itu, program-programnya menarik dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Vera Sulistyana Devi Cristyani
2. NIM : 1906016118
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 20 Februari 2000
4. Alamat : Dukuh Bendo, RT/RW 01/01, Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 081331216461
8. Email : sulistyanav@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	TK Dharma Wanita	2006
2	SDN 3 Karangpatihan	2013
3	SMP Negeri 2 Balong	2016
4	SMA Negeri 1 Balong	2019